

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN KEUANGAN INTERIM/ *INTERIM FINANCIAL STATEMENTS*

**30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
dan untuk periode enam bulan yang berakhir
30 Juni 2019 dan 2018/
*June 30, 2019 and December 31, 2018
and for the six-month periods ended
June 30, 2019 and 2018***

PT Vale Indonesia Tbk

Daftar isi/Contents

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Direksi/*Directors' Statement of Responsibility*

Laporan Auditor Independen/*Independent Auditors' Report*

Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018:

Financial Statements as at June 30, 2019 and December 31, 2018 and for the six-month periods ended June 30, 2019 and 2018:

Laporan Posisi Keuangan Interim/ <i>Interim Statements of Financial Position</i>	1-2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Interim/ <i>Interim Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	3
Laporan Perubahan Ekuitas Interim/ <i>Interim Statements of Changes in Equity</i>	4
Laporan Arus Kas Interim/ <i>Interim Statements of Cash Flows</i>	5
Catatan atas Laporan Keuangan Interim/ <i>Notes to the Interim Financial Statements</i>	6-57

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI ATAS
TANGGUNG JAWAB UNTUK LAPORAN
KEUANGAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2019
DAN 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK
PERIODE-PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018**

**THE DIRECTORS' STATEMENT OF THE
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS AS AT JUNE 30, 2019 AND
DECEMBER 31, 2018 AND FOR THE SIX-MONTH
PERIODS ENDED JUNE 30, 2019 AND 2018**

PT VALE INDONESIA Tbk

Atas nama Direksi, kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

1.	Nama	Nicolas D. Kanter	Name
	Alamat Kantor	The Energy Building, Lt. 31, SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	Office Address
	Alamat Domisili (sesuai KTP)	Jl. Cikatomas II No. 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Address of Domicile (as per Identity Card)
	Telepon Kantor	+62 21 524 9002/524 9000	Office Telephone
	Jabatan	Presiden Direktur/ <i>President Director</i>	Position
2.	Nama	Bernardus Irmanto	Name
	Alamat Kantor	The Energy Building, Lt. 31, SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	Office Address
	Alamat Domisili (sesuai KTP)	Jl. Cilandak I No. 30 Kav. 17 Cilandak Barat Jakarta Selatan	Address of Domicile (as per Identity Card)
	Telepon Kantor	+62 21 524 9002/524 9000	Office Telephone
	Jabatan	Direktur/ <i>Director</i>	Position

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1. | Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Vale Indonesia Tbk ("Perseroan"); | 1. | <i>We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Vale Indonesia Tbk (the "Company");</i> |
| 2. | Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. | <i>The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. | a. Pengungkapan yang telah kami buat dalam laporan keuangan Perseroan telah lengkap dan akurat; | 3. | a. <i>The disclosures we have made in the Company's financial statements are complete and accurate;</i> |
| | b. Laporan keuangan Perseroan tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan kami tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan Perseroan; | | b. <i>The Company's financial statements do not contain misleading information, and we have not omitted any information or facts that would be material to the Company's financial statements;</i> |
| 4. | Kami bertanggung jawab atas pengendalian internal Perseroan. | 4. | <i>We are responsible for the Company's internal control.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi

For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta, 5 Agustus 2019/*August 5, 2019*

Presiden Direktur/*President Director*

Direktur/*Director*

 (Nicolas D. Kanter)	 (Bernardus Irmanto)
---	---

PT Vale Indonesia Tbk

Jakarta: The Energy Building 31st Fl. SCBD Lot 11 A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia. T. (62) 21 524 9000 F. (62) 21 524 9020

Makassar: Jl. Somba Opu No. 281, Makassar 90001, Indonesia. T. (62) 411 873 731 F. (62) 411 856 157

Sorowako: Plant Site Sorowako, Kabupaten Luwu Timur 92984, Sulawesi Selatan, Indonesia. T. (62) 21 524 9100 F. (62) 21 524 9565

www.vale.com/indonesia



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT VALE INDONESIA Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Vale Indonesia Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying financial statements of PT Vale Indonesia Tbk, which comprise the statement of financial position as at 30 June 2019, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the six-month period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

*WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia,
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id*

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

01211/2.1025/AU.1/02/0226-1/1/VIII/2019



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Vale Indonesia Tbk tanggal 30 Juni 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Vale Indonesia Tbk as at 30 June 2019, and its financial performance and cash flows for the six-month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



Hal lain

Laporan keuangan interim terlampir menyajikan informasi komparatif sesuai dengan syarat pengungkapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 “Penyajian Laporan Keuangan”. Informasi komparatif untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas interim serta catatan penjelasan lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 tidak diaudit atau direviu.

Other matter

The accompanying interim financial statements include comparative information as required by Indonesian Financial Accounting Standard No. 1 “Presentation of Financial Statements”. The comparative information for the interim statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows and the related explanatory notes for the six-month period ended 30 June 2018 have not been audited or reviewed.

JAKARTA
5 Agustus/August 2019

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Irhoan Tanudiredja', written in a cursive style.

Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 0226

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM
PADA 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT JUNE 30, 2019 AND DECEMBER 31, 2018

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>30 Juni/ June 30, 2019</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2018</u>	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	111,949	301,153	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	6	-	15,607	Restricted cash
Piutang usaha				Trade receivables
- Pihak-pihak berelasi	7	133,400	124,248	- Related parties
Persediaan	9	147,374	131,779	Inventories
Pajak dibayar di muka	14a			Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		6,895	9,250	- Corporate income tax
- Pajak lainnya		55,641	41,548	- Other taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	10	2,139	4,887	Prepayments and advances
Aset keuangan lancar lainnya	8	2,398	2,526	Other current financial assets
Jumlah aset lancar		<u>459,796</u>	<u>630,998</u>	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Kas yang dibatasi penggunaannya	6	23,417	14,345	Restricted cash
Pajak dibayar di muka	14a			Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan		52,973	-	- Corporate income tax
- Pajak lainnya		116,271	116,281	- Other taxes
Piutang non-usaha				Non-trade receivables
- Pihak-pihak berelasi	33e	87	18	- Related parties
Aset tetap	11, 12	1,451,700	1,434,510	Fixed assets
Aset keuangan tidak lancar lainnya	8	5,382	6,300	Other non-current financial assets
Jumlah aset tidak lancar		<u>1,649,830</u>	<u>1,571,454</u>	Total non-current assets
JUMLAH ASET		<u>2,109,626</u>	<u>2,202,452</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM
PADA 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT JUNE 30, 2019 AND DECEMBER 31, 2018

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	13			Trade payables
- Pihak-pihak berelasi		1,522	1,620	- Related parties
- Pihak ketiga		71,163	89,561	- Third parties
Akrual	15	18,765	25,599	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	17	9,931	15,823	Short-term employee benefit liabilities
Utang pajak	14b			Taxes payable
- Pajak penghasilan badan		-	1,119	- Corporate income tax
- Pajak lainnya		1,217	1,781	- Other taxes
Bagian jangka pendek atas pinjaman bank jangka panjang	18	-	36,519	Current portion of long-term bank borrowings
Liabilitas sewa	11	360	-	Lease liabilities
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham		788	2,042	Share-based payment liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	16	2,352	1,276	Other current financial liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek		106,098	175,340	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang	19	16,171	14,878	Long-term post-employment benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	14d	82,746	90,674	Deferred tax liabilities
Liabilitas sewa	11	251	-	Lease liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	28	46,061	37,833	Provision for asset retirement
Jumlah liabilitas jangka panjang		145,229	143,385	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		251,327	318,725	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham				Share capital
- Modal dasar - 39.745.354.880 saham dengan nilai nominal IDR25 (nilai penuh) per saham pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018				- Authorised capital - 39,745,354,880 shares with par value IDR25 (full amount) per share as at June 30, 2019 and December 31, 2018
- Modal ditempatkan dan disetor penuh - 9.936.338.720 saham pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018	20	136,413	136,413	- Issued and fully paid capital - 9,936,338,720 shares as at June 30, 2019 and December 31, 2018
Tambahan modal disetor	22	277,760	277,760	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
- Dicapangkan	23	27,283	27,283	- Appropriated
- Belum dicapangkan		1,416,843	1,442,271	- Unappropriated
JUMLAH EKUITAS		1,858,299	1,883,727	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		2,109,626	2,202,452	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2019 DAN 2018

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2019 AND 2018

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2019	2018 (tidak diaudit/ unaudited)	
Pendapatan	33a	292,250	374,611	Revenue
Beban pokok pendapatan	24	(315,018)	(321,073)	Cost of revenue
(RUGI)/LABA BRUTO		(22,768)	53,538	GROSS (LOSS)/PROFIT
Pendapatan lainnya	26	3,425	2,322	Other income
Beban usaha	25	(7,643)	(5,728)	Operating expenses
Beban lainnya	27	(8,419)	(7,953)	Other expenses
(RUGI)/LABA USAHA		(35,405)	42,179	OPERATING (LOSS)/PROFIT
Pendapatan keuangan		2,870	1,841	Finance income
Biaya keuangan	34	(2,665)	(3,656)	Finance costs
PENDAPATAN/(BIAYA) KEUANGAN, BERSIH		205	(1,815)	NET FINANCE INCOME/(COSTS)
(RUGI)/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(35,200)	40,364	(LOSS)/PROFIT BEFORE INCOME TAX
Manfaat/(beban) pajak penghasilan	14c	9,022	(10,976)	Income tax benefit/(expense)
(RUGI)/LABA PERIODE BERJALAN		(26,178)	29,388	(LOSS)/PROFIT FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
- Perubahan yang timbul dari pengukuran ulang aktuarial dari liabilitas imbalan pascakerja	19	1,000	224	- Changes resulting from actuarial remeasurement of post- employment benefit liabilities
- Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain	14d	(250)	(56)	- Income tax on other comprehensive income
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		750	168	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH (RUGI)/LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		(25,428)	29,556	TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS)/ INCOME FOR THE PERIOD
(RUGI)/LABA PER SAHAM				(LOSS)/EARNINGS PER SHARE
- Dasar dan dilusian (dalam nilai penuh Dolar AS)	31	(0.003)	0.003	- Basic and diluted (in full amount of US Dollars)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2019 DAN 2018

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2019 AND 2018

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	Modal saham/ <i>Share capital</i>	Tambahkan modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i>	<u>Saldo laba/Retained earnings</u>		Jumlah/ <i>Total</i>	
			Dicadangkan/ <i>Appropriated</i>	Belum dicadangkan/ <i>Unappropriated</i>		
Saldo 1 Januari 2018	136,413	277,760	27,283	1,377,911	1,819,367	Balance as at January 1, 2018
Laba komprehensif 2018						Comprehensive income 2018
Laba periode berjalan	-	-	-	29,388	29,388	Profit for the period
Total penghasilan komprehensif lain	-	-	-	168	168	Total other comprehensive income
Saldo 30 Juni 2018 (tidak diaudit)	136,413	277,760	27,283	1,407,467	1,848,923	Balance as at June 30, 2018 (unaudited)
Saldo 1 Januari 2019	136,413	277,760	27,283	1,442,271	1,883,727	Balance as at January 1, 2019
Rugi komprehensif 2019						Comprehensive Loss 2019
Rugi periode berjalan	-	-	-	(26,178)	(26,178)	Loss for the period
Total penghasilan komprehensif lain	-	-	-	750	750	Total other comprehensive income
Saldo 30 Juni 2019	136,413	277,760	27,283	1,416,843	1,858,299	Balance as at June 30, 2019

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT Vale Indonesia Tbk

LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2019 DAN 2018

(Disajikan dalam ribuan Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

INTERIM STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2019 AND 2018

(Expressed in thousands of US Dollars, unless otherwise stated)

	Catatan/ <i>Notes</i>	2019	2018 (tidak diaudit/ <i>unaudited</i>)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		283,098	358,008	Receipts from customers
Pembayaran kas ke pemasok		(205,756)	(213,938)	Payments to suppliers
Pembayaran pajak penghasilan badan		(53,248)	(4,560)	Payments of corporate income tax
Pembayaran pajak lainnya, bersih		(13,962)	(56,282)	Payments of other taxes, net
Pembayaran ke karyawan		(52,157)	(53,439)	Payments to employees
Penempatan jaminan keuangan		(14,486)	-	Placement of financial guarantee
Penarikan jaminan keuangan		5,414	-	Withdrawal of financial guarantee
Penerimaan pendapatan keuangan		2,870	1,841	Receipts of finance income
Pembayaran royalti dan retribusi		(25,386)	(16,874)	Payments of royalties and levies
Arus kas bersih (digunakan untuk)/ dihasilkan dari aktivitas operasi		(73,613)	14,756	Net cash flows (used in)/provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembayaran untuk pembelian aset tetap		(92,409)	(29,723)	Payments for acquisition of fixed assets
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(92,409)	(29,723)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	6	(3,902)	(19,824)	Placement of restricted cash
Pencairan kas yang dibatasi penggunaannya	6	19,509	19,863	Withdrawal of restricted cash
Pembayaran pinjaman jangka panjang	18	(37,500)	(18,750)	Repayments of long-term borrowings
Pembayaran liabilitas sewa		(180)	-	Payment of lease liabilities
Pembayaran beban keuangan		(1,237)	(1,696)	Payments of finance costs
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		(23,310)	(20,407)	Net cash flows used in financing activities
Penurunan bersih kas dan setara kas		(189,332)	(35,374)	Net decrease in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal periode		301,153	221,699	Cash and cash equivalents at the beginning of the period
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas		128	(429)	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada akhir periode		111,949	185,896	Cash and cash equivalents at the end of the period

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

1. Umum

PT Vale Indonesia Tbk, ("Perseroan") didirikan pada tanggal 25 Juli 1968 dengan akta No. 49 tanggal 25 Juli 1968, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, notaris publik di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/18 tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan dalam Tambahan No. 93, Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 1968. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir diubah dengan akta No.121 tanggal 29 Juni 2015 dan akta No. 14 tanggal 4 April 2018, yang keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., notaris publik di Jakarta tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui masing-masing dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 29 Juni 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada tanggal 4 April 2018. Perubahan dalam akta No.121 tanggal 29 Juni 2015 telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0938647.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015 serta telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0948078 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015, sedangkan perubahan dalam akta No. 14 tanggal 4 April 2018 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0135774 tanggal 5 April 2018.

Entitas induk langsung Perseroan adalah Vale Canada Limited ("VCL") dan entitas pengendali utama adalah Vale S.A., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil.

Pabrik Perseroan berlokasi di Sorowako, Sulawesi Selatan dan kantor yang terdaftar berlokasi di *The Energy Building*, Lt. 31, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan utama Perseroan adalah dalam eksplorasi dan penambangan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran nikel beserta produk mineral terkait lainnya. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1978.

Hak Perseroan untuk mengembangkan dan mengoperasikan proyek nikel dan mineral-mineral tertentu lainnya di daerah yang sudah ditentukan di pulau Sulawesi didasarkan atas Kontrak Karya ("KK") yang ditandatangani pada 27 Juli 1968 antara Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") dan Perseroan, yang kemudian diubah dan diperpanjang pada 15 Januari 1996, dan terakhir diamendemen pada 17 Oktober 2014 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pertambangan 2009 ("KK 2014").

Berdasarkan ketentuan KK 2014, KK Perseroan akan berakhir pada tahun 2025 dan Perseroan dapat mengajukan untuk melanjutkan operasinya dalam bentuk izin usaha untuk jangka waktu perpanjangan dua kali sepuluh tahun, setelah memperoleh persetujuan dari Pemerintah.

Selain itu, KK 2014 juga mengatur mengenai komitmen Perseroan untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri, serta mengenai komitmen investasi yang sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan (lihat Catatan 39d mengenai komitmen investasi Perseroan).

Fasilitas pembangkit listrik tenaga air ("PLTA") Perseroan yang ada pada saat ini dibangun dan beroperasi berdasarkan Keputusan Pemerintah tahun 1975. Keputusan ini, yang secara efektif juga mencakup pembangkit listrik Karebbe dan Balambano (yang merupakan tambahan dari fasilitas pembangkit listrik awal Larona), memberikan hak kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil alih fasilitas listrik tenaga air tersebut, dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dua tahun sebelum pengambilalihan. Tidak ada pemberitahuan tertulis yang diterima oleh Perseroan sampai saat ini. Apabila hak tersebut digunakan, fasilitas tersebut akan dialihkan sebesar nilai bukunya untuk aset tetap PLTA dan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau harga pasar untuk aset lainnya, dengan syarat Pemerintah menyediakan tenaga listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasi Perseroan, yang tarifnya ditentukan berdasarkan formula yang ditentukan pada Keputusan Pemerintah tahun 1975 tersebut.

Pada tahun 1990, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 49,7 juta lembar saham biasa atau 20% dari 248,4 juta lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), pada tanggal 16 Mei 1990.

Pada RUPSLB yang diselenggarakan pada 6 Juli 2004, para pemegang saham menyetujui dilakukannya pemecahan saham biasa dari satu saham menjadi empat saham. Hal ini berlaku efektif mulai 3 Agustus 2004.

1. General

PT Vale Indonesia Tbk, (the "Company") was established on July 25, 1968 by deed No. 49 dated July 25, 1968 drawn up before Eliza Pondaag, a public notary of Jakarta. The Company's Articles of Association were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. J.A.5/59/18 dated July 26, 1968 and published in Supplement No. 93 to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 62 dated August 2, 1968. These Articles of Association have been amended several times with the latest amendment made by deed No. 121, dated June 29, 2015 and deed No. 14, dated April 4, 2018, both drawn up before Leolin Jayayanti S.H., a public notary of Jakarta, to reflect amendments to the Company's Articles of Association as approved in the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") on June 29, 2015 and in the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") on April 4, 2018, respectively. The amendment in deed No. 121, dated June 29, 2015 was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-0938647.AH.01.02 Year 2015 dated July 3, 2015 and has obtained acceptance of notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-AH.01.03-0948078 Year 2015 dated July 3, 2015, while the amendment in deed No. 14 dated April 4, 2018 has obtained acceptance of notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-AH.01.03-0135774 dated April 5, 2018.

The Company's immediate parent company is Vale Canada Limited ("VCL") and the ultimate parent entity is Vale S.A., a company established under the laws of the Federal Republic of Brazil.

The Company's plant is located in Sorowako, South Sulawesi and the registered office is located in The Energy Building, 31st floor, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

As stated in Article 3 of its Articles of Association, the Company's main activities are exploration and mining, processing, storage, transportation and marketing of nickel and associated mineral products. The Company started its commercial operations in 1978.

The Company's right to develop and operate a project for nickel and certain other minerals in defined areas within the island of Sulawesi was granted pursuant to a Contract of Work ("CoW") dated July 27, 1968 entered into between the Government of the Republic of Indonesia (the "Government") and the Company, which was modified and extended on January 15, 1996, and was later amended on October 17, 2014 as required by the 2009 Mining Law ("the 2014 CoW").

Under the terms of the 2014 CoW, the Company's CoW is set to expire in 2025 and the Company may apply to continue its operations by way of a business license for a period of two consecutive ten-year extensions upon approval of the Government.

Furthermore, the 2014 CoW reflects the Company's commitment to prioritise domestic manpower, goods and services and outlines investment commitments consistent with the Company's growth strategy (refer to Note 39d about the Company's investment commitments).

The Company's existing hydroelectric facilities were constructed and are currently operating pursuant to the Governmental Decree of 1975. This decree, which effectively covers the Karebbe and the Balambano power plants (which are additions to the original Larona facility), provides the Government with the right to acquire the hydroelectric facilities, with two years' prior written notice to the Company. No such notice has been received to date. If this right is exercised, the facilities will be transferred at their net book value for hydroelectric fixed assets and lower of cost or market price for other assets, under the condition that the Government shall supply the Company with sufficient electrical power for its operations, at a rate based on a formula stated in the Governmental Decree of 1975.

In 1990, the Company conducted an Initial Public Offering ("IPO") of 49.7 million ordinary shares or 20% of the 248.4 million shares issued and fully paid. The shares were registered on the Jakarta Stock Exchange (now the Indonesia Stock Exchange) on May 16, 1990.

At the EGMS held on July 6, 2004, the shareholders approved a four-for-one stock split of the Company's ordinary shares. This became effective on August 3, 2004.

1. Umum (lanjutan)

Pada RUPSLB yang diselenggarakan pada 17 Desember 2007, para pemegang saham menyetujui pemecahan saham biasa, dari satu saham menjadi sepuluh saham, yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham Perseroan. Hal ini berlaku efektif di Bursa Efek Indonesia mulai 15 Januari 2008.

Perseroan mengadakan RUPST pada 2 April 2019 yang menyetujui antara lain, pengunduran diri Lovro Paulic sebagai Direktur. Dengan mempertimbangkan kebutuhan Perseroan dan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan, pemegang saham menyetujui pengangkatan Febriany Eddy sebagai Wakil Presiden Direktur, Bernardus Irmanto, Dani Widjaja, Agus Superiadi dan Vinicius Mendes Ferreira, masing-masing sebagai Direktur, efektif sejak penutupan RUPST 2019 sampai dengan penutupan RUPST 2021.

Terkait dengan susunan Dewan Komisaris, pemegang saham menyetujui pengunduran diri Robert Alan Morris sebagai Komisaris. Dengan demikian pemegang saham menyetujui pengangkatan Luiz Fernando Landeiro sebagai Komisaris, efektif sejak penutupan RUPST 2019 sampai dengan penutupan RUPST 2020.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Perseroan telah mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh pemegang saham pada RUPST 2019 serta perubahan susunan Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh pemegang saham pada RUPSLB pada tanggal 20 Juli 2018.

Terkait dengan susunan Komite Audit, masa jabatan kedua Dedi Rudaedi sebagai anggota Komite Audit, berakhir pada tanggal 2 April 2019. Dedi Rudaedi pertama kali diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2015. Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Herwan Ng sebagai anggota Komite Audit yang baru efektif sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2021.

Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
Presiden Komisaris	Eduardo Bartolomeo**)	Eduardo Bartolomeo	President Commissioner
Wakil Presiden Komisaris	Mark James Travers	Mark James Travers	Vice President Commissioner
Komisaris	Luiz Fernando Landeiro Nobuhiro Matsumoto Raden Sukhyar *) Mahendra Siregar *)	Robert Allan Morris Nobuhiro Matsumoto Raden Sukhyar *) Mahendra Siregar *)	Commissioners
Ketua Komite Audit	Mahendra Siregar	Mahendra Siregar	Chairman of Audit Committee
Anggota Komite Audit	Herwan Ng Annie Margono	Dedi Rudaedi Annie Margono	Audit Committee Members
Presiden Direktur	Nicolas D. Kanter	Nicolas D. Kanter	President Director
Wakil Presiden Direktur	Febriany Eddy	Bernardus Irmanto	Vice President Director
Direktur	Bernardus Irmanto Dani Widjaja Agus Superiadi Vinicius Mendes Ferreira	Febriany Eddy Lovro Paulic	Directors

*) Komisaris Independen

***) Bapak Eduardo Bartolomeo menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Presiden Komisaris kepada Direksi Perseroan, yang berlaku efektif pada 1 Juni 2019, dengan persetujuan RUPSLB yang akan diadakan pada tanggal 16 Agustus 2019.

Jumlah seluruh karyawan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah 3.074 (31 Desember 2018: 3.092) (tidak diaudit).

1. General (continued)

At the EGMS held on December 17, 2007, the shareholders approved a ten-for-one stock split of the Company's common shares, with the objective of increasing the liquidity of the Company's shares. This became effective on the Indonesia Stock Exchange on January 15, 2008.

The Company held an AGMS on April 2, 2019, which approved among others, the resignation of Lovro Paulic as Director. Taking into consideration the needs of the Company and effectiveness in the decision making process, the shareholders approved the appointment of Febriany Eddy as Vice President Director, Bernardus Irmanto, Dani Widjaja, Agus Superiadi and Vinicius Mendes Ferreira, each as Director, effective as at the closing of the 2019 AGMS until the closing of the AGMS in 2021.

With regards to composition of the Board of Commissioners, the shareholders approved the resignation of Robert Alan Morris as Commissioner. Thus, the shareholders approved the appointment of Luiz Fernando Landeiro as Commissioner, effective as at the closing of the 2019 AGMS until the closing of the AGMS in 2020.

In accordance with the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 48 Year 2017 on the Supervision of the Implementation of Business Activities in the Field of Energy and Mineral Resources, the Company has submitted application for approval of the Minister of Energy and Mineral Resources with respect to the change in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners approved by the shareholders at the 2019 AGMS as well as the change in the composition of the Board of Commissioners approved by the shareholders at the EGMS on July 20, 2018.

With regards to composition of the Audit Committee, the second term of Dedi Rudaedi as member of the Audit Committee has expired on April 2, 2019. Dedi Rudaedi was first appointed as a member of the Audit Committee in 2015. The Board of Commissioners of the Company has appointed Herwan Ng as the new member of the Audit Committee effective from May 1, 2019 until April 30, 2021.

As at June 30, 2019 and December 31, 2018, the composition of the Company's Board of Commissioners, Audit Committee and Board of Directors were as follows:

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
Presiden Komisaris	Eduardo Bartolomeo**)	Eduardo Bartolomeo	President Commissioner
Wakil Presiden Komisaris	Mark James Travers	Mark James Travers	Vice President Commissioner
Komisaris	Luiz Fernando Landeiro Nobuhiro Matsumoto Raden Sukhyar *) Mahendra Siregar *)	Robert Allan Morris Nobuhiro Matsumoto Raden Sukhyar *) Mahendra Siregar *)	Commissioners
Ketua Komite Audit	Mahendra Siregar	Mahendra Siregar	Chairman of Audit Committee
Anggota Komite Audit	Herwan Ng Annie Margono	Dedi Rudaedi Annie Margono	Audit Committee Members
Presiden Direktur	Nicolas D. Kanter	Nicolas D. Kanter	President Director
Wakil Presiden Direktur	Febriany Eddy	Bernardus Irmanto	Vice President Director
Direktur	Bernardus Irmanto Dani Widjaja Agus Superiadi Vinicius Mendes Ferreira	Febriany Eddy Lovro Paulic	Directors

*) Independent Commissioners

***) Mr. Eduardo Bartolomeo tendered his resignation as President Commissioner to the Board of Directors of the Company, effective on June 1, 2019, subject to approval from the EGMS to be held on August 16, 2019.

The total number of employees as at June 30, 2019 was 3,074 (December 31, 2018: 3,092) (unaudited).

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan

Ikhtisar kebijakan akuntansi Perseroan yang signifikan berikut ini disajikan untuk membantu pembaca dalam mengevaluasi laporan keuangan terlampir. Kebijakan akuntansi ini telah diterapkan secara konsisten dalam semua hal yang material untuk periode-periode yang tercakup oleh laporan keuangan ini, kecuali yang dinyatakan dalam Catatan 3. Laporan keuangan Perseroan diotorisasi oleh Direksi pada tanggal 5 Agustus 2019.

2.1. Penyajian laporan keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh KK dengan Pemerintah, pembukuan Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "AS\$") dan dalam Bahasa Inggris.

2.2. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

2.3. Dasar pengukuran

Laporan keuangan disusun berdasarkan pada konsep harga perolehan historis kecuali aset dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

2.4. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia juga mengharuskan manajemen untuk melakukan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan atau kompleksitas yang tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi merupakan hal yang signifikan dalam laporan keuangan, diungkapkan dalam Catatan 4.

2.5. Mata uang fungsional dan presentasi

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi ribuan Dolar AS yang terdekat, yang merupakan mata uang penyajian dan fungsional, kecuali dinyatakan lain.

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.

2.6. Penjabaran mata uang

Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada akhir periode. Penjabaran dari aset dan liabilitas lainnya umumnya dilakukan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Selama periode berjalan, transaksi-transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku selama bulan berjalan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penjabaran dan transaksi dalam mata uang asing dibukukan pada laba rugi.

2.7. Kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya

Kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank, deposito berjangka dan investasi likuid jangka pendek lainnya yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari saat ditempatkan, dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya disajikan secara terpisah sebagai "kas yang dibatasi penggunaannya".

2. Summary of significant accounting policies

The following summary of the significant accounting policies of the Company is presented to assist the reader in evaluating the accompanying financial statements. These policies have been followed consistently in all material respects for the periods covered in the financial statements, except as stated in Note 3. The Company's financial statements were authorised by the Board of Directors on August 5, 2019.

2.1. Presentation of financial statements

As required by its CoW with the Government, the Company maintains its books in United States Dollars ("US Dollars" or "US\$") and in English.

2.2. Statement of compliance

The financial statements are prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, and the Regulations and Guidelines on Financial Statements Presentation and Disclosure Guidance issued by the Financial Service Authority ("FSA").

2.3. Basis of measurement

The financial statements are prepared based on the historical cost concept except for financial assets and liabilities at fair value through profit or loss and using the accrual basis except for the statements of cash flows.

2.4. Use of judgment, estimates and assumptions

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. The Indonesian Financial Accounting Standards also require management to exercise its judgment in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.

2.5. Functional and presentation currency

Figures in the financial statements are rounded to and stated in thousands of US Dollars, which is the presentation and functional currency, unless otherwise stated.

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates.

2.6. Translation of currencies

At each reporting date, monetary assets and liabilities in currencies other than US Dollars are translated into US Dollars at period-end exchange rates. The translation of all other assets and liabilities are generally recognised at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions.

During the period, transactions in currencies other than US Dollars are translated at rates prevailing during each month. Gains or losses resulting from the translation and from foreign exchange transactions are included in profit or loss.

2.7. Cash and cash equivalents and restricted cash

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, time deposits and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

Cash and cash equivalents which are restricted for use, are presented separately as "restricted cash".

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.7. Kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya (lanjutan)

2.7. Cash and cash equivalents and restricted cash (continued)

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas disajikan setelah dikurangi cerukan.

The statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents are presented net of overdrafts.

2.8. Piutang usaha dan non-usaha

2.8. Trade and non-trade receivables

Piutang usaha adalah jumlah yang masih harus dibayar oleh pelanggan untuk nikel *matte* yang dijual dalam transaksi bisnis pada umumnya. Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Trade receivables are amounts due from customers for nickel matte sold in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan dapat mengalami penurunan nilai.

Trade and non-trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, and they are subject to impairment.

Piutang non-usaha dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Perseroan.

Non-trade receivables from related parties are receivables reflecting loans given to related parties of the Company.

2.9. Persediaan

2.9. Inventories

Persediaan dinyatakan dengan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai dari persediaan barang jadi nikel dan nikel dalam proses dinilai dengan metode rata-rata tertimbang dari biaya perolehan. Penyisihan atas persediaan usang dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dibentuk untuk mengurangi nilai tercatat persediaan menjadi nilai realisasi bersih.

Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost of finished nickel inventory and nickel in process is determined using a weighted average cost method. Allowance for inventory obsolescence and decline in the value of inventories, if any, is provided to reduce the carrying value of inventories to their net realisable value.

Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal, dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

Net realisable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less the costs of completion and the estimated selling expenses.

Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya pengupasan tanah, menambang, bahan baku, bahan bakar, bahan pembantu, tenaga kerja, penyusutan serta alokasi biaya overhead yang terkait secara langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel.

Cost of finished goods and work in progress comprises stripping, mining, raw material, fuels supplies, labor, depreciation and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads.

2.10. Biaya dibayar di muka dan uang muka

2.10. Prepayments and advances

Biaya dibayar di muka dibebankan pada laba rugi berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaatnya.

Prepaid expenses are charged to profit or loss on a straight-line basis over the expected period of benefit.

Uang muka adalah pembayaran di muka yang dilakukan Perseroan kepada pemasok. Uang muka dibebankan secara proporsional pada laba rugi sesuai dengan kemajuan dari pembelian barang dan jasa dan kesepakatan dengan pemasok.

Advances are payments made in advance by the Company to its vendors. Advances are charged to profit or loss based on progress of goods and services purchase and agreements with suppliers.

2.11. Aset tetap

2.11. Fixed assets

Aset tetap diakui berdasarkan harga perolehan historis, dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Fixed assets are stated at historical cost, less accumulated depreciation. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

Biaya pengembangan tambang merupakan biaya-biaya yang terjadi di area penambangan sebelum aktivitas penambangan dimulai. Termasuk ke dalam biaya ini adalah biaya-biaya untuk pembuatan jalan yang memberikan akses ke area-area tambang.

Mine development costs represent expenditures incurred in a mining area before mining activities commence. Included in these costs is construction of roads providing access to mining areas.

Biaya pengupasan pasca produksi dimasukkan dalam biaya persediaan, kecuali ketika sebuah proyek baru dikembangkan untuk mendapatkan akses ke cadangan bijih nikel yang signifikan. Dalam hal tersebut, biaya dikapitalisasi dan diamortisasi selama ekstraksi bijih nikel, selama masa manfaat cadangan nikel. Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, tidak ada biaya pengupasan yang dikapitalisasi oleh Perseroan.

Post-production stripping costs are included in the cost of inventory, except when a new project is developed to permit access to a significant nickel ore reserve. In such cases, the cost is capitalised and amortised during the extraction of the nickel ore, over the useful life of the ore reserve. As at June 30, 2019 and December 31, 2018, there are no stripping costs capitalised by the Company.

Biaya-biaya selanjutnya diikutsertakan kedalam nilai tercatat aset atau diakui sebagai aset terpisah, jika memadai, hanya ketika besar kemungkinan masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang terkait dengan aset tetap akan mengalir ke dalam Perseroan dan biaya dari aset tetap tersebut dapat diukur secara andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihentikan pengakuannya. Keseluruhan perbaikan dan perawatan dibebankan ke dalam laba rugi pada periode keuangan dimana hal tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that the future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of a replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.12. Aset tetap dalam penyelesaian

2.12. Construction in progress

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi sebagai akibat dari penghapusan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in profit or loss.

Biaya eksplorasi dibebankan pada saat terjadinya.

Exploration costs are expensed as incurred.

Akumulasi biaya dari konstruksi bangunan dan instalasi mesin dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam penyelesaian. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke dalam aset tetap ketika konstruksi telah selesai. Depresiasi dibebankan sejak tanggal dimana aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of machinery are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

Biaya keuangan dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman yang digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat, dikapitalisasi sampai proses pembangunan tersebut selesai.

Finance and other borrowing costs, such as discount fees on loans used in financing construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete.

Untuk pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings.

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset tertentu yang memenuhi syarat, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset tertentu yang memenuhi syarat. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang seluruh biaya pinjaman atas seluruh pinjaman yang belum dibayarkan, di luar pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset dalam penyelesaian tertentu yang memenuhi syarat.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying asset. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset under construction.

2.13. Penyusutan dan amortisasi

2.13. Depreciation and amortisation

Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus yang didasarkan atas taksiran masa manfaat suatu aset, estimasi masa produksi cadangan bijih, atau selama masa berlakunya KK (disesuaikan dengan asumsi perpanjangan) yang mana yang lebih dulu. Pengecualian terhadap kebijakan ini adalah untuk fasilitas bendungan PLTA yang penyusutannya dilakukan selama masa manfaat 40 tahun berdasarkan Keputusan Pemerintah Indonesia tahun 1975, seperti yang dijelaskan pada Catatan 1 atas laporan keuangan ini.

Depreciation of fixed assets is calculated on a straight-line method based on the earlier of the estimated useful life of the asset, the estimated period of production from ore reserves, or the period of the CoW (adjusted for assumed extensions). An exception to this policy is the hydroelectric dam facilities, which are depreciated over a 40-year useful life based on the 1975 Decree of the Indonesian Government, as referred to in Note 1 to these financial statements.

Estimasi masa manfaat untuk penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

The estimated useful lives of fixed assets used for depreciation are as follows:

	Tahun
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	5 - 40
Jalan dan jembatan	5 - 30
Bangunan	5 - 30
Pengembangan tambang	5 - 30
Pabrik dan mesin	4 - 30
Perabotan dan peralatan kantor	5

	Years
Hydroelectric dam buildings and facilities	5 - 40
Roads and bridges	5 - 30
Buildings	5 - 30
Mine development	5 - 30
Plant and machinery	4 - 30
Furniture and office equipment	5

Perseroan memperkirakan nilai sisa aset tetap diatas adalah nihil.

The Company has estimated the residual value of the above fixed assets at nil.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

The assets' residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Perseroan mengalokasi komponen dari aset tetap yang biaya perolehannya signifikan dan mendeprasiaskan komponen tersebut secara terpisah jika komponen tersebut memiliki masa manfaat yang berbeda.

The Company allocates significant components of the fixed asset costs and depreciates separately each significant component if those components have different useful lives.

Amortisasi biaya pemugaran dihitung berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Amortisation of refurbishment costs is calculated on the estimated economic useful life of the refurbishment using the straight-line method.

2.14. Penurunan nilai dari aset non-keuangan

2.14. Impairment of non-financial assets

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas (jika ada) - sebagai contoh, *goodwill* atau aset tak berwujud - tidak diamortisasi dan dilakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan. Aset ditelaah untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan dalam keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai, ditelaah untuk kemungkinan pembalikan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Assets that have an indefinite useful life (if any) - for example, goodwill or intangible assets - are not subject to amortisation and are tested annually for impairment. Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash inflows (cash-generating units). Non-financial assets other than goodwill that suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.14. Penurunan nilai dari aset non-keuangan (lanjutan)

2.14. Impairment of non-financial assets (continued)

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss.

2.15. Pengeluaran untuk lingkungan hidup

2.15. Environmental expenditures

Pengeluaran - pengeluaran yang berhubungan dengan program lingkungan hidup dan reklamasi yang sedang berjalan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, atau dikapitalisasi dan disusutkan tergantung pada masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Cadangan jaminan reklamasi, yang kemudian diubah dengan suatu mekanisme bank garansi, juga telah dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku (lihat Catatan 39b). Disamping itu, provisi atas penghentian pengoperasian aset telah diakui sebesar taksiran biaya penutupan area tambang, penghentian dan pembongkaran fasilitas.

Expenditures that relate to ongoing environmental and reclamation programs are charged to profit or loss as incurred or capitalised and depreciated depending on their future economic benefits. A reclamation guarantee reserve which subsequently was changed to a bank guarantee mechanism has also been set up in accordance with applicable Government requirements (refer to Note 39b). In addition, a provision for asset retirement has been recognised for the estimated costs of mine closure, decommissioning and dismantling of facilities.

Provisi atas penghentian pengoperasian aset dicatat untuk mengakui kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penghentian penggunaan aset tetap yang berasal dari akuisisi, pembangunan atau pengembangan dan/atau operasi normal aset tetap. Penghentian penggunaan aset tetap ini adalah penarikan selain penghentian sementara pemakaian termasuk penjualan, penelantaran, pengurangan atau penghapusan dengan cara lainnya.

The provision for asset retirement is provided for legal or constructive obligations associated with the retirement of a tangible long-lived asset that results from the acquisition, construction or development and/or the normal operation of a long-lived asset. The retirement of a long-lived asset is its other than temporary removal from service including its sale, abandonment, recycling or disposal in some other manner.

Provisi atas penghentian pengoperasian aset diakui sebagai liabilitas pada saat kewajiban hukum atau konstruktif yang berkaitan dengan penghentian pengoperasian sebuah aset timbul, dan pada awalnya diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban menggunakan tingkat diskonto bebas risiko. Di samping itu, biaya penghentian pengoperasian aset dalam jumlah yang sama dengan jumlah liabilitasnya dikapitalisasi sebagai bagian dari aset yang berkaitan yang kemudian disusutkan nilainya sepanjang masa manfaat aset tersebut. Peningkatan kewajiban ini sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

Provisions for asset retirement are recognised as liabilities when a legal or constructive obligation with respect to the retirement of an asset is incurred, with the initial measurement of the obligation measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a risk-free rate. In addition, an asset retirement cost equivalent to the liabilities is capitalised as part of the related asset's carrying value and is subsequently depreciated or depleted over the asset's useful life. The increase in these obligations due to passage of time is recognised as finance costs.

Perubahan dalam pengukuran kewajiban tersebut yang timbul dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari, harga perolehan aset yang bersangkutan pada periode berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laba rugi. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Perseroan akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut, Perseroan akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan mencatat kerugian dari penurunan nilai, jika ada.

The changes in the measurement of these obligations that result from changes in the estimated timing or amount of the outflow of resources embodying economic benefits (e.g. cash flows) required to settle the obligation, or a change in the discount rate will be added to or deducted from the cost of the related asset in the current period. The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess is recognised immediately in profit or loss. If the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the Company will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If there is such an indication, the Company will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount and will account for the impairment loss incurred, if any.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak berkaitan dengan penghentian pengoperasian aset, dimana Perseroan merupakan pihak yang bertanggung jawab dan diidentifikasi adanya suatu liabilitas serta jumlahnya dapat diukur, maka Perseroan akan mencatat estimasi liabilitas tersebut. Dalam menentukan keberadaan liabilitas yang berkaitan dengan lingkungan, Perseroan mengacu pada kriteria pengakuan liabilitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

For environmental issues that may not involve the retirement of an asset, where the Company is a responsible party and it is determined that a liability exists, and amounts can be quantified, the Company accrues the estimated liability. In determining whether a liability exists in respect of such environmental issues, the Company applies the criteria for liability recognition under applicable accounting standards.

2.16. Pengakuan pendapatan dan beban

2.16. Revenue and expense recognition

Penjualan merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk Perseroan. Penjualan diakui sebagai penghasilan ketika terjadi pengalihan risiko kepada pelanggan berdasarkan ketentuan dalam kontrak penjualan, dan:

Sales represent revenue earned from the sale of the Company's products. Sales are recognised as revenue when the risk of ownership has passed to the customer, based on the terms of the contract, and:

- Produk tersebut berada dalam kondisi yang layak untuk dikirimkan dan tidak diperlukan proses lebih lanjut oleh, atau atas nama, Perseroan; dan
- Produk telah diserahkan kepada pelanggan dan secara fisik sudah tidak berada dalam pengendalian Perseroan (atau kepemilikan atas produk telah terlebih dahulu beralih ke pelanggan).

- The product is in a form suitable for delivery and no further processing is required by, or on behalf of, the Company; and
- The product has been dispatched to the customer and is no longer under the physical control of the Company (or ownership of the product has previously been passed to the customer).

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.16. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan diakui berdasarkan harga yang ditentukan dalam kontrak dengan pelanggan. Berdasarkan ketentuan pembayaran kontrak, periode antara transfer produk ke pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan kurang dari satu tahun. Ketentuan pembayaran tidak memiliki komponen pembiayaan yang signifikan dan tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya.

Beban (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya eksplorasi dan pengupasan tanah) diakui pada saat terjadinya dengan metode akrual.

2.17. Pajak penghasilan

Manfaat/(beban) pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan badan kini dan tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi yang langsung diakui dalam ekuitas atau dalam penghasilan atau kerugian komprehensif lain.

Pajak kini merupakan pajak terutang atau piutang pajak yang diharapkan atas penghasilan kena pajak atau rugi pajak periode berjalan, menggunakan tarif pajak yang secara substansial telah berlaku pada saat tanggal pelaporan, dan mencakup penyesuaian periode sebelumnya baik untuk keperluan rekonsiliasi dengan pajak penghasilan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak tahunan, atau untuk mencatat perbedaan yang timbul dari penilaian pajak. Liabilitas pajak kini atau piutang pajak diukur dengan menggunakan estimasi terbaik atas jumlah yang diharapkan akan dibayar atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian yang terkait dengan kompleksitas atas peraturan-peraturan pajak.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Manfaat pajak tangguhan tidak diakui jika timbul pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan terhadap perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan atas manfaat pajak di masa yang akan datang, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa mendatang cukup besar (*probable*).

Aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi sejauh manfaat pajak terkait tidak lagi memungkinkan untuk terealisasi; pengurangan tersebut dilakukan pembalikan ketika kemungkinan laba kena pajak di masa depan meningkat.

Dalam menentukan besarnya jumlah pajak kini dan tangguhan, Perseroan memperhitungkan dampak dari posisi pajak yang tidak pasti dan setiap tambahan pajak dan denda.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset dan liabilitas pajak kini saling hapus jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan Perseroan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan banding, pada saat keputusan banding tersebut ditetapkan.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.16. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue is recognised based on the price specified in the contracts with the customer. Based on the contract payment terms, the period between the transfer of the products to the customer and payment by the customer is less than one year. The payment terms do not have a significant financing component and were not changed from previous years.

Expenses (including but not limited to exploration and stripping costs) are recognised as incurred on an accrual basis.

2.17. Income taxes

Income tax benefit/(expense) is comprised of current and deferred corporate income tax. Current tax and deferred tax are recognised in profit or loss except to the extent that they relate to items recognised directly in equity or in other comprehensive income or loss.

Current tax is the expected tax payable or refundable on the taxable income or loss for the period, using tax rates substantively enacted as of the reporting date, and includes true-up adjustments made to the previous periods' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assessments. Current tax payable or refundable is measured using the best estimate of the amount expected to be paid or received, taking into consideration the uncertainty associated with the complexity of tax regulations.

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forwards, to the extent that realisation of such benefits is probable.

Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised; such reductions are reversed when the probability of future taxable profits improves.

In determining the amount of current and deferred tax, the Company considers the impact of uncertain tax positions and any additional taxes and penalties.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the entity has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Amendments to the Company's taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed, when the result of the appeal is determined.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.18. Liabilitas imbalan kerja

2.18. Employment benefit liabilities

a. Imbalan pensiun dan imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan

a. Pension and Labor Law benefits

Perseroan memiliki program pensiun iuran pasti yang berlaku semenjak akhir 2012. Sebelumnya Perseroan memiliki program pensiun imbalan pasti. Program pensiun iuran pasti merupakan program pensiun yang dibayarkan oleh Perseroan dengan metode iuran tetap kepada pengelola dana pensiun baik yang wajib, berdasarkan kontrak maupun sukarela. Namun, dikarenakan Undang-Undang ("UU") Ketenagakerjaan No. 13/2003 mewajibkan Perseroan untuk memberikan imbalan kepada karyawan dalam usia pensiun dengan jumlah manfaat tertentu berdasarkan masa kerjanya, ada kemungkinan bahwa Perseroan harus melakukan pembayaran imbalan tambahan apabila jumlah akumulasi dana iuran pensiun pada program pensiun iuran pasti lebih kecil dari jumlah imbalan pensiun yang diharuskan berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Untuk tujuan pelaporan keuangan, program iuran pasti secara efektif diakui seolah-olah sebagai program manfaat pasti.

The Company has maintained a defined contribution pension plan starting from the end of 2012. Prior to this, the Company maintained a defined benefit plan. The defined contribution pension plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions to trustee-administered pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Labor Law No. 13/2003 requires the Company to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on the worker's length of service, the Company is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount, as required by the Labor Law, in particular when the cumulative contributions are less than that amount. For financial reporting purposes, the defined contribution plan is therefore effectively treated as if it were a defined benefit plan.

Perseroan mengakui kelebihan pembayaran (jika ada) yang akan diperlukan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, atas program pensiun iuran pasti, bersama dengan pengembalian investasi yang dihasilkan dari iuran, sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan, akun liabilitas imbalan pascakerja.

The Company recognises the excess (if any) of the payments that would be required under the Labor Law, over the defined contributions paid, together with investment returns arising from the contributions, as a liability in the statements of financial position, accounted for as post-employment benefit liabilities.

Liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan setara dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setidaknya setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (karena tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

The liability recognised in the statements of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated at least annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laba rugi.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefits expense in profit or loss.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain pada periode dimana beban tersebut terjadi. Keuntungan dan kerugian ini termasuk didalam laba ditahan pada laporan perubahan ekuitas dan pada neraca.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise. They are included in retained earnings in the statement of changes in equity and in the balance sheet.

Saat manfaat suatu program diganti atau saat suatu program mengalami kurtailmen, dampak perubahannya yang terkait dengan jasa lalu atau keuntungan atau kerugian kurtailmen diakui langsung di laba rugi.

When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognised immediately in profit or loss.

b. Imbalan kesehatan pascakerja

b. Post-retirement medical benefits

Perseroan memberikan imbalan kesehatan pascakerja untuk para karyawan yang telah pensiun dan memiliki hak atas fasilitas ini. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan dipekerjakan sebelum Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") yang ditandatangani pada bulan Januari 2011 dan memilih untuk mengikuti program ini. Perkiraan biaya imbalan ini diakui sebagai akrual sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti. Liabilitas ini dinilai setidaknya setiap tahun oleh aktuaris yang berkualifikasi. Pada tahun 2014, Perseroan mengubah metode pembiayaan atas program ini dengan menggunakan program asuransi.

The Company provides post-retirement medical benefits to eligible retirees. The entitlement to these benefits is usually given to those employees who remain in service up to retirement age and were hired prior to the signing of the Collective Labor Agreement ("CLA") in January 2011 and opted to enroll into this program. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to that for defined benefit pension plans. A qualified actuary values this liability at least annually. In 2014, the Company changed its method to fund this program through an insurance program.

Pada tahun 2016, Perseroan berhenti menggunakan program asuransi karena peningkatan jumlah premi. Perseroan kemudian menerapkan sebuah pendekatan Layanan Administrasi Saja (pendekatan "ASO") dengan melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu administrasi program ini. Pada pendekatan ini, Perseroan menempatkan sejumlah uang untuk dikelola oleh pihak ketiga untuk menutupi biaya medis bagi peserta program. Pihak ketiga menerapkan pendekatan Koordinasi Imbalan ("COB") yang memungkinkan klaim medis dipertimbangkan dalam perhitungan biaya keseluruhan.

In 2016, the Company stopped using an insurance program due to escalating premiums. The Company subsequently implemented an Administrative Service Only approach ("ASO" approach) by engaging a third party appointed by the Company to help administer the program. In this approach, the Company places a certain amount of money to be administered by a third party to cover the medical costs for the program participants. The third party applies the Coordination of Benefit ("COB") approach which allows the medical claim to be considered in the overall cost calculation.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.18. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

2.18. Employment benefit liabilities (continued)

c. Imbalan pesangon

Pesangon adalah pemutusan hubungan kerja terhutang pada saat karyawan diberhentikan sebelum usia pensiun normal atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Perseroan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara (i) ketika Perseroan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Perseroan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kininya.

c. Termination benefits

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement date or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Company recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Company can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the entity recognises costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves the payment of termination benefits. Termination benefits payable more than 12 months after the reporting date are discounted to reflect present value.

d. Program bonus

Perseroan mengakui liabilitas dan beban untuk bonus berdasarkan rumus-rumus tertentu yang mempertimbangkan berbagai aspek kinerja Perseroan.

d. Bonus plans

The Company recognises a liability and an expense for bonuses based on the applicable formula which consider various aspects of the Company's performance.

e. Pembayaran berbasis saham

Perseroan memberikan program imbalan setara saham dan kinerja unit saham ("PSU") kepada karyawan tertentu ("peserta"). Untuk imbalan setara saham, peserta dapat membeli saham Vale S.A. tanpa ada manfaat yang diberikan oleh Perseroan. Jika saham yang dibeli ditahan selama periode tiga tahun dan peserta masih merupakan karyawan Perseroan, maka peserta berhak mendapatkan imbalan saham setara dengan jumlah saham yang dibeli oleh peserta.

e. Share-based payments

The Company awards eligible employees ("participants") participation in a share matching program and performance share units ("PSU") program. For the share matching program, the participants can acquire Vale S.A.'s shares without any benefits being provided by the Company. If the shares acquired are held for a period of three years and the participants keep an employment relationship with the Company, the participant is entitled to receive from the Company an award in shares, equivalent to the number of shares originally acquired by the participants.

Untuk program PSU, selama periode empat tahun *vesting cycle* peserta berhak menerima imbalan setara dengan nilai pasar saham biasa Vale S.A. berdasarkan faktor kinerja yang diukur sebagai indikator tingkat pengembalian kepada pemegang saham. Imbalan ini dibayarkan secara kas dan dapat berupa pembayaran cicilan, tergantung faktor kinerja setiap tahunnya.

For the PSU program, the participants have the opportunity to receive during a four year-vesting cycle, an award equivalent to the market value of a determined number of common shares and conditioned to Vale S.A.'s performance factor measured as an indicator of total return to the shareholders ("TSR"). This award is paid in cash and can occur in cumulative installments, conditioned to the performance factor of each year.

2.19. Sewa

Pada tanggal 1 Januari 2019, Perseroan telah menerapkan PSAK 73 - Sewa menggunakan pendekatan cara praktis sehingga informasi komparatif tidak disajikan kembali dan tetap dilaporkan berdasarkan PSAK 30.

2.19. Leases

On January 1, 2019, the Company has applied PSAK 73 - Leases using the simplified approach and therefore the comparative information has not been restated and continues to be reported under PSAK 30.

Diterapkan sebelum 1 Januari 2019

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh *lessor* diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi dibebankan pada laba rugi selama periode sewa.

Policy prior to January 1, 2019

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases are charged to profit or loss over the term of the lease.

Diterapkan sejak 1 Januari 2019

Pada tanggal dimulainya kontrak, Perseroan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang teridentifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang teridentifikasi, Perseroan menilai apakah:

Policy starting January 1, 2019

At the inception of a contract, the Company assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether:

- Kontrak melibatkan penggunaan aset yang teridentifikasi;
- Perseroan memiliki hak untuk memperoleh secara substantial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan;
- Perseroan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset.

- The contract involves the use of an identified asset;
- The Company has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Company has the right to direct the use of the asset.

Pada tanggal dimulainya kontrak atau pada saat penilaian kembali kontrak yang mengandung sewa, Perseroan mengalokasikan imbalan dalam kontrak untuk setiap unsur sewa berdasarkan harga relatif dari unsur sewa.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal awal sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya, yang terdiri dari nilai awal dari liabilitas sewa yang disesuaikan dengan setiap pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulai, ditambah dengan biaya langsung yang terjadi dan perkiraan biaya untuk membongkar dan melepas aset terkait atau untuk merestorasi area dimana aset tersebut ditempatkan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Kewajiban sewa pada awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang tidak dibayar pada awal kontrak, didiskontokan menggunakan tingkat bunga implisit dalam sewa.

The Company recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received. The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.19. Sewa (lanjutan)

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus sejak tanggal dimulainya hingga akhir masa manfaat dari aset hak-guna atau akhir dari masa sewa. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dinilai untuk penurunan nilai dan disesuaikan atas pengukuran kembali dari liabilitas sewa.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa di masa depan yang timbul dari perubahan suatu indeks atau tingkat, jika ada perubahan dalam estimasi Perseroan dari jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residu atau jika Perseroan mengubah penilaiannya apakah akan melakukan opsi pembelian, perpanjangan atau pemutusan kontrak. Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara tersebut, penyesuaian dilakukan terhadap jumlah tercatat dari aset hak-guna, atau diakui dalam laba rugi jika jumlah tercatat dari aset hak-guna telah dikurangi menjadi nol.

Perseroan menyajikan aset hak-guna yang tidak memenuhi definisi properti investasi sebagai aset tetap dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan.

Perseroan telah memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dan sewa aset yang bernilai rendah. Perseroan mengakui pembayaran sewa yang terkait dengan sewa ini sebagai beban menggunakan basis garis lurus selama masa sewa.

2.20. Laba/(rugi) per saham

Laba/(rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba/(rugi) periode berjalan yang tersedia untuk pemegang saham dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar dalam periode yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar untuk mengasumsikan konversi dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Perseroan.

2.21. Pelaporan segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional (Direksi adalah pengambil keputusan operasional Perseroan) untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2.22. Instrumen keuangan

Suatu instrumen keuangan diakui pada saat Perseroan menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan. Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Perseroan atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Perseroan kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Aset keuangan

Pengakuan awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Perseroan menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan diukur pada biaya diamortisasi.
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.19. Leases (continued)

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.

The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Company's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee or if the Company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Company presents right-of-use assets that do not meet the definition of investment property as fixed assets and lease liabilities in the statements of financial position.

The Company has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Company recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

2.20. Earnings/(loss) per share

Basic earnings/(loss) per share is calculated by dividing profit/(loss) for the period attributable to shareholders by the weighted average number of common shares outstanding for the relevant period.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume conversion of any dilutive potential ordinary shares owned by the Company.

2.21. Segment reporting

An operating segment is a component of an enterprise:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenue and expenses related to the transactions with different components within the same entity);
- whose operating results are regularly reviewed by the enterprise's chief operating decision maker (the Directors are the Company's chief operating decision maker) to make decisions about resources to be allocated to the segment and to assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

2.22. Financial instruments

A financial instrument is recognised when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Financial assets are derecognised when the Company's contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognised if the Company's obligation expired or are discharged or cancelled.

Financial assets

Initial recognition

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows. The Company assesses whether the financial instruments' cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI").

Financial assets are classified into the three categories as follows:

- Financial assets at amortised cost.
- Financial assets at FVTPL.
- Financial assets at FVOCI.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.22. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Perseroan menentukan klasifikasi aset keuangannya saat pengakuan awal dan tidak dapat merubah klasifikasi yang ditentukan saat penerapan awal tersebut.

Seluruh aset keuangan awalnya diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali dalam hal aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu pada tanggal Perseroan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Perseroan diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lainnya, aset keuangan lancar lainnya, piutang non-usaha dari piha berelasi dan aset keuangan tidak lancar lainnya. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset keuangan yang ditahan hingga pengembalian arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga, dan tidak didesain untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diukur dengan biaya diamortisasi. Nilai tercatat aset tersebut disesuaikan dengan penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian ("ECL") yang diakui dan diukur. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam 'pendapatan keuangan dan pendapatan lainnya' menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas keuangan

Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, Perseroan hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi akan masuk ke dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah utang usaha, akrual, liabilitas imbalan kerja pendek, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan pinjaman.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, utang usaha, akrual, liabilitas imbalankerja pendek, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dan pinjaman diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Perseroan mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran untuk paling tidak 12 bulan setelah tanggal posisi keuangan.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika terdapat hak legal untuk melakukan saling hapus dan terdapat intensi untuk menyelesaikan berdasarkan nilai bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2.23. Penurunan nilai aset keuangan

Perseroan mengakui ECL untuk semua aset keuangan Perseroan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima Perseroan, didiskontokan pada perkiraan tingkat bunga efektif awal.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.22. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification made at initial adoption.

All financial assets are recognised initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the assets.

The Company's financial assets measured at amortised cost include cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, other receivables, other current financial assets, non-trade receivables from related party and other non-current financial assets. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent SPPI, and that are not designated at FVTPL, are measured at amortised cost. The carrying amount of these assets is adjusted by any expected credit losses ("ECLs") allowance recognised and measured. Interest income from these financial assets is included in 'finance income and other income' using the effective interest rate method.

Financial liabilities

The Company classifies its financial liabilities into the categories of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortised cost. As at June 30, 2019 and December 31, 2018, the Company only has financial liabilities measured at amortised cost.

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss fall into this category and are measured at amortised cost. Financial liabilities measured at amortised cost are trade payables, accruals, short-term employee benefit liabilities, other current financial liabilities and borrowings.

Amortised cost is measured by discounting the liability amounts using the effective interest rate, unless the effect of discounting would be insignificant. The effective interest rate is the rate that discounts expected future cash flows to the net carrying amount, on initial recognition. Interest effects from the application of the effective interest rate method are recognised in profit or loss.

Trade payables, accruals, short-term employee benefit liabilities, other current financial liabilities and borrowings are initially measured at fair value less any directly attributable transaction costs. Subsequent to initial measurement, these financial liabilities are measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Financial liabilities are classified as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the balance sheet date.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statements of financial position when there is a legal right of offset and there is an intention to settle on a net basis, or when the asset is realised and the liability is settled simultaneously.

2.23. Impairment of financial assets

The Company recognises an allowance for ECLs for all the Company's financial assets measured at amortised cost. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.23. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

ECL diakui dalam tiga tahap ("*general model*") untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal. Untuk eksposur kredit di mana tidak terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, ECL ditentukan untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan). Untuk eksposur kredit di mana terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diharapkan selama sisa waktu eksposur risiko kredit, terlepas dari waktu peristiwa gagal bayar (ECL sepanjang umur). Untuk aset keuangan yang terdapat bukti obyektif penurunan nilai, ECL sepanjang umur dihitung pada nilai tercatat bersih (setelah dikurangi penyisihan kredit).

Ketika menentukan apakah risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika mengestimasi ECL, Perseroan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada aset keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada aset keuangan pada tanggal pengakuan awal dan mempertimbangkan informasi yang mendukung dan relevan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Perseroan dan informasi penilaian kredit dan termasuk informasi *forward-looking*.

Perseroan mempertimbangkan bahwa piutang usaha memiliki risiko kredit rendah ketika peringkat risikonya setara dengan definisi peringkat investasi yang dipahami secara global. Perseroan menganggap ini sebagai BBB- oleh S&P atau BBB lebih tinggi oleh Japan Credit Rating Agency. Ketika peringkat kredit di bawah BBB- oleh S&P atau BBB oleh Japan Credit Rating Agency, Perseroan menilai apakah peningkatan risiko kredit yang signifikan telah terjadi.

2.24. Dividen

Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan diakui sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan Perseroan pada periode dimana dividen tersebut diumumkan.

2.25. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Seorang individu atau anggota keluarga dekat dari individu tersebut akan berelasi dengan entitas pelapor ketika individu bersangkutan:

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- (iii) merupakan manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau *joint venture* yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh individu berelasi seperti didefinisikan di atas.
- (vii) Orang yang memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 33 atas Laporan Keuangan.

2. Summary of significant accounting policies (continued)

2.23. Impairment of financial assets (continued)

ECLs are recognised in three stages ("*general model*") for impairment based on changes in credit quality since initial recognition. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12 months (12-months ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (lifetime ECL). For financial assets that have objective evidence of impairment, lifetime ECL is calculated at the net carrying amount (net of credit allowance).

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Company compares the risk of a default occurring on the financial assets as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial assets as at the date of initial recognition and considers supportable and reasonable information, that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Company's historical experience and informed credit assessment and including forward-looking information.

The Company considers trade receivables to have low credit risk when its credit risk rating is equivalent to the globally understood definition of 'investment grade'. The Company considers this to be BBB- per S&P or BBB or higher per the Japan Credit Rating Agency. When the credit rating is below the BBB- per S&P or BBB per Japan Credit Rating Agency, the Company assesses whether a significant increase in credit risk has occurred.

2.24. Dividends

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognised as a liability in the Company's statements of financial position in the period in which the dividends are declared.

2.25. Related party transactions

A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:

- (i) has control or joint control over the reporting entity;
- (ii) has significant influence over the reporting entity; or
- (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

- (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- (iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
- (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity itself is such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a related person as identified above.
- (vii) A person that has control or joint control over the reporting entity that has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- (viii) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 33 to the Financial Statements.

3. Perubahan kebijakan akuntansi

3.1. Standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada 1 Januari 2019

PSAK dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru/revisi berikut telah diterbitkan dan berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2019:

- ISAK 33 - Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
- ISAK 34 - Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
- PSAK 22 (Penyesuaian 2018) - Kombinasi Bisnis
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018) - Biaya Pinjaman
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018) - Pajak Penghasilan
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018) - Pengendalian Bersama
- Amendemen PSAK 24: Imbalan Kerja - Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program

Perseroan menerapkan secara dini standar-standar baru yang hanya diwajibkan sejak 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- PSAK 71 - Instrumen Keuangan
- PSAK 72 - Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73 - Sewa

Standar, revisi dan interpretasi baru yang diadopsi Perseroan sejak 1 Januari 2019 tidak berdampak material kepada laporan keuangan Perseroan, kecuali yang dijelaskan di bawah ini:

PSAK 71 - Instrumen Keuangan

Standar ini membahas klasifikasi dan pengukuran aset dan liabilitas keuangan, model penurunan nilai yang baru dan aturan baru untuk akuntansi lindung nilai. Klasifikasi dan model penurunan nilai yang baru berdasarkan PSAK 71 tidak berdampak material terhadap pengukuran dan provisi penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya diakui Perseroan berdasarkan PSAK 55 - Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Pada tanggal 30 Juni 2019, dan 31 Desember 2018, Perseroan hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang berdasarkan PSAK 55. Aset keuangan tersebut memenuhi kriteria PSAK 71 untuk klasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi, karena instrumen keuangan ini dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan kas, yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk model penurunan nilai, Perseroan telah menghitung kerugian kredit yang diperkirakan dari aset keuangan dan menentukan bahwa jumlahnya tidak material.

PSAK 72 - Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Standar ini menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan apakah, berapa banyak dan kapan pendapatan diakui. Standar ini menggantikan PSAK 23 - Pendapatan dan PSAK 34 - Kontrak Konstruksi.

Penerapan PSAK 72 tidak berdampak pada pendapatan yang sebelumnya diakui dalam PSAK 23 karena Perseroan hanya memiliki satu kewajiban pelaksanaan dan waktu pengakuan pendapatan berada pada titik yang sama.

PSAK 73 - Sewa

Berdasarkan PSAK 73, perbedaan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan dihapus. Standar ini mensyaratkan penggunaan aset hak-guna dan liabilitas keuangan untuk membayar sewa diakui. Ada pengecualian pengakuan untuk sewa jangka pendek dan sewa barang bernilai rendah.

Perseroan menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan pendekatan cara praktis. Pada saat transisi, liabilitas sewa diukur sebesar nilai kini dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan pada tingkat bunga pinjaman incremental Perseroan pada tanggal 1 Januari 2019. Aset hak-guna diukur sebesar jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan pembayaran sewa dimuka atau pembayaran terutang. Tidak ada penyesuaian terhadap laba ditahan Perseroan karena Perseroan memilih untuk mengukur aset hak-guna pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa. Lihat Catatan 11 untuk informasi mengenai dampak penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan Perseroan.

3. Changes in accounting policies

3.1. New standards, amendments and interpretations effective on January 1, 2019

The following new/revised PSAK and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") have been issued and are effective starting on or after January 1, 2019:

- ISAK 33 - Foreign Currency Transactions and Advance Consideration
- ISAK 34 - Uncertainty over Income Tax Treatments
- PSAK 22 (2018 Annual Improvement) - Business Combination
- PSAK 26 (2018 Annual Improvement) - Borrowing Costs
- PSAK 46 (2018 Annual Improvement) - Income Taxes
- PSAK 66 (2018 Annual Improvement) - Joint Arrangements
- Amendments to PSAK 24: Employee Benefits - Plan Amendment, Curtailment or Settlement

The Company early adopted new standards which are only mandatory starting January 1, 2020 as follows:

- PSAK 71 - Financial Instruments
- PSAK 72 - Revenue from Contracts with Customers
- PSAK 73 - Leases

The new standards, amendments and interpretations adopted by the Company starting January 1, 2019 have no material impact on the Company's financial statements, except those discussed below:

PSAK 71 - Financial Instruments

This standard addresses the classification and measurement of financial assets and liabilities, new impairment model and new rules for hedge accounting. The new classification and new impairment model under PSAK 71 have an immaterial impact to the measurement and the provision for impairment of financial assets previously recognised based on PSAK 55 - Financial Instruments: Recognition and measurement.

As at June 30, 2019 and December 31, 2018, the Company only has financial assets classified as loans and receivables under PSAK 55. Those financial assets meet the PSAK 71 criteria for classification at amortised cost, because these financial instruments are held within a business model whose objective is to collect the cash flows, which represent solely payments of principal and interest.

For the impairment model, the Company has calculated expected credit losses on financial assets and determined that the amount is not material.

PSAK 72 - Revenue from Contracts with Customers

This standard establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when revenue is recognised. It replaced PSAK 23 - Revenue and PSAK 34 - Construction Contracts.

The adoption of PSAK 72 results in no impact on revenue that was previously recognised under PSAK 23 as the Company has only a single performance obligation and the timing of revenue recognition is at the same point in time.

PSAK 73 - Leases

Under PSAK 73, the distinction between operating and finance leases is removed. The standard requires the right-of-use of the leased asset and a financial liability to pay rentals to be recognised. There are recognition exemptions for short-term leases and leases of low-value items.

The Company applies PSAK 73 using the simplified approach. At transition, lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Company's incremental borrowing rate as at January 1, 2019. Right-of-use assets are measured at an amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments. There is no adjustment to the Company's retained earnings as the Company elected to measure the right-of-use assets at an amount equal to the lease liability. Refer to Note 11 for the information regarding impact of PSAK 73 adoption to the Company's financial statements.

3 Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

3.2. Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan namun belum efektif

Beberapa PSAK dan ISAK baru/revisi telah diterbitkan tetapi belum efektif pada 1 Januari 2019, dan tidak diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini:

- ISAK 35 - Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) - Penyajian Laporan Keuangan
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- Amendemen PSAK 15: Inventasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 112: Akuntansi Wakaf

Standar baru, amendemen, penyesuaian tahunan dan interpretasi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2020, kecuali PSAK 112 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021.

Saat dikeluarkannya laporan keuangan ini, manajemen sedang mempelajari dampak dari adopsi di masa yang akan datang dari standar terkait, pada posisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjen pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, asumsi dan penilaian tersebut dievaluasi secara terus-menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan atas peristiwa di masa mendatang yang memungkinkan berdasarkan kondisi yang ada.

Perseroan telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting berikut dimana dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan yang dilaporkan dalam periode mendatang. Rincian lebih lanjut mengenai sifat dari asumsi-asumsi dan kondisi-kondisi tersebut dapat ditemukan dalam catatan yang relevan atas laporan keuangan.

4.1. Estimasi cadangan

Cadangan adalah estimasi jumlah produk yang dapat secara ekonomis maupun legal diekstraksi dari aset Perseroan. Untuk memperkirakan cadangan bijih nikel, perlu ditentukan asumsi mengenai faktor-faktor geologis, teknis dan ekonomis termasuk jumlah produksi, teknik produksi, nisbah kupasan, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga-harga komoditas, biaya modal dan nilai tukar mata uang.

Memperkirakan jumlah dan/atau kadar cadangan membutuhkan ukuran, bentuk dan kedalaman lapisan bijih atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti "uji petik" (sampel) pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari waktu ke waktu, dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Perseroan dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- Penyusutan dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dapat berubah jika masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- Provisi untuk aktivitas purna operasi, restorasi lokasi aset, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

3. Changes in accounting policies (continued)

3.2. New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective

Certain new/revised PSAKs and ISAKs have been issued that are not yet effective on January 1, 2019 and have not been applied in preparing these financial statements:

- ISAK 35 - Presentation of Financial Statements for Non-profit Oriented Entities
- PSAK 1 (2019 Annual Improvement) - Presentation of Financial Statements
- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements
- Amendments to PSAK 15: Investments in Associates and Joint Ventures
- Amendments to PSAK 62: Insurance Contracts
- PSAK 112: Accounting for Endowments

The above new standards amendments, annual improvements and interpretations are effective beginning January 1, 2020, except for PSAK 112 which is effective from January 1, 2021.

As of the issuance of these financial statements, management is evaluating the impact the future adoption of these standards may have on the Company's financial position and operating results.

4. Critical accounting estimates and judgments

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimates, assumptions and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Company has identified the following critical accounting policies under which significant judgments, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect financial results or the financial position reported in future periods. Further details of the nature of these assumptions and conditions can be found in the relevant notes to the financial statements.

4.1. Reserves estimates

Reserves are estimates of the amount of product that can be economically and legally extracted from the Company's properties. In order to estimate nickel ore reserves, assumptions are required about a range of geological, technical, capital costs and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratios, production costs, transport costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.

Estimating the quantity and/or grade of reserves requires the size, shape and depth of ore bodies or fields to be determined by analysing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgments to interpret the data.

Because the economic assumptions used to estimate reserves change from period to period, and because additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Company's financial results and financial position in a number of ways, including:

- Carrying values of assets may be affected due to changes in estimated future cash flows.
- Depreciation and amortisation charged in profit or loss may change where the useful economic lives of assets change.
- Decommissioning, site restoration and environmental provisions may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.
- The carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.

4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting (lanjutan)

4. Critical accounting estimates and judgments (continued)

4.2. Provisi atas penghentian pengoperasian aset

4.2. Provision for asset retirement

Kebijakan akuntansi Perseroan atas pengakuan provisi untuk reklamasi lingkungan dan penutupan tambang dan penghentian dan pembongkaran fasilitas membutuhkan penggunaan estimasi dan asumsi yang signifikan seperti: persyaratan kerangka hukum dan peraturan yang relevan (termasuk penelaahan masa periode KK); besarnya kemungkinan kontaminasi atau kerusakan serta waktu, luas dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan reklamasi lingkungan dan penutupan tambang; dan juga tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan perbedaan antara jumlah pengeluaran aktual di masa depan dari jumlah yang disisihkan pada saat ini. Provisi yang telah diakui ditinjau secara berkala dan diperbaharui berdasarkan fakta-fakta dan keadaan pada saat itu.

The Company's accounting policy for the recognition of provisions for environmental reclamation and mine closure and decommissioning and dismantling of facilities requires the use of significant estimates and assumptions such as: requirements of the relevant legal and regulatory framework (including assessment of the period of the CoW); the magnitude of possible contamination or disturbance and the timing, extent and costs of required environmental reclamation and mine closure activities; and also the discount rate. These uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The recognised provision is periodically reviewed and updated based on the facts and circumstances available at the time.

Pada tahun 2018, Perseroan mengubah estimasi masa penutupan tambang dari antara tahun 2036 dan 2051 menjadi antara tahun 2041 dan 2056. Hal ini dikarenakan Perseroan berkeyakinan bahwa probabilitas untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah untuk melanjutkan operasinya sebanyak dua kali sepuluh tahun (lihat Catatan 1) meningkat. Hal ini terutama dikaitkan dengan perkembangan proses divestasi Perseroan (lihat Catatan 39d). Walaupun demikian, hasil aktual mungkin berbeda dari estimasi Perseroan.

In 2018, the Company changed the estimated period of its mine closure from between 2036 and 2045 to between 2041 and 2056. This is because the Company believes that the probability of obtaining the Government's approval to continue its operations for two additional ten year periods (see Note 1) is increasing. This is especially associated with the development of the Company's divestment process (see Note 39d). Nevertheless, actual results may differ from the Company's estimate.

4.3. Pajak penghasilan

4.3. Income taxes

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan penyisihan modal dan pengurangan beban tertentu selama estimasi provisi pajak penghasilan Perseroan. Banyaknya transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Judgment and assumptions are required in determining capital allowances and the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for the Company. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, these differences will have an impact on the current income tax and deferred income tax provisions in the period in which the determination was made.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kumulatif rugi fiskal, penyisihan modal, dan perbedaan temporer, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini bergantung pada estimasi produksi, volume penjualan barang, harga komoditas, cadangan, biaya operasi, biaya penutupan dan rehabilitasi tambang, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen lainnya di masa depan.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future production, sales volumes, commodity prices, reserves, operating costs, closure and rehabilitation costs, capital expenditure, dividends and other capital management transactions.

4.4. Penurunan nilai aset non-keuangan

4.4. Impairment of non-financial assets

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan, aset atau unit penghasil kas dievaluasi pada setiap periode pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi tersebut, akan dilakukan perkiraan atas nilai aset yang dapat dipulihkan kembali dan kerugian akibat penurunan nilai akan diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat dipulihkan kembali dari aset tersebut. Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset.

In accordance with the Company's accounting policy, an asset or a cash generating unit is evaluated at every reporting period to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of the recoverable amount is performed and an impairment loss is recognised to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating group of assets is measured at the higher of fair value less costs of disposal and value in use.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai membutuhkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas produksi yang diharapkan dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat 'Estimasi cadangan' di atas), biaya operasi, biaya reklamasi lingkungan dan penutupan tambang serta belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan perubahan situasi dapat mengubah proyeksi ini, yang dapat memengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected production and sales volumes, commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see 'Reserve estimates' above), operating costs, environmental reclamation and mine closure costs, and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may impact the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired, or the impairment charge reduced, with the impact recorded in profit or loss.

4. Estimasi dan pertimbangan akuntansi penting (lanjutan)

4.5. Imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja

Nilai kini kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya (pendapatan) bersih untuk imbalan dimaksud termasuk tingkat bunga diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat kenaikan klaim kesehatan di masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja.

4.5. Imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja (lanjutan)

Perseroan menentukan tingkat bunga diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja. Dalam menentukan tingkat bunga diskonto yang sesuai, Perseroan menggunakan tingkat suku bunga obligasi Pemerintah (karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

5. Kas dan setara kas

30 Juni/June 30 2019 2018

(Dalam ribuan Dolar AS)

Kas di bank:

Dalam mata uang Dolar AS		
JP Morgan Chase Bank N.A.	77,032	42,797
Citibank N.A.	919	10,497
Dalam mata uang Rupiah		
Citibank N.A.	6,024	9,572
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	820	359
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	154	635
	84,949	63,860

Deposito berjangka:

Dalam mata uang Dolar AS		
Standard Chartered Bank	17,000	31,060
Banco Bradesco	10,000	-
ANZ Bank	-	99,840
National Bank of Canada	-	60,393
Citibank N.A.	-	33,000
BNP Paribas	-	13,000
	27,000	237,293

Jumlah

111,949

301,153

Total

Rata-rata suku bunga deposito berjangka di atas adalah:

30 Juni/June 30 2019 2018

Deposito Dolar AS 2.8%

4. Critical accounting estimates and judgments (continued)

4.5. Pension benefits and post-retirement medical benefits

The present value of the pension benefits and post-retirement medical benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for the pension benefits and post-retirement medical benefits include the discount rate, future remuneration changes, increase rate of future medical claims, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension benefits and post-retirement medical benefits obligation.

4.5. Pension benefits and post-retirement medical benefits (continued)

The Company determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension benefits and post-retirement medical benefits. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of Government bonds (as there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which those benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related retirement benefits and post-retirement medical benefits.

Other key assumptions for the pension benefits and post-retirement medical benefits obligations are determined based on current market conditions.

5. Cash and cash equivalents

31 Desember/December 31

(US Dollars, in thousands)

Cash in bank:

Denominated in US Dollars	
JP Morgan Chase Bank N.A.	
Citibank N.A.	
Denominated in Rupiah	
Citibank N.A.	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	

Time deposits:

Denominated in US Dollars	
Standard Chartered Bank	
Banco Bradesco	
ANZ Bank	
National Bank of Canada	
Citibank N.A.	
BNP Paribas	

There are no cash and cash equivalents held with related parties.

Tidak ada kas dan setara kas pada pihak-pihak berelasi.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana dijabarkan di atas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents mentioned above.

6. Kas yang dibatasi penggunaannya

6. Restricted cash

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Kas di bank:			Cash in bank:
Dalam mata uang Dolar AS MUFG Union Bank N.A.	-	15,607	Denominated in US Dollars MUFG Union Bank N.A.
Deposito berjangka:			Time deposits:
Dalam mata uang Dolar AS PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	23,417	14,345	Denominated in US Dollars PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Jumlah	23,417	29,952	Total
Dikurangi:			Less:
Bagian tidak lancar:			Non-current portion:
Dalam mata uang Dolar AS PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	(23,417)	(14,345)	Denominated in US Dollars PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Bagian lancar	-	15,607	Current portion

Rekening pada MUFG Union Bank N.A. ditujukan untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhutang. Rekening ini dibuka untuk memenuhi persyaratan Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior ("SEFA") antara Perseroan dengan Mizuho Bank, Ltd dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd untuk Proyek Karebbe. Perseroan telah melakukan pelunasan atas pinjaman pada tanggal 10 April 2019 (lihat Catatan 18).

The account with MUFG Union Bank N.A. is intended for payment of loan principal and interest payable. This account was established to fulfil the requirement of the Senior Export Facility Agreement ("SEFA") between the Company and Mizuho Bank, Ltd and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd for the Karebbe Project. The Company has fully repaid the loan on April 10, 2019 (refer to Note 18).

Deposito berjangka yang ditempatkan pada PT Bank Rakyat Indonesia ditujukan sebagai jaminan atas penerbitan bank garansi oleh bank sehubungan dengan jaminan reklamasi dan penutupan tambang Perseroan (lihat Catatan 39b).

The time deposits placed with PT Bank Rakyat Indonesia are intended as collateral in relation to the bank guarantee issued by the bank in relation to the Company's reclamation and mine closure guarantees (refer to Note 39b).

Perubahan kas yang dibatasi penggunaannya untuk tujuan pembayaran pinjaman bank yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

The movement in restricted cash intended for payments of bank loan arising from financing activities is as follows:

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	15,607	15,890	Beginning balance
Arus kas:			Cash flows:
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	3,902	39,394	Placement of restricted cash
Pencairan kas yang dibatasi penggunaannya	(19,509)	(39,677)	Withdrawal of restricted cash
Total perubahan dari arus kas pendanaan	(15,607)	(283)	Total changes from financing cash flows
Saldo akhir	-	15,607	Ending balance

7. Piutang usaha

7. Trade receivables

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pihak-pihak berelasi dalam mata uang Dolar AS	133,400	124,248	Related parties denominated in US Dollars

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat piutang sebagaimana dijabarkan di atas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of receivables mentioned above.

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, tidak ada piutang usaha yang dijamin, dan piutang usaha sebesar AS\$133,4 juta (2018: AS\$124,2 juta) (nilai penuh) belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai. Jatuh tempo piutang usaha mengalami perubahan sebagai imbas dari penambahan 60 hari waktu pembayaran untuk VCL.

As at June 30, 2019 and December 31, 2018, there were no trade receivables pledged as collateral, and trade receivables of US\$133.4 million (2018: US\$124.2 million) (full amount) were not yet past due nor impaired. The due dates of those receivables were changed as a result of an additional 60 days extended term with VCL.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.

Based on a review of the status of each customer's receivable accounts at the end of the period, the Company's management believes that no provision for impairment is necessary to provide for losses from the potential non-collection of these accounts as at June 30, 2019 and December 31, 2018.

Lihat Catatan 33e untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33e for details of related party balances and transactions.

8. Aset keuangan lainnya

8. Other financial assets

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(US Dollars, in thousands)			
Pinjaman kepada karyawan	7,091	8,134	Loans to employees
Piutang bunga	378	639	Interest receivables
Tagihan kepada kontraktor	311	53	Receivables from contractors
Jumlah	7,780	8,826	Total
Dikurangi:			Less:
Bagian tidak lancar:			Non-current portion:
- Pinjaman kepada karyawan	(5,382)	(6,300)	- Loans to employees
Bagian lancar	2,398	2,526	Current portion

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang sebagaimana dijabarkan di atas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of receivables mentioned above.

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, seluruh aset keuangan lainnya belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai. Analisis umur aset keuangan lainnya adalah sebagai berikut:

As at June 30, 2019 and December 31, 2018, all other financial assets were not yet past due nor impaired. The aging analysis of these other financial assets is as follows:

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(US Dollars, in thousands)			
Sampai dengan 3 bulan	738	1,151	Up to 3 months
3 bulan sampai 1 tahun	1,660	1,375	3 months to 1 year
Lebih dari 1 tahun	5,382	6,300	More than 1 year
Jumlah	7,780	8,826	Total

Lihat Catatan 33e untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33e for details of related party balances and transactions.

9. Persediaan

9. Inventories

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(US Dollars, in thousands)			
Nikel			Nickel
Dalam proses	57,787	48,962	In process
Barang jadi	15,762	12,604	Finished
	73,549	61,566	
Bahan pembantu	74,436	70,213	Supplies
Dikurangi: Penyisihan untuk bahan pembantu usang	(611)	-	Less: Provision for obsolete supplies
	73,825	70,213	
Jumlah	147,374	131,779	Total

Mutasi penyisihan untuk bahan pembantu usang:

Movement in the provision for obsolete supplies is as follows:

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(US Dollars, in thousands)			
Saldo awal	-	-	Beginning balance
Penyisihan untuk bahan pembantu usang	611	-	Provision for obsolete supplies
Saldo akhir	611	-	Ending balance

Manajemen Perseroan yakin bahwa penyisihan untuk bahan pembantu usang telah mencukupi terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari bahan pembantu usang pada tanggal 30 Juni 2019.

The Company's management believes that the provision for obsolete supplies is adequate to cover possible losses from obsolete supplies as at June 30, 2019.

Tidak ada persediaan yang dijaminkan pada tanggal 30 Juni 2019 (31 Desember 2018: nihil).

There were no inventories pledged as collateral as at June 30, 2019 (December 31, 2018: nil).

Biaya persediaan yang dijual atau digunakan dalam operasi diakui sebagai beban dan termasuk dalam "beban pokok pendapatan" (lihat Catatan 24).

The cost of inventories sold or used in operations is recognised as an expense and included in "cost of revenue" (refer to Note 24).

9. Persediaan (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2019, semua persediaan Perseroan telah diasuransikan bersama-sama dengan aset tetap Perseroan (lihat Catatan 11). Bahan pembantu diasuransikan sebesar biaya penggantian, nikel dalam proses sebesar biaya bahan baku bijih dan tenaga kerja ditambah proporsi tertentu atas biaya tidak langsung, sedangkan untuk barang jadi nikel dalam *matte* sebesar mana yang lebih tinggi antara harga jual tunai bersih atau biaya memproduksinya kembali. Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

9. Inventories (continued)

As at June 30, 2019, all inventories were insured together with the Company's fixed assets (refer to Note 11). Supplies are insured at replacement cost, nickel in process at the cost of ore raw materials and labor expended plus a proper proportion of overhead charges, while nickel in matte finished goods are insured at the regular net cash selling price or at reproduction cost, whichever is higher. In management's opinion, the insurance is adequate to cover possible losses.

10. Biaya dibayar di muka dan uang muka

10. Prepayments and advances

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Uang muka ke pemasok	1,442	2,376	Advance to vendors
Asuransi dibayar di muka	353	2,430	Prepaid insurance
Lainnya	344	81	Others
Jumlah	2,139	4,887	Total

11. Aset tetap

11. Fixed assets

	1 Januari/ January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Transfer dan reklasifikasi/ Transfers and reclassifications	Pengurangan/ Disposals	30 Juni/ June 30, 2019	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)						
Harga perolehan					Cost	
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	932,526	-	2,850	-	935,376	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	70,596	-	1,898	(1,073)	71,421	Roads and bridges
Bangunan	647,454	-	1,503	(5,504)	643,453	Buildings
Pabrik dan mesin	1,714,912	-	26,067	(14,503)	1,726,476	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	22,153	-	755	(882)	22,026	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	51,979	6,334	1,815	(936)	59,192	Mine development
Sewa	-	778	-	-	778	Leases
Aset tetap dalam penyelesaian *)	162,655	76,836	(34,888)	-	204,603	Construction in progress *)
Jumlah	3,602,275	83,948	-	(22,898)	3,663,325	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation	
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	(392,365)	(10,838)	-	-	(403,203)	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	(39,134)	(2,114)	-	1,047	(40,201)	Roads and bridges
Bangunan	(495,930)	(6,123)	-	4,530	(497,523)	Buildings
Pabrik dan mesin	(1,192,878)	(29,923)	-	12,457	(1,210,344)	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	(21,075)	(271)	-	877	(20,469)	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	(26,383)	(13,842)	-	562	(39,663)	Mine development
Sewa	-	(222)	-	-	(222)	Leases
Jumlah	(2,167,765)	(63,333)	-	19,473	(2,211,625)	Total
Nilai buku bersih	1,434,510				1,451,700	Net book value

*) Lihat Catatan 12 untuk rincian aset tetap dalam penyelesaian.

*) Refer to Note 12 for details of construction in progress.

11. Aset tetap (lanjutan)

11. Fixed assets (continued)

	1 Januari/ January 1, 2018	Penambahan/ Additions	Transfer dan reklasifikasi/ Transfers and reclassifications	Pengurangan/ Disposals	31 Desember/ December 31, 2018	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Harga perolehan						Cost
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	932,621	-	-	(95)	932,526	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	70,642	-	-	(46)	70,596	Roads and bridges
Bangunan	642,995	-	5,604	(1,145)	647,454	Buildings
Pabrik dan mesin	1,680,110	-	56,934	(22,132)	1,714,912	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	34,309	-	388	(12,544)	22,153	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	76,991	-	2,829	(27,841)	51,979	Mine development
Aset tetap dalam penyelesaian *)	129,444	103,369	(65,755)	(4,403)	162,655	Construction in progress *)
Jumlah	3,567,112	103,369	-	(68,206)	3,602,275	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan bendungan dan fasilitas PLTA	(367,014)	(25,424)	-	73	(392,365)	Hydroelectric dam buildings and facilities
Jalan dan jembatan	(34,994)	(4,180)	-	40	(39,134)	Roads and bridges
Bangunan	(478,245)	(18,560)	-	875	(495,930)	Buildings
Pabrik dan mesin	(1,137,968)	(75,866)	-	20,956	(1,192,878)	Plant and machinery
Perabotan dan peralatan kantor	(33,222)	(397)	-	12,544	(21,075)	Furniture and office equipment
Pengembangan tambang	(21,880)	(4,503)	-	-	(26,383)	Mine development
Jumlah	(2,073,323)	(128,930)	-	34,488	(2,167,765)	Total
Nilai buku bersih	1,493,789				1,434,510	Net book value
*) Lihat Catatan 12 untuk rincian aset tetap dalam penyelesaian.						*) Refer to Note 12 for details of construction in progress.

Perseroan menyewa ruang kantor dari PT Api Meta Graha (Catatan 32). Informasi mengenai sewa di mana Perseroan adalah penyewa disajikan sebagai berikut:

The Company leases an office space from PT Api Metra Graha (Note 32). Information about the lease under which the Company is a lessee is presented below:

	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Penyusutan/ Depreciation	Pengurangan/ Disposals	30 Juni/ June 30, 2019	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Bangunan	778	-	(222)	-	556	Buildings

Liabilitas sewa yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Lease liabilities recognised in the statements of financial position are as follows:

	30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)				
Liabilitas sewa		611	-	Lease liabilities
Dikurangi: Bagian jangka panjang		(251)	-	Less: Non-current portion
Bagian jangka pendek		360	-	Current portion

Beban bunga yang diakui pada laba rugi dan pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan selama periode yang berakhir 30 Juni 2019 masing-masing adalah AS\$13 ribu dan AS\$180 ribu (nilai penuh).

Interest expense recognised in profit or loss and payments made by the Company during the period ended June 30, 2019 were US\$13 thousand and US\$180 thousand (full amount), respectively.

Seluruh biaya penyusutan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 dibebankan ke biaya produksi.

All depreciation expenses for the periods ended June 30, 2019 and 2018 were allocated to production costs.

Pada tanggal 30 Juni 2019, semua aset tetap Perseroan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh semua risiko industri dan, tapi tidak terbatas pada gempa bumi, kebakaran, kerusakan mekanikal atau elektrikal termasuk gangguan usaha lainnya. Jumlah pertanggungan untuk keseluruhan aset Perseroan dan eksposur atas risiko gangguan usaha terkait per 30 Juni 2019 adalah AS\$4.338 juta (31 Desember 2018: AS\$6.263 juta) (nilai penuh), dengan batasan sebesar AS\$800 juta per kejadian (31 Desember 2018: AS\$800 juta) (nilai penuh). Seluruh aset tetap diasuransikan sebesar biaya penggantian. Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

As at June 30, 2019, all of the Company's fixed assets were insured against the risk of direct physical loss or damage caused by all industrial risks, including but not limited to earthquake, fire and electrical or mechanical breakdown and including related business interruption. The total insured value for the Company's total assets and related business interruption exposure as at June 30, 2019 was US\$4,338 million (December 31, 2018: US\$6,263 million) (full amount), with policy limits of US\$800 million per occurrence (December 31, 2018: US\$800 million) (full amount). The fixed assets are insured at replacement cost. In management's opinion, the insurance is appropriate and adequate to cover possible losses arising from such risks.

Tidak ada aset tetap yang dijaminkan pada tanggal 30 Juni 2019 (31 Desember 2018: nihil).

There were no fixed assets pledged as collateral as at June 30, 2019 (December 31, 2018: nil).

11. Aset tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar AS\$760,4 juta (31 Desember 2018: AS\$392,4 juta) (nilai penuh). Nilai buku bersih aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah nihil.

Perseroan telah melakukan pengkajian atas masa manfaat dan nilai sisa aset tetap pada tanggal 30 Juni 2019 dan berdasarkan pengkajian tersebut, Perseroan tidak mengidentifikasi adanya perubahan atas masa manfaat aset tetap yang ada.

Pada periode yang berakhir 30 Juni 2019 terdapat penyesuaian atas kenaikan jumlah kewajiban penghentian pengoperasian aset yang dikapitalisasi dalam aset pengembangan tambang sebesar AS\$6,3 juta (31 Desember 2018: turun sebesar AS\$27,8 juta) (nilai penuh). Nilai tercatat aset tetap yang dilepas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah AS\$3,4 juta (31 Desember 2018: AS\$5,9 juta) (nilai penuh).

12. Aset tetap dalam penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari proyek yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan.

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari:

30 Juni	2019	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu penyelesaian/ Estimated completion date		June 30
(US Dollars, in thousands)					
Pelapisan kanal Larona	66,566	88	2019	Larona canal lining	
Pengembangan tambang	27,500	98 - 99	2019	Mine development	
Lainnya di bawah AS\$7 juta	110,537	-	-	Others below US\$7 million	
Jumlah	204,603			Total	
31 Desember	2018	% penyelesaian/ % of completion	Perkiraan waktu Penyelesaian/ Estimated completion date		December 31
(US Dollars, in thousands)					
Pelapisan kanal Larona	41,507	55	2019	Larona canal lining	
Pengembangan tambang	25,530	90 - 96	2019	Mine development	
Lainnya di bawah AS\$7 juta	95,618	-	-	Others below US\$7 million	
Jumlah	162,655			Total	

13. Utang usaha

13. Trade payables

30 Juni/June 30	2019	2018		31 Desember/December 31
(US Dollars, in thousands)				
Pihak-pihak berelasi			Related parties	
Dalam mata uang Dolar AS	1,522	1,620	Denominated in US Dollars	
	1,522	1,620		
Pihak ketiga			Third parties	
Dalam mata uang Rupiah Indonesia	42,239	48,809	Denominated in Indonesian Rupiah	
Dalam mata uang Dolar AS	26,489	26,435	Denominated in US Dollars	
Dalam mata uang Euro	195	12,017	Denominated in Euro	
Dalam mata uang lainnya (di bawah AS\$1 juta)	2,240	2,300	Denominated in other currencies (below US\$1 million)	
	71,163	89,561		
Jumlah	72,685	91,181	Total	

Utang usaha timbul dari pembelian barang dan jasa. Jumlah yang disebutkan di atas adalah jangka pendek sesuai dengan ketentuan pembayaran seperti yang tertuang dalam perjanjian yang bersangkutan.

The trade payables arose from the purchase of goods and services. The amounts are current within the payment terms as set out in the relevant agreement.

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perseroan atas utang usahanya pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.

There were no guarantees made by the Company for its payables as at June 30, 2019 and December 31, 2018.

Lihat Catatan 33f untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33f for details of related party balances and transactions.

14. Perpajakan

14. Taxation

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Pajak penghasilan badan ("PPH Badan")			Corporate income tax ("CIT")
- PPh Badan 2019	45,985	-	- CIT 2019
- PPh Badan 2018	6,988	-	- CIT 2018
- PPh Badan 2017	6,895	9,250	- CIT 2017
	59,868	9,250	
Pajak lainnya			Other taxes
- Pajak dalam sengketa *)	108,479	107,652	- Taxes in dispute *)
- Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	62,701	49,459	- Value Added Tax ("VAT")
- Pajak impor	732	718	- Import tax
	171,912	157,829	
Jumlah	231,780	167,079	Total
Dikurangi: Bagian lancar	(62,536)	(50,798)	Less: Current portion
Bagian tidak lancar	169,244	116,281	Non-current portion
*) Lihat Catatan 14e untuk rincian pajak dalam proses banding.		*) Refer to Note 14e for details of taxes in dispute.	

b. Utang pajak

b. Taxes payable

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
PPh Badan	-	1,119	CIT
Pajak lainnya			Other taxes
- PPh pasal 21	808	1,251	- Withholding Tax ("WHT") article 21
- PPh pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26	269	365	- WHT articles 4(2), 15, 22, 23 and 26
- PPN terhutang	140	165	- VAT payable
	1,217	1,781	
Jumlah	1,217	2,900	Total

c. (Manfaat)/beban pajak penghasilan

c. Income tax (benefit)/expense

(Manfaat)/beban pajak penghasilan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The income tax (benefit)/expense for the periods ended June 30, 2019 and 2018 were as follows:

30 Juni	2019	2018 (tidak diaudit/ unaudited)	June 30
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Kini	-	15,988	Current
Tanggungan	(8,178)	(5,649)	Deferred
Penyesuaian periode sebelumnya	(844)	637	Previous period adjustment
Jumlah	(9,022)	10,976	Total

14. Perpajakan (lanjutan)

c. (Manfaat)/beban pajak penghasilan (lanjutan)

Perhitungan pajak penghasilan kini untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 adalah berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak yang dapat direvisi pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan. Basis yang digunakan dalam estimasi ini sama dengan yang digunakan dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak tahunan yang disampaikan ke kantor pajak.

Rekonsiliasi antara (rugi)/laba sebelum pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan taksiran (rugi)/penghasilan kena pajak untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

30 Juni	2019	2018 (tidak diaudit/ unaudited)	June 30
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	(35,200)	40,364	(Loss)/profit before income tax
Koreksi fiskal:			Fiscal corrections:
Perbedaan antara penyusutan dan amortisasi komersial dan fiskal	17,723	23,220	Difference between commercial and tax depreciation and amortisation
Liabilitas imbalan pascakerja	2,293	220	Post-employment benefit liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	1,155	(1,376)	Provision for asset retirement
Provisi untuk bahan pembantu usang	611	-	Provision for obsolete supplies
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(512)	8,921	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	(8,644)	(8,389)	Other accruals/provisions
Pendapatan kena pajak final	(277)	(377)	Income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	2,762	1,368	Non-deductible expenses
(Rugi)/penghasilan kena pajak	(20,089)	63,951	Taxable (loss)/income
Pajak penghasilan – kini, pada tarif 25%	-	15,988	Income tax – current, at 25%
Pembayaran pajak di muka	(45,985)	(4,551)	Prepayment of income taxes
(Lebih)/kurang bayar pajak	(45,985)	11,437	(Over)/under payment of tax

Rekonsiliasi antara (manfaat)/beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan teoritis dari (rugi)/laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Current income tax calculations for the six-month periods ended June 30, 2019 and 2018 are based on estimated taxable income and may be revised when filing annual tax returns. The basis used for the estimates is the same as that used in the preparation of the annual tax return to be filed with the tax authority.

The reconciliation between (loss)/profit before income tax as shown in these financial statements and the estimated taxable (loss)/income for the periods ended June 30, 2019 and 2018 were as follows:

The reconciliation of income tax (benefit)/expense to the theoretical tax amount on the Company's (loss)/profit before income tax for the periods ended June 30, 2019 and 2018 is as follows:

30 Juni	2019	2018 (tidak diaudit/ unaudited)	June 30
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	(35,200)	40,364	(Loss)/profit before income tax
Pajak penghasilan dihitung pada tarif 25%	(8,800)	10,091	Income tax calculated at 25%
Beban yang tidak dapat dikurangkan	691	342	Non-deductible expenses
Pendapatan kena pajak final	(69)	(94)	Income subject to final tax
Penyesuaian periode sebelumnya	(844)	637	Previous period adjustment
(Manfaat)/beban pajak penghasilan	(9,022)	10,976	Income tax (benefit)/expense

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

d. Liabilitas pajak tangguhan

d. Deferred tax liabilities

Perubahan liabilitas pajak tangguhan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Changes in the deferred tax liabilities for the periods ended June 30, 2019 and December 31, 2018 are shown below:

	1 Januari/ January 1, 2019	(Dikreditkan)/ Dibebankan ke laba rugi/ (Credited)/ Charged to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	30 Juni/ June 30, 2019	
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)			
Penyusutan dan amortisasi	119,226	(9,392)	-	109,834	Depreciation and amortisation
Liabilitas imbalan pascakerja	(3,999)	(294)	250	(4,043)	Post-employment benefit liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	(16,953)	5,438	-	(11,515)	Provision for asset retirement
Provisi untuk bahan pembantu usang	-	(153)	-	(153)	Provision for obsolete supplies
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(325)	128	-	(197)	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	(7,275)	1,117	-	(6,158)	Other accruals/provisions
Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan	-	(5,022)	-	(5,022)	Tax loss carried forward
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	90,674	(8,178)	250	82,746	Deferred tax liabilities, net

	1 Januari/ January 1, 2018	(Dikreditkan)/ Dibebankan ke laba rugi/ (Credited)/ Charged to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2018	
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)			
Penyusutan dan amortisasi	128,962	(9,736)	-	119,226	Depreciation and amortisation
Liabilitas imbalan pascakerja	(5,216)	(66)	1,283	(3,999)	Post-employment benefit liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	(15,508)	(1,445)	-	(16,953)	Provision for asset retirement
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	(165)	(160)	-	(325)	Share-based payment liabilities
Akrual/provisi lain-lain	(2,681)	(4,594)	-	(7,275)	Other accruals/provisions
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	105,392	(16,001)	1,283	90,674	Deferred tax liabilities, net

14. Perpajakan (lanjutan)

14. Taxation (continued)

e. Surat ketetapan pajak

e. Tax assessment letters

Nomor Surat Ketetapan Pajak/ Jenis Pajak/ Tax Assessment Letter/ Tax Type	Tahun Pajak/ Fiscal year	Nilai awal sengketa pajak/ Original tax in-dispute amount	Diterima oleh Perseroan atau kalah pada banding terakhir/ Accepted by the Company or lost on final appeal	Restitusi/ Refund	Selisih nilai tukar mata uang asing dan penyesuaian lainnya/ Exchange rate and other adjustments	Saldo akhir dan status terakhir per 30 Juni 2019/ Ending balance and latest status as of June 30, 2019	Catatan/ Notes
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)					
00003/204/04/091/11 PPh Pasal 26/WHT Article 26	2004	9,439	(1,159)	(7,124)	(415)	741	a)
00003/206/04/091/11 PPh Badan/CIT	2004	4,629	(1,112)	-	-	3,517	a)
00006/206/06/091/11 PPh Badan/CIT	2006	6,406	(466)	-	-	5,940	a)
00009/207/06/091/11 PPN/VAT	2006	4,069	(2,563)	(506)	(1,000)	-	b)
00014/406/08/091/10 PPh Badan/CIT	2008	1,931	-	-	-	1,931	a)
00006/206/10/091/14 PPh Badan/CIT	2010	19,410	-	(10,910)	-	8,500	a)
00007/406/11/091/13 PPh Badan/CIT	2011	4,911	-	(838)	-	2,758	a)
00026/406/12/091/14 PPh Badan/CIT	2012	647	-	-	-	647	a)
00056/207/13/091/17 sampai dengan/To 00067/207/13/091/17 PPN/VAT	2013	8,688	-	-	(214)	8,474	e)
00007/206/14/091/17 PPh Badan/CIT	2014	38,040	-	-	-	38,040	f)
00002/245/14/091/17 sampai dengan/To 00013/245/14/091/17 PPh Pasal 26/WHT Art.26	2014	11,405	-	-	(304)	11,101	f)
00024/405/15/091/17 PPh Badan/CIT	2015	3,820	-	-	-	3,820	d)
00001/203/15/803/17 PPh Pasal 23/ WHT Article 23	2015	811	-	(1)	(38)	772	d)
00039/406/16/091/18 PPh Badan/CIT	2016	7,942	-	-	-	7,942	g)
00023/406/17/091/19 PPh Badan/CIT	2017	2,355	-	-	-	2,355	g)
10148/84/DBN.PL/2018 PNBP/ Non-Tax State Revenue	2014-2016	1,036	-	-	-	1,036	h)
Surat ketetapan pajak lainnya*/ Other tax assessment letters*		10,330	(31)	(415)	(294)	9,590	
Total pajak dalam proses banding/ Total taxes in-dispute		135,869	(5,331)	(19,794)	(2,265)	108,479	

* Dengan nilai saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 kurang dari AS\$0,5 juta per ketetapan/

* With ending balances as of June 30, 2019 less than US\$0.5 million per assessment.

14. Perpajakan (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Nilai ketetapan yang disetujui oleh Perseroan dicatat sebagai beban lainnya pada laba rugi. Jumlah akumulasi yang dicatat sebagai beban sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 adalah AS\$5,3 juta (nilai penuh).

- a) Sengketa ini terkait dengan pembayaran jasa *Management Assistance Agreement* ("MAA") kepada VCL dimana Direktorat Jenderal Pajak menilai sebagai deviden oleh sehingga tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan kena pajak dan dipotong PPh Pasal 26. Khusus untuk tahun pajak 2010, sengketa juga melibatkan pembayaran *Technical Assistance Agreement* ("TAA") kepada VCL. Perseroan tidak setuju dengan ketetapan ini.

Sengketa yang belum terselesaikan dengan jumlah total AS\$22,1 juta (nilai penuh) sedang dilakukan banding melalui jalur *Mutual Agreement Procedure* ("MAP") antara otoritas pajak Kanada dengan Indonesia sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B").

Khusus untuk tahun pajak 2004, Perseroan juga meyakini bahwa surat ketetapan pajak yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2011, telah melewati batas waktu lima tahun sesuai P3B tersebut. Untuk sengketa tahun pajak 2008 senilai AS\$1,9 juta (nilai penuh), Perseroan telah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

- b) Sengketa PPN ini terkait dengan koreksi atas pembayaran jasa luar negeri yang dapat dikreditkan. Pada tanggal 17 Juni 2019, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung melalui situsnya telah memutuskan menolak Peninjauan Kembali Perseroan.

- c) Sengketa terkait biaya-biaya pinjaman SEFA sebesar AS\$1,3 juta (nilai penuh) yang dianggap tidak seharusnya dibebankan kepada Perseroan, sehingga tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Perseroan meyakini bahwa biaya-biaya dalam rangka perolehan pinjaman untuk kepentingan usaha utama dalam hal ini pengolahan nikel dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebagaimana telah diatur secara jelas dalam peraturan perpajakan dan juga KK.

- d) Sengketa terkait koreksi atas biaya-biaya penelitian dan pengembangan, biaya-biaya Akademi Teknik Sorowako, biaya-biaya Jasa Manajemen dan Teknis, biaya-biaya royalti, biaya-biaya jaminan hutang, biaya konsultan, biaya pengiriman, biaya konsinyasi stok, biaya kontribusi lainnya, dan biaya donasi dengan jumlah koreksi sebesar AS\$4,6 juta (nilai penuh). Perseroan telah mengajukan keberatan atas koreksi-koreksi tersebut. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak keberatan dan Perseroan telah mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.

- e) Sengketa terkait koreksi utamanya atas penyebaran slag pada jalan tambang dan jasa luar negeri dengan jumlah koreksi sebesar AS\$17,6 juta (nilai penuh). Perseroan menyetujui sebagian dan telah membayar IDR2,5 miliar atau setara dengan AS\$0,2 juta (nilai penuh) dimana telah dicatat sebagai beban dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Di 2018, Perseroan telah membayarkan 50% dari sisa saldo tersebut tersebut dan telah mengajukan keberatan atas koreksi-koreksi tersebut. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak keberatan dan Perseroan telah mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.

- f) Sengketa terkait koreksi atas peredaran usaha, biaya-biaya pengembangan proyek, jaminan hutang, royalti dan biaya-biaya yang dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak.

Koreksi atas peredaran usaha juga dianggap sebagai deviden sehingga dijadikan obyek koreksi untuk PPh Pasal 26. Koreksi lainnya adalah PPh Pasal 26 atas pembayaran deviden yang dipertimbangkan salah menggunakan tarif pajak. Jumlah koreksi-koreksi tersebut adalah sebesar AS\$62,4 juta (nilai penuh).

Perseroan menyetujui sebagian dan telah membayar AS\$40,0 ribu (nilai penuh) serta telah dicatat sebagai beban dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Di 2018, Perseroan telah membayar sebagian yaitu sejumlah AS\$49,4 juta (nilai penuh), dan Perseroan tidak melakukan pembayaran atas koreksi sebesar AS\$12,9 juta (nilai penuh) koreksi PPh Pasal 26 atas pembayaran deviden kepada Pemegang Saham Pendiri yang dianggap kurang potong karena dianggap salah menggunakan tarif pajak dan Perseroan telah mengajukan keberatan. Keberatan tersebut ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak dan Perseroan telah mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.

14. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

Assessment amounts agreed by the Company were recorded as other expenses in profit or loss. Accumulated amounts recorded as expenses up to June 30, 2019 was US\$5.3 million (full amount).

- a) The tax dispute is related to the Management Assistance Agreement ("MAA") fees paid to VCL which the Director General of Tax has assessed to be dividends and therefore not deductible for taxable income and subject to WHT Article 26. Specifically for the 2010 fiscal year case, the tax assessment also includes the payment of Technical Assistance Agreement ("TAA") fees to VCL. The Company did not agree with these assessments.

The outstanding disputes in the amount of US\$22.1 million (full amount) are currently in the appeal process through the Mutual Agreement Procedure ("MAP") in accordance with the Double Tax Avoidance Agreement ("DTAA") between the Indonesian and Canadian Tax Authorities.

Specifically for the fiscal year 2004, the Company also believes that the tax assessment letter which was issued on February 22, 2011, has exceeded the five year time limit in accordance with the DTAA. For the disputed amount of US\$1.9 million (full amount) for the fiscal year 2008, the Company has submitted a reconsideration letter to the Supreme Court.

- b) This dispute relates to claimable VAT on payment of offshore service fees. On June, 17 2019, the Supreme Court, based on the decision on its website, has rejected the Company's reconsideration.

- c) The tax dispute is on expenses related to SEFA in the amount of US\$1.3 million (full amount) which was considered non-deductible for the taxable income calculation.

The Company believes that the expenses related to securing loans which were used to fund main business of processing nickel, should be treated as deductible in the taxable income calculation, in accordance with prevailing regulations and the CoW.

- d) The tax dispute is for expenses related to cost of project development, Technical Academy of Sorowako, Management and Technical Services, royalty, guarantee fee, consultancy, freight charges, consignment stock, other contributions, and donations in the total correction amount of US\$4.6 million (full amount). The Company filed an objection to these disputed amounts. The Director General of Tax has rejected the objection and the Company has filed an appeal letter to the Tax Court.

- e) The tax dispute is related mostly with the slag usage on the mining road and offshore services with total disputed amount of US\$17.6 million (full amount). The Company partially agreed and has paid IDR2.5 billion or equivalent to US\$0.2 million (full amount) which has been recorded as an expense in profit or loss for the year ended December 31, 2017.

In 2018, the Company paid 50% of the remaining balance and has filed an objection. The Director General of Tax has rejected the objection and the Company has filed an appeal to the Tax Court.

- f) The tax disputes are related to adjustment on revenue, project development costs, guarantee fee, royalty, other expenses which are considered by the Director General of Tax to be non-deductible expenses.

The adjustment to revenue is also to deem it as a dividend subject to Withholding Tax ("WHT") article 26. The other WHT article 26 adjustment is related to under-withheld WHT article 26 on dividend payment which was considered to have used the incorrect WHT rate. The total adjustments amount to US\$62.4 million (full amount).

The Company partially agreed and paid US\$40.0 thousand (full amount) which has been recorded as an expense in profit or loss for the year ended December 31, 2017.

In 2018, the Company partially paid the amount of US\$49.4 million (full amount) with the exception of a disputed amount of US\$12.9 million (full amount) on WHT article 26 adjustment in relation to under-withheld dividend payment to the Founding Shareholders, and the Company has filed objection letters on these disputes. The objections were rejected by the Director General of Tax and the Company has filed an appeal to the Tax Court.

14. Perpajakan (lanjutan)

e. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

- g) Sengketa ini terkait dengan pembayaran jasa *Management Service Agreement* ("MSA") dan *Technical Service Agreement* ("TSA") kepada VCL dan Vale Technology Development Ltd ("VTDL") yang dianggap sebagai deviden sehingga tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Sengketa ini juga terkait dengan biaya-biaya penelitian dan pengembangan, biaya jaminan hutang dan biaya-biaya lain yang dianggap tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Jumlah koreksi-koreksi tersebut adalah AS\$10,3 juta (nilai penuh). Untuk tahun pajak 2016, Perseroan telah mengajukan keberatan atas koreksi-koreksi tersebut, sementara itu untuk tahun pajak 2017, Perseroan sedang dalam proses mengajukan keberatan.
- h) Sengketa terkait dugaan kurang bayar royalti kepada Pemerintah Republik Indonesia atas penjualan nikel *matte* untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 karena ketidaktepatan dalam mengenakan tarif.

Jumlah koreksi-koreksi tersebut AS\$1,0 juta (nilai penuh). Perseroan tidak setuju atas koreksi-koreksi ini dan telah mengajukan keberatan. Perseroan telah menerima Surat Keputusan Keberatan yang menolak keberatan Perseroan, dan akan mengajukan gugatan atas keputusan tersebut.

14. Taxation (continued)

e. Tax assessment letters (continued)

- g) The tax dispute is related to the payment of Management Service Agreement ("MSA") and Technical Service Agreement ("TSA") fees to VCL and Vale Technology Development Ltd ("VTDL") which were deemed to be dividends, and therefore non-deductible against taxable income. The disputes were also related to cost of project development, guarantee fees and other expenses which are deemed to be non-deductible expenses. The total adjustment is US\$10.3 million (full amount). For the fiscal year 2016, the Company has filed an objection letter on this dispute, while for the fiscal year 2017, the Company is still in the process of submitting an objection.
- h) The dispute is related to an alleged underpayment of royalty to the Government of the Republic of Indonesia on nickel *matte* sales for the years 2014 to 2016 due to incorrect rate used.

The total adjustment is US\$1.0 million (full amount). The Company is not in agreement with the adjustment and has filed an objection on this dispute. The Company has received the Objection Decision Letter that rejected the Objection, and the Company will file a law suit on the decision.

15. Akruai

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Barang dan jasa	13,318	9,748	Goods and services
Royalti, retribusi air, sewa tanah, dan lain-lain	4,725	13,156	Royalties, water levy, land rent and others
Barang modal	722	1,987	Capital items
Biaya keuangan	-	708	Finance costs
Jumlah	18,765	25,599	Total

Lihat Catatan 33f untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33f for details of related party balances and transactions.

Perubahan akrual atas biaya keuangan yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

The movement in accruals of finance costs arising from financing activities is as follows:

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	708	1,141	Beginning balance
Arus kas:			Cash flows:
Pembayaran atas bunga	(849)	(2,177)	Payments of interest
Pembayaran atas biaya jaminan garansi	(315)	(1,035)	Payments of guarantee fee
	(1,164)	(3,212)	
Perubahan non kas:			Non cash changes:
Akrual biaya bunga	333	1,939	Accrued interest expense
Akrual biaya jaminan dan agen	123	840	Accrued guarantee and agency fee
	456	2,779	
Saldo akhir	-	708	Ending balance

16. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Utang dividen	557	642	Dividends payable
Utang non-operasional lainnya	1,795	634	Other non-operational payables
Jumlah	2,352	1,276	Total

16. Other current financial liabilities

17. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

17. Short-term employee benefit liabilities

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Gaji, upah, dan manfaat karyawan lainnya	9,931	15,823	Salaries, wages and other employee benefits

18. Pinjaman bank jangka Panjang

18. Long-term bank borrowings

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd	-	25,000	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd
Mizuho Bank, Ltd	-	12,500	Mizuho Bank, Ltd
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	-	(981)	Unamortised debt issuance costs
	-	36,519	
Bagian jangka pendek:			Current portion:
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd	-	(25,000)	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd
Mizuho Bank, Ltd	-	(12,500)	Mizuho Bank, Ltd
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	-	981	Unamortised debt issuance costs
Total bagian jangka pendek	-	(36,519)	Total current portion
Bagian jangka panjang	-	-	Non-current portion

Perubahan pinjaman bank yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

The movement in bank borrowings arising from financing activities is as follows:

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	36,519	73,038	Beginning balance
Perubahan arus kas:			Cash flows changes:
Pembayaran pinjaman bank	(37,500)	(37,500)	Repayment of bank borrowings
Perubahan non kas:			Non cash changes:
Amortisasi biaya pinjaman	981	981	Amortisation of debt issuance costs
Saldo akhir	-	36,519	Ending balance

Biaya keuangan yang terkait dengan pinjaman bank jangka panjang ini dibebankan pada laba rugi selama periode yang berakhir 30 Juni 2019 sebesar AS\$1,5 juta (30 Juni 2018: AS\$2,3 juta - tidak diaudit) (nilai penuh).

Finance costs related to the long-term bank borrowings that were charged to profit or loss during the period ended June 30, 2019 amounted to US\$1.5 million (June 30, 2018: US\$2.3 million - unaudited) (full amount).

Pada tanggal 30 November 2009, Perseroan ("Peminjam") menandatangani Perjanjian Fasilitas Ekspor Senior ("SEFA") dengan Mizuho Bank, Ltd (sebelumnya bernama Mizuho Corporate Bank, Ltd) sebagai *Facility Agent*, MUFG Union Bank, N.A. (sebelumnya bernama Union Bank, N.A.) sebagai *Collateral Agent* dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd dan Mizuho Bank, Ltd sebagai *Mandated Lead Arrangers* ("Pemberi Pinjaman"), dengan Vale S.A. (entitas pengendali utama Perseroan) bertindak sebagai penjamin ("Penjamin").

On November 30, 2009, the Company (the "Borrower") entered into the Senior Export Facility Agreement ("SEFA") with Mizuho Bank, Ltd (formerly known as Mizuho Corporate Bank, Ltd) as Facility Agent, MUFG Union Bank, N.A. (formerly known as Union Bank, N.A.) as Collateral Agent and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd and Mizuho Bank, Ltd, as Mandated Lead Arrangers (the "Lenders"), with Vale S.A. (the Company's ultimate parent entity) acting as the guarantor (the "Guarantor").

Peminjam telah melakukan penarikan atas keseluruhan SEFA sebesar AS\$300 juta (nilai penuh) (terdiri dari pinjaman dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd sebesar AS\$200 juta dan Mizuho Bank, Ltd sebesar AS\$100 juta) (nilai penuh). Fasilitas kredit ini digunakan untuk membiayai konstruksi, pembangunan dan pengoperasian Proyek Karebbe. Perseroan telah melakukan pelunasan atas pinjaman pada tanggal 10 April 2019.

The Borrower has fully drawn down the SEFA of US\$300 million (full amount) (consisting of loans from the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd of US\$200 million and from Mizuho Bank, Ltd of US\$100 million) (full amount). The credit facilities were utilised solely to finance the construction, development and operation of the Karebbe Project. The Company has fully repaid the loan on April 10, 2019.

19. Liabilitas imbalan pascakerja

19. Post-employment benefit liabilities

Program dana pensiun untuk karyawan Perseroan adalah program *defined contribution* dan dikelola oleh suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") yang ditunjuk oleh Perseroan.

The pension plan fund for the Company's employees is a defined contribution plan that is managed by a pension fund financial institution ("DPLK") appointed by the Company.

Sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia, Perseroan diharuskan memberikan imbalan pascakerja tertentu kepada karyawannya saat diberhentikan atau saat mereka pensiun. Manfaat ini terutama didasarkan pada masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penghentian atau masa pensiun.

In accordance with Indonesian labor regulations, the Company is required to provide certain post-employment benefits to its employees when their employment is terminated or when they retire. These benefits are primarily based on years of service and the employees' compensation at termination or retirement.

19. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

Liabilitas atas imbalan kerja pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 dihitung oleh PT Towers Watson Purbajaga, aktuaris yang berkualifikasi pada laporannya tertanggal 17 Juli 2019 (31 Desember 2018: 16 Januari 2019).

Liabilitas pada laporan posisi keuangan terdiri dari:

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Imbalan kesehatan pascakerja	8,355	8,209	Post-retirement medical benefits
Imbalan pensiun dan imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan	7,816	6,669	Pension and Labor Law benefits
Jumlah	16,171	14,878	Total

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

30 Juni/June 30	Imbalan pensiun/ Pension benefits		Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits		31 Desember/December 31
	2019	2018	2019	2018	
Asumsi ekonomi:					Economic assumptions:
Tingkat diskonto (IDR)	7.75%	8.25%	8.25%	8.50%	Discount rate (IDR)
Kenaikan gaji di masa depan (IDR)	5.00%	8.00%	N/A	N/A	Future salary increases (IDR)
Tingkat kenaikan klaim di masa depan (IDR)	N/A	N/A	12.00%	12.00%	Future claim increase rate (IDR)
Asumsi lainnya:	2019		2018		Other assumptions:
Tingkat mortalita	TMI 2011		TMI 2011		Rates of mortality
Tingkat cacat	10% dari tingkat mortalita/ 10% of mortality rate		10% dari tingkat mortalita/ 10% of mortality rate		Disability rate
Usia pensiun normal	55 tahun/years		55 tahun/years		Normal retirement age

Tingkat diskonto digunakan dalam menentukan nilai kini kewajiban imbalan kerja pada tanggal penilaian. Secara umum, tingkat diskonto, biasanya ditentukan sesuai dengan dengan ketersediaan obligasi pemerintah yang ada di pasar modal aktif pada tanggal pelaporan.

Asumsi tingkat kenaikan upah di masa depan memproyeksikan kewajiban imbalan kerja mulai dari tanggal penilaian sampai dengan usia pensiun normal. Tingkat kenaikan gaji pada umumnya ditentukan berdasarkan penyesuaian inflasi terhadap tingkat upah dan kenaikan masa kerja.

Asumsi tentang bagaimana klaim akan meningkat di masa depan dikenal sebagai tingkat kenaikan klaim. Tren biaya klaim di masa mendatang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemanfaatan, inflasi umum, perkembangan medis, dan ketersediaan pelayanan medis. Pada umumnya, biaya klaim meningkat lebih cepat dari pada tingkat inflasi dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 30 Juni 2019, durasi rata-rata tertimbang atas kewajiban iuran pasti untuk imbalan pensiun adalah 10,36 tahun (31 Desember 2018: 10,69 tahun) dan imbalan kesehatan pascakerja adalah 12,97 tahun (31 Desember 2018: 15,17 tahun).

19. Post-employment benefit liabilities (continued)

The employee benefit liabilities as at June 30, 2019 and December 31, 2018 were calculated by PT Towers Watson Purbajaga, a qualified actuary with its reports dated July 17, 2019 (December 31, 2018: January, 16, 2019).

The liability in the statements of financial position consists of:

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Imbalan kesehatan pascakerja	8,355	8,209	Post-retirement medical benefits
Imbalan pensiun dan imbalan berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan	7,816	6,669	Pension and Labor Law benefits
Jumlah	16,171	14,878	Total

The principal actuarial assumptions used were as follows:

30 Juni/June 30	Imbalan pensiun/ Pension benefits		Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits		31 Desember/December 31
	2019	2018	2019	2018	
Asumsi ekonomi:					Economic assumptions:
Tingkat diskonto (IDR)	7.75%	8.25%	8.25%	8.50%	Discount rate (IDR)
Kenaikan gaji di masa depan (IDR)	5.00%	8.00%	N/A	N/A	Future salary increases (IDR)
Tingkat kenaikan klaim di masa depan (IDR)	N/A	N/A	12.00%	12.00%	Future claim increase rate (IDR)
Asumsi lainnya:	2019		2018		Other assumptions:
Tingkat mortalita	TMI 2011		TMI 2011		Rates of mortality
Tingkat cacat	10% dari tingkat mortalita/ 10% of mortality rate		10% dari tingkat mortalita/ 10% of mortality rate		Disability rate
Usia pensiun normal	55 tahun/years		55 tahun/years		Normal retirement age

The discount rate is used in determining the present value of the benefit obligation at valuation date. In general, the discount rate is usually determined in line with the availability of government bonds in the active capital market at the reporting date.

The future salary increase assumption projects the benefit obligation starting from the valuation date up to the normal retirement age. The rate of salary increase is generally determined based on inflation adjustments to pay scales and increases in length of service.

The actuarial assumptions also factor in how future claims will increase which is influenced by several factors such as utilisation, general inflation, medical developments, and availability of medical services. Generally, the claim costs have risen faster than price inflation in recent years.

As of June 30, 2019, the weighted average duration of the defined contribution obligation for pension benefits was 10.36 years (December 31, 2018: 10.69 years) and post-retirement medical benefits was 12.97 years (December 31, 2018: 15.17 years).

19. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

19. Post-employment benefit liabilities (continued)

Mutasi kewajiban imbalan pascakerja selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in post-employment benefits obligation over the period is as follows:

30 Juni/June 30	Imbalan pensiun/ <i>Pension benefits</i>		Imbalan kesehatan pascakerja/ <i>Post-retirement medical benefits</i>		Jumlah/ <i>Total</i>		31 Desember/December 31
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)
Pada awal periode	6,669	8,969	8,209	10,320	14,878	19,289	At beginning of the period
Diakui di laba rugi							Recognised in profit or loss
- Biaya jasa kini	1,851	694	2	6	1,853	700	- Current service cost
- Biaya bunga	257	567	345	689	602	1,256	- Interest cost
Diakui di penghasilan komprehensif lain							Recognised in other comprehensive income
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari:							Actuarial losses/(gains) arising from:
- Asumsi keuangan	(743)	(1,031)	244	(1,796)	(499)	(2,827)	- Financial assumptions
- Penyesuaian pengalaman	(38)	(1,637)	(463)	(667)	(501)	(2,304)	- Experience adjustments
Lain-lain							Others
- Pembayaran manfaat	(371)	(557)	(71)	(139)	(442)	(696)	- Benefits paid
- Pengaruh perbedaan dalam pelaporan mata uang	191	(336)	89	(204)	280	(540)	- Effect of difference in reporting currency
Liabilitas imbalan pascakerja, akhir periode	7,816	6,669	8,355	8,209	16,171	14,878	Post-employment benefit liabilities, end of period

Jumlah kumulatif kerugian/(keuntungan) aktuarial yang diakui pada pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Total cumulative actuarial loss/(gain) recognised in other comprehensive income is as follows:

30 Juni	Imbalan pensiun/ <i>Pension benefits</i>		Imbalan kesehatan pascakerja/ <i>Post-retirement medical benefits</i>		Jumlah/ <i>Total</i>		December 31
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)
Pada awal periode	(1,674)	994	2,931	5,394	1,257	6,388	At beginning of the period
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan							Other comprehensive income for the period
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari:							Actuarial losses/(gains) arising from:
- Asumsi keuangan	(743)	(1,031)	244	(1,796)	(499)	(2,827)	- Financial assumptions
- Penyesuaian pengalaman	(38)	(1,637)	(463)	(667)	(501)	(2,304)	- Experience adjustments
Jumlah kumulatif kerugian/(keuntungan) aktuarial yang diakui pada pendapatan komprehensif lain	(2,455)	(1,674)	2,712	2,931	257	1,257	Total cumulative actuarial loss/(gain) recognised in other comprehensive income

Iuran ke DPLK selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

Contributions to DPLK over the period are as follows:

30 Juni	2019	2018 (tidak diaudit/ <i>unaudited</i>)	June 30
(Dalam ribuan Dolar AS)			
Oleh Perseroan	1,323	1,330	By the Company
Oleh karyawan	277	278	By employees
Jumlah	1,600	1,608	Total

19. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan kesehatan pascakerja yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

19. Post-employment benefit liabilities (continued)

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits and post-retirement medical benefits, is as follows:

30 Juni 2019	Imbalan pension/ Pension benefits	Imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits	Jumlah/ Total		June 30, 2019
Kurang dari 1 tahun	116	170	286		Less than 1 year
1 sampai dengan 10 tahun	10,125	3,441	13,566		1 year – 10 years
Lebih dari 10 tahun	34,412	4,670	39,082		More than 10 years
Jumlah	44,653	8,281	52,934	Total	

Penyesuaian pengalaman dalam periode lima tahun adalah sebagai berikut:

The five years history of experience adjustments is as follows:

	30 Juni/ June 30 2019	2018	2017	2016	2015	
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(16,171)	(14,878)	(19,289)	(17,729)	(14,383)	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	-	-	-	-	-	Fair value of plan assets
Status pendanaan	(16,171)	(14,878)	(19,289)	(17,729)	(14,383)	Funded status
Penyesuaian pengalaman pada aset program	-	-	-	-	-	Experience adjustments on plan assets
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	(501)	(2,304)	(882)	447	4,628	Experience adjustments on plan liabilities

Jika asumsi yang digunakan berbeda dari estimasi manajemen, nilai tercatat kewajiban pensiun diestimasi sebagai berikut:

If the assumptions differed from management's estimates, the carrying amount of pension obligations would be as follows:

30 Juni 2019	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kewajiban imbalan pensiun/ Pension benefits obligation	Kewajiban imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits obligation	June 30, 2019
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Tingkat diskonto	+1%	(637)	(1,334)	Discount rate
	-1%	719	567	
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	+0.5%	261	-	Future salary increase rate
	-0.5%	(244)	-	
Tingkat kenaikan klaim di masa depan	+1%	-	520	Future claim increase rate
	-1%	-	(1,314)	

31 Desember 2018	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kewajiban imbalan pensiun/ Pension benefits obligation	Kewajiban imbalan kesehatan pascakerja/ Post-retirement medical benefits obligation	December 31, 2018
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Tingkat diskonto	+1%	(543)	(895)	Discount rate
	-1%	620	1,084	
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	+0.5%	246	-	Future salary increase rate
	-0.5%	(231)	-	
Tingkat kenaikan klaim di masa depan	+1%	-	1,037	Future claim increase rate
	-1%	-	(877)	

20. Modal saham

Pemegang saham Perseroan dan jumlah kepemilikan saham dengan nilai nominal IDR25 (nilai penuh) per saham pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	Jumlah saham/ Total shares	Ribuan AS\$/ US\$ in thousands	%	
VCL	5,835,607,960	80,115	58.73	VCL
Publik	2,036,346,880	27,957	20.49	Public
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd	1,996,281,680	27,406	20.09	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd
Vale Japan Limited	54,083,720	743	0.55	Vale Japan Limited
Sumitomo Corporation	14,018,480	192	0.14	Sumitomo Corporation
Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh	9,936,338,720	136,413	100	Total shares issued and fully paid

Tidak ada pemegang saham publik yang memiliki lebih dari 5% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.

The Company's shareholders and number of shares with the related par value IDR25 (full amount) per share as at June 30, 2019 and December 31, 2018 were as follows:

No public shareholder owned more than 5% of the total issued and fully paid shares at June 30, 2019 and December 31, 2018.

21. Deklarasi dividen

Perseroan tidak mendeklarasikan dividen untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018.

21. Dividends declared

The Company did not declare dividends for the period ended June 30, 2019 and for the year ended December 31, 2018.

22. Tambahan modal disetor

Perseroan mempunyai saldo Tambahan Modal Disetor senilai AS\$277,8 juta (31 Desember 2018: AS\$277,8 juta) (nilai penuh) merupakan sisa atas surplus yang terjadi akibat penerbitan saham di atas nilai nominal dan penurunan nilai nominal saham yang terjadi di tahun 1983.

22. Additional paid-in capital

The Company has an Additional Paid-in Capital balance of US\$277.8 million (December 31, 2018: US\$277.8 million) (full amount) representing the remaining surplus arising from the issuance of shares in excess of par value and a reduction in the par value of its shares in 1983.

23. Cadangan modal

Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, Perseroan wajib membentuk cadangan umum sebesar minimum 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Jumlah modal ditempatkan dan disetor dari Perseroan adalah sebesar IDR248,4 miliar atau setara dengan AS\$136,4 juta (nilai penuh); sehingga, cadangan umum minimum yang disyaratkan bagi Perseroan adalah sebesar AS\$27,3 juta (nilai penuh).

23. Capital reserves

In accordance with Indonesian Limited Company Law No. 40/2007, the Company shall set up a general reserve at a minimum amount of 20% of the issued and paid up capital of the Company. The Company's issued and paid up capital is IDR248.4 billion or equivalent to US\$136.4 million (full amount); therefore, the minimum required general reserve for the Company is US\$27.3 million (full amount).

Jumlah cadangan umum minimum Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 telah terpenuhi.

The Company's minimum general reserve as of June 30, 2019 and December 31, 2018 has been fulfilled.

24. Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

24. Cost of revenue

Cost of revenue for the periods ended June 30, 2019 and 2018 were as follows:

30 Juni	2019	2018 (tidak diaudit/ unaudited)	June 30
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Bahan bakar minyak dan pelumas	72,839	71,031	Fuels and lubricants
Bahan pembantu	63,332	64,470	Supplies
Depresiasi	56,070	58,166	Depreciation
Jasa kontraktor	44,920	38,752	Contractors' services
Biaya karyawan	41,484	48,612	Employee costs
Bahan bakar batubara	24,637	27,852	Coal
Pajak dan asuransi	13,350	13,369	Taxes and insurance
Royalti	5,926	7,509	Royalties
Lainnya	4,443	2,371	Others
	327,001	332,132	
Persediaan dalam proses			In process inventory
Persediaan awal	48,962	38,089	Beginning balance
Persediaan akhir	(57,787)	(43,782)	Ending balance
Beban pokok produksi	318,176	326,439	Cost of production
Barang jadi			Finished goods
Persediaan awal	12,604	10,371	Beginning balance
Persediaan akhir	(15,762)	(15,737)	Ending balance
Beban pokok pendapatan	315,018	321,073	Cost of revenue

Lihat Catatan 33d untuk rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33d for details of related party transactions.

24. Beban pokok pendapatan (lanjutan)

Rincian pemasok dengan transaksi pembelian yang melebihi 10% dari jumlah beban pokok pendapatan:

24. Cost of revenue (continued)

Details of suppliers having transactions representing more than 10% of total cost of revenue:

30 Juni	2019	2018 (tidak diaudit/ unaudited)	June 30
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pihak ketiga			Third parties
Mercuria Energy Trading Pte. Ltd	22,466*	44,082	Mercuria Energy Trading Pte. Ltd

*) Pembelian dari Mercuria Energy Trading Pte. Ltd selama periode yang berakhir 30 Juni 2019 adalah sebesar 7,13% dari beban pokok pendapatan.

*) Purchases from Mercuria Energy Trading Pte. Ltd during the period ended June 30, 2019 were 7.13% from total cost of revenue.

25. Beban usaha

Rincian beban usaha untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

25. Operating expenses

The components of operating expenses for the periods ended June 30, 2019 and 2018 were as follows:

30 Juni	2019	2018 (tidak diaudit/ unaudited)	June 30
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Biaya karyawan	3,586	1,036	Employee costs
Beban jasa manajemen, lisensi dan royalti	2,698	3,357	Management service, license and royalty fees
Biaya jasa profesional	703	512	Professional fees
Lainnya	656	823	Others
Jumlah	7,643	5,728	Total

Lihat Catatan 33c untuk rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33c for details of related party transactions.

26. Pendapatan lainnya

Rincian pendapatan lainnya untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

26. Other income

The components of other income for the periods ended June 30, 2019 and 2018 were as follows:

30 Juni	2019	2018 (tidak diaudit/ unaudited)	June 30
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Bunga dari piutang perpanjangan waktu pembayaran piutang	762	1,519	Interest on extended payment terms of trade receivables
Laba selisih kurs, neto	531	-	Gain on currency translation adjustments, net
Lainnya	2,132	803	Others
Jumlah	3,425	2,322	Total

Lihat Catatan 33a untuk rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 33a for details of related party transactions.

27. Beban lainnya

Rincian beban lainnya untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

27. Other expenses

The components of other expenses for the periods ended June 30, 2019 and 2018 were as follows:

30 Juni	2019	2018 (tidak diaudit/ unaudited)	June 30
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Rugi pelepasan asset tetap	3,425	12	Loss on disposal of fixed assets
Beban pajak	2,126	-	Tax expenses
Biaya pengembangan proyek	1,554	3,533	Project development costs
Biaya karyawan	545	1,299	Employment costs
Rugi selisih kurs, neto	-	727	Loss on currency translation adjustments, net
Lainnya	769	2,382	Others
Jumlah	8,419	7,953	Total

28. Provisi atas penghentian pengoperasian aset

Pergerakan di saldo provisi atas penghentian pengoperasian aset adalah sebagai berikut:

30 Juni	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	37,833	74,916	Beginning balance
Penyisihan/(pembalikan) periode berjalan	6,334	(33,472)	Provisions/(reversal) made during the period
Beban akresi	1,155	2,615	Accretion expense
Dampak perubahan selisih kurs	739	(6,226)	Effect of exchange rate
Saldo akhir	46,061	37,833	Ending balance

Beban akresi diakui sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Perseroan mengakui provisi atas biaya penghentian pengoperasian aset sebesar IDR651,2 miliar atau setara dengan AS\$46,1 juta (nilai penuh) pada tanggal 30 Juni 2019 (31 Desember 2018: IDR544,9 miliar atau setara dengan AS\$37,8 juta (nilai penuh)). Biaya ini diperkirakan akan terjadi antara tahun 2041 dan 2056. Provisi tersebut diestimasi berdasarkan biaya penutupan menggunakan teknologi dan material yang tersedia sekarang, pada tingkat harga kini, dan didiskontokan menggunakan tingkat diskonto bebas risiko di Indonesia sebesar 5,11% (31 Desember 2018: 5,73%).

Pada tahun 2018, Perseroan mengubah estimasi masa penutupan tambang dari antara tahun 2036 dan 2051 menjadi antara tahun 2041 dan 2056. Hal ini dikarenakan Perseroan berkeyakinan bahwa probabilitas untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah untuk melanjutkan operasinya sebanyak dua kali sepuluh tahun (lihat Catatan 1) meningkat. Hal ini terutama dikaitkan dengan perkembangan proses divestasi Perseroan (lihat Catatan 39d). Walaupun demikian, hasil aktual mungkin berbeda dari estimasi Perseroan.

Perseroan dibantu oleh PT ERM Indonesia, konsultan lingkungan yang berkualifikasi, dalam menghitung biaya penutupan operasi Perseroan di Sulawesi sehubungan dengan Rencana Penutupan Tambang. Perhitungan biaya penutupan tambang meliputi asumsi umur aset berdasarkan ketentuan KK (lihat Catatan 1) disesuaikan dengan perpanjangan yang diasumsikan sebagaimana di atas, untuk penyelesaian operasi penambangan yang diikuti dengan penutupan pabrik pengolahan Perseroan setelah penipisan sisa tumpukan bijih.

29. Pengeluaran untuk lingkungan hidup lainnya

Pada tahun 1993, Perseroan memperoleh persetujuan Pemerintah atas Studi Evaluasi Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Selama periode yang berakhir 30 Juni 2019, sejumlah inisiatif, yang merupakan sebagian dari komitmen Perseroan di dalam rencana-rencana tersebut, telah diselesaikan, sementara yang lainnya masih sedang berlangsung termasuk penghijauan daerah purna tambang untuk menyeimbangkannya dengan tingkat pembukaan wilayah tambang yang baru.

Pengeluaran untuk lingkungan hidup yang dibebankan pada laba rugi adalah sebesar AS\$1,97 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 (30 Juni 2018: AS\$1,0 juta - tidak diaudit) (nilai penuh). Pengeluaran barang modal yang berhubungan dengan proyek lingkungan hidup berjumlah AS\$32,6 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 (30 Juni 2018: AS\$2,6 juta-tidak diaudit) (nilai penuh).

30. Biaya karyawan

Jumlah biaya karyawan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar AS\$45,6 juta (30 Juni 2018: AS\$50,9 juta - tidak diaudit) (nilai penuh).

28. Provision for asset retirement

Movement in the provision for the asset retirement balance is as follows:

30 Juni	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Saldo awal	37,833	74,916	Beginning balance
Penyisihan/(pembalikan) periode berjalan	6,334	(33,472)	Provisions/(reversal) made during the period
Beban akresi	1,155	2,615	Accretion expense
Dampak perubahan selisih kurs	739	(6,226)	Effect of exchange rate
Saldo akhir	46,061	37,833	Ending balance

Accretion expense is recognised as part of finance costs in profit or loss.

The Company recognises a provision for asset retirement cost of IDR651.2 billion or equivalent to US\$46.1 million (full amount) as at June 30, 2019 (December 31, 2018: IDR544.9 billion or equivalent to US\$37.8 million (full amount)). This cost is expected to be incurred between 2041 and 2056. The provision is estimated based on closure costs using existing technology and materials that are currently available, at the current price level, and discounted using the Indonesian risk-free rate of 5.11% (December 31, 2018: 5.73%).

In 2018, the Company changed the estimated period of its mine closure from between 2036 and 2045 to between 2041 and 2056. This is because the Company believes that the probability of obtaining the Government's approval to continue its operations for two additional ten year periods (see Note 1) is increasing. This is especially associated with the development of the Company's divestment process (see Note 39d). Nevertheless, actual results may differ from the Company's estimate.

The Company is assisted by PT ERM Indonesia, a qualified environmental consultant, in calculating the closure costs of the Company's operations in Sulawesi in conjunction with the Mine Closure Plan. The closure cost calculation includes the assumption of asset life in accordance with the term of the CoW (refer to Note 1) adjusted for assumed extensions as referred to above, for completion of mining operations closely followed by shutdown of the Company's processing plant after depletion of residual ore stockpiles.

29. Other environmental expenditures

In 1993, the Company received approval from the Government for its Environmental Evaluation Study, Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan.

During the period ended June 30, 2019, a number of initiatives, representing part of the Company's commitments under these plans, were completed while others were still in progress including the revegetation of mined-out areas to match the stripping rates of new mining areas.

Environmental expenditures charged to profit or loss were US\$1.97 million for the period ended June 30, 2019 (June 30, 2018: US\$1.0 million - unaudited) (full amount). Capital expenditures for environmental projects were US\$32.6 million for the period ended June 30, 2019 (June 30, 2018: US\$2.6 million - unaudited) (full amount).

30. Employee costs

Total employee costs for the period ended June 30, 2019 amounted to US\$45.6 million (June 30, 2018: US\$50.9 million - unaudited) (full amount).

31. (Rugi)/laba per saham

(Rugi)/laba per saham dasar dihitung dengan membagi jumlah (rugi)/laba yang diperuntukkan kepada pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan.

31. (Loss)/earnings per share

Basic (loss)/earnings per share is calculated by dividing total (loss)/profit attributable to the shareholders by the weighted average number of common shares outstanding during the period.

30 Juni	2019	2018 (tidak diaudit/ unaudited)	June 30
(Dalam ribuan Dolar AS, kecuali nilai laba per saham)		(US Dollars, in thousands, except earning per share)	
Jumlah (rugi)/laba periode berjalan yang tersedia bagi pemegang saham	(26,178)	29,388	Total (loss)/profit for the period attributable to the shareholders
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar (dalam ribuan)	9,936,339	9,936,339	Weighted average number of ordinary shares outstanding (in thousands)
(Rugi)/laba per saham dasar (dalam AS\$)	(0.003)	0.003	Basic (loss)/earnings per share (in US\$)

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

As at June 30, 2019 and 2018 there were no existing instruments which could result in the issue of further ordinary shares. Therefore, diluted earnings per share are equivalent to basic earnings per share.

32. Ikatan dan perjanjian-perjanjian penting yang signifikan

Perseroan memiliki beberapa perjanjian penting seperti disebutkan di bawah ini:

32. Significant commitments and agreements

The Company has entered into various significant agreements as mentioned below:

<u>Pihak dalam perjanjian/ Counterparties</u>	<u>Jenis perjanjian/ Agreement type</u>	<u>Periode perjanjian/ Agreement period</u>
Mercuria Energy Trading (Pte) Ltd	Pembelian Minyak Berkadar Sulfur Tinggi/ <i>Purchase of High Sulphur Fuel Oil (HSFO)</i>	1 April 2018 - 30 Juni 2019/ <i>April 1, 2018 - June 30, 2019</i>
PT Pertamina Patra Niaga	Pembelian Solar Berkecepatan Tinggi/ <i>Purchase of High Speed Diesel (HSD)</i>	1 Maret 2018 - 28 Agustus 2019/ <i>March 1, 2018 - August 28, 2019</i>
PT Marunda Graha Mineral	Pembelian batubara/ <i>Purchase of coal</i>	31 Januari 2019 - 31 Januari 2020/ <i>January 31, 2019 - January 31, 2020</i>
PT Trubaindo Coal Mining	Pembelian batubara/ <i>Purchase of coal</i>	31 Januari 2019 - 31 Januari 2020/ <i>January 31, 2019 - January 31, 2020</i>
PT Trakindo Utama	Pembelian suku cadang/ <i>Purchase of spare parts</i>	1 Januari 2016 - 31 Desember 2020/ <i>January 1, 2016 - December 31, 2020</i>
PT Cipta Krida Bahari	Jasa freight forwarding global/ <i>Global freight forwarding</i>	1 Mei 2015 - 30 April 2020/ <i>May 1, 2015 - April 30, 2020</i>

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 Perseroan memiliki komitmen pembelian barang dan jasa yang terkait dengan biaya operasi dan biaya modal dengan pemasok pihak ketiga sebagai berikut:

As at June 30, 2019 and December 31, 2018, the Company had purchase commitments for goods and services related to operating expenses and capital expenses with third party suppliers, as follows:

30 Juni	2019	2018	December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Tidak lebih dari 1 tahun	166,539	162,789	No later than 1 year
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	179,648	102,328	Later than 1 year and no later than 5 years
Lebih dari 5 tahun	146	115	Later than 5 years
Jumlah	346,333	265,232	Total

Pengeluaran modal yang telah diperjanjikan pada akhir periode pelaporan namun belum diakui sebagai liabilitas adalah senilai AS\$34,5 juta (nilai penuh).

Capital expenditure contracted for at the end of the reporting period but not yet recognised as liabilities is amounted to US\$34.5 million (full amount).

Pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan memiliki sewa berikut yang diakui sebagai aset hak-guna dan liabilitas terkait:

As at June 30, 2019, the Company has the following lease recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability:

<u>Pihak dalam perjanjian/ Counterparties</u>	<u>Jenis perjanjian/ Agreement type</u>	<u>Periode perjanjian/ Agreement period</u>
PT Api Metra Graha	Sewa Gedung Kantor Jakarta/ <i>Rental Building for Jakarta Office</i>	2 November 2015 - 31 Maret 2021/ <i>November 2, 2015 - March 31, 2021</i>

33. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi

Perseroan berada di bawah pengendalian VCL. Perusahaan pengendali utama Perseroan adalah Vale S.A.. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan dan pendapatan lainnya

Pendapatan

Seluruh penjualan Perseroan dilakukan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS, dimana harga ditentukan dengan formula yang didasarkan atas harga tunai nikel di LME dan harga realisasi rata-rata nikel VCL. Semua penjualan Perseroan merupakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 terdiri dari:

30 Juni	2019	2018 (tidak diaudit/ unaudited)	June 30
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
Penjualan kepada VCL	233,758	299,744	Sales to VCL
Penjualan kepada Sumitomo Metal Mining Co., Ltd ("SMM")	58,492	74,867	Sales to Sumitomo Metal Mining Co., Ltd ("SMM")
Jumlah	292,250	374,611	Total
(Persentase penjualan kepada pihak-pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan)	100%	100%	(Sales to related parties as a percentage of total revenue)

Pendapatan lainnya

Pendapatan lainnya dari pihak berelasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 terdiri dari:

30 Juni	2019	2018 (tidak diaudit/ unaudited)	June 30
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)	
VCL	762	1,519	VCL
(Sebagai persentase terhadap jumlah pendapatan lainnya)	22.24%	65.41%	(As a percentage of total other income)

33. Related party information

The Company is controlled by VCL. The ultimate parent company is Vale S.A.. Transactions with related parties are as follows:

a. Revenue and other income

Revenue

The Company's sales are made based on long-term, "must take", US Dollar-denominated sales contracts, with prices determined by a formula that is based on the LME cash price for nickel and VCL's average net realised price for nickel. All of the Company's sales represent transactions with related parties.

Revenue for the periods ended June 30, 2019 and 2018 consisted of:

Other income

Other income from related parties for the periods ended June 30, 2019 and 2018 consisted of:

b. Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi adalah personil manajemen kunci Perseroan.

Kompensasi yang dibayar atau terutang kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

b. Compensation of the Boards of Commissioners and Directors

The Boards of Commissioners and Directors are the key management personnel of the Company.

The compensation paid or payable to the Boards of Commissioners and Directors is shown below:

	Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019/ For the period ended June 30, 2019			
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Direksi/ Board of Directors	
(Dalam ribuan Dolar AS) / (US Dollars, in thousands)	% *)	Jumlah/Amount	% *)	Jumlah/Amount
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek/ Salaries and short-term employee benefits	0.20%	91.0	4.71%	2,149.9
Imbalan pascakerja/Post-employment benefits	-	-	0.20%	91.5
Jumlah/Total	0.20%	91.0	4.91%	2,241.4

*) % terhadap jumlah biaya karyawan/% of total employee costs

	Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018/ For the period ended June 30, 2018 (tidak diaudit/unaudited)			
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners		Direksi/ Board of Directors	
(Dalam ribuan Dolar AS) / (US Dollars, in thousands)	% *)	Jumlah/Amount	% *)	Jumlah/Amount
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek/ Salaries and short-term employee benefits	0.24%	119.5	3.76%	1,912.8
Imbalan pascakerja/Post-employment benefits	-	-	0.15%	79.2
Jumlah/Total	0.24%	119.5	3.91%	1,992.0

*) % terhadap jumlah biaya karyawan/% of total employee costs

33. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

33. Related party information (continued)

c. Beban jasa manajemen, lisensi dan royalti

c. Management service, license and royalty fees

Beban untuk jasa manajemen, lisensi dan royalti disajikan sebagai beban usaha (lihat Catatan 25) dalam laba rugi. Berdasarkan pembaharuan perjanjian, beban jasa manajemen dihitung dari biaya aktual ditambah biaya jasa 10%, sementara beban lisensi dan royalti dihitung dari 0,8% dari nilai pendapatan kotor.

Management service, license and royalty fees are presented as operating expenses (refer to Note 25) in profit or loss. Based on the amendment, the management service fee is calculated at actual cost plus a service fee of 10%, while the license and royalty fee is calculated at 0.8% of gross sales proceeds.

30 Juni	2019	2018 (tidak diaudit/ unaudited)	June 30
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
VCL	2,698	3,357	VCL
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban usaha)		35.30%	58.61% (As a percentage of total operating expenses)

d. Beban lainnya

d. Other costs

Di beban pokok pendapatan

In cost of revenue

30 Juni	2019	2018 (tidak diaudit/ unaudited)	June 30
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Jasa professional dan tagihan atau beban yang dibayarkan atas nama Perseroan: VCL	2,585	3,699	Professional services and expense reimbursement paid on behalf of the Company: VCL
(Sebagai persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan)		0.82%	1.15% (As a percentage of total cost of revenue)

Di biaya keuangan

In finance costs

30 Juni	2019	2018 (tidak diaudit/ unaudited)	June 30
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Biaya jaminan: Vale S.A.	153	587	Guarantee fee: Vale S.A.
(Sebagai persentase terhadap jumlah biaya keuangan)		5.74%	16.06% (As a percentage of total finance costs)

Berkaitan dengan SEFA (lihat Catatan 18), Perseroan dan Vale S.A., entitas pengendali utama dari Perseroan, melakukan perjanjian jaminan dimana Vale S.A. setuju untuk menjamin AS\$300 juta (nilai penuh) fasilitas utang yang diterima Perseroan. Biaya jaminan sebesar 1,5% per tahun dari setiap jumlah pinjaman yang diambil oleh Perseroan dari SEFA akan terhutang kepada Vale S.A. Selanjutnya, biaya sebesar 1,5% per tahun dari jumlah pinjaman yang belum dilunasi harus dibayar sepanjang umur pinjaman. Biaya tersebut akan terhutang oleh Perseroan pada setiap tanggal pembayaran bunga (tanggal pembayaran jaminan pertama adalah hari kerja terakhir pada Februari 2010, dan selanjutnya pada hari kerja terakhir pada Agustus dan Februari). Perseroan telah melakukan pelunasan atas pinjaman pada tanggal 10 April 2019.

In connection with the SEFA (refer to Note 18), the Company and Vale S.A., the ultimate parent entity of the Company, entered into a loan guarantee agreement whereby Vale S.A. has agreed to guarantee a US\$300 million (full amount) debt facility obtained by the Company. A guarantee fee of 1.5% per annum on each loan drawdown made by the Company under the SEFA is payable to Vale S.A. Subsequently, the fee of 1.5% per annum on the outstanding loan amount is to be paid over the life of the loan. The fee is payable by the Company on each interest payment date (the first guarantee payment date was the last business day in February 2010, and thereafter the last business day of each August and February). The Company has fully repaid the loan on April 10, 2019.

33. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

33. Related party information (continued)

e. Aset

e. Assets

i) Piutang usaha

i) Trade receivables

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
VCL	119,921	110,750	VCL
SMM	13,479	13,498	SMM
Jumlah	133,400	124,248	Total
(Sebagai persentase terhadap piutang usaha)	100%	100%	(As a percentage of trade receivables)

Pada 30 Juni 2017, Perseroan menerima permintaan dari VCL untuk melanjutkan perpanjangan jangka waktu pembayaran ini untuk periode yang berlaku efektif 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018. Sebagai kompensasi atas perpanjangan jangka waktu pembayaran, VCL akan membayar bunga dengan tingkat bunga sebesar dua bulan LIBOR ditambah 125 basis poin yang dibagi dengan setiap jumlah hari tambahan di atas jangka waktu sebelumnya.

On June 30, 2017, the Company received a request from VCL to continue the extension of the payment term for the period effective on July 1, 2017 until June 30, 2018. As compensation for the extended payment term, VCL will pay interest at an annual rate of two months LIBOR plus 125 basis points prorated for the number of days of the effective extended payment term beyond the original term.

Pada 3 April 2018, VCL meminta untuk kembali memperpanjang masa berlaku persetujuan perpanjangan jangka waktu pembayaran untuk periode yang berlaku efektif 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019 dan mengajukan perubahan pada skema kompensasi. VCL akan membayar bunga dengan tingkat bunga sebesar dua bulan LIBOR ditambah 85 basis poin per tahun untuk setiap hari tambahan di atas jangka waktu sebelumnya.

On April 3, 2018, VCL further asked for extension of the payment term for the period effective on July 1, 2018 until June 30, 2019 and requested changes on the compensation scheme. VCL will pay interest at two months LIBOR plus 85 basis points per annum for the number of days of the effective extended payment term beyond the original term.

Untuk menjamin perlakuan yang sama di antara para pembeli produk nikel Perseroan, Perseroan telah menawarkan perpanjangan jangka waktu pembayaran yang sama kepada SMM. Perseroan telah menerima konfirmasi tertulis bahwa SMM tidak akan mengubah jangka waktu pembayaran saat ini yang berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan tidak memiliki keberatan terhadap transaksi dengan VCL.

To ensure equal treatment between the purchasers of the Company's nickel products, the Company has offered the same extended payment term to SMM. The Company has obtained written confirmation that SMM wishes to maintain the original term under its sales agreement and it has no objection to the VCL proposed transaction.

ii) Aset keuangan lancar lainnya

ii) Other current financial assets

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pinjaman kepada personil manajemen kunci di atas IDR1 miliar*)	115	-	Loans to key management personnel above IDR1 billion*)
Pinjaman kepada personil manajemen kunci di bawah IDR1 miliar	41	61	Loans to key management personnel below IDR1 billion
Pinjaman kepada personil manajemen kunci*)	156	61	Loans to key management personnel*)
Piutang bunga (Catatan 33e.i)	378	639	Interest receivables (Note 33e.i)
Jumlah	534	700	Total
Dikurangi: Bagian tidak lancar	(87)	(18)	Less: Non-current portion
Bagian lancar	447	682	Current portion
(Sebagai persentase terhadap aset keuangan lancar lainnya)	18.64%	27.00%	(As a percentage of other current financial assets)

*) Personil manajemen kunci yang mempunyai saldo pinjaman lebih dari IDR1 miliar (nilai penuh) per 30 Juni 2019 adalah Agus Superiadi.

*) Key management personnel with a loan balance of more than IDR1 billion (full amount) as at June 30, 2019 is Agus Superiadi.

Piutang bunga dan bagian lancar dari pinjaman kepada personil manajemen kunci akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sehingga disajikan sebagai aset lancar.

Interest receivables and current portion of loans to key management personnel will be settled within one year; therefore, they are presented as current assets.

iii) Piutang pihak berelasi non-usaha

iii) Non-trade receivables from related parties

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pinjaman kepada personil manajemen kunci - tidak lancar	87	18	Loans to key management personnel - non-current
(Sebagai persentase terhadap piutang pihak berelasi non-usaha)	100%	100%	(As a percentage of non-trade receivables from related parties)
Jumlah aset (piutang usaha (i), aset keuangan lancar lainnya (ii), dan piutang pihak berelasi non-usaha (iii)) yang terkait dengan pihak-pihak berelasi	133,934	124,948	Total assets (trade receivables (i), other current financial assets (ii), and non-trade receivables from related parties (iii)) associated with related parties
(Sebagai persentase terhadap jumlah aset)	6.35%	5.67%	(As a percentage of total assets)

33. Informasi mengenai pihak-pihak berelasi (lanjutan)

33. Related party information (continued)

f. Liabilitas

f. Liabilities

i) Utang usaha

i) Trade payables

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
VCL	1,522	1,620	VCL
(Sebagai persentase terhadap jumlah utang usaha)	2.09%	1.78%	(As a percentage of total trade payables)

ii) Akruai

ii) Accruals

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
VCL	583	1,229	VCL
Vale S.A.	-	192	Vale S.A.
Jumlah	583	1,421	Total
(Sebagai persentase terhadap jumlah akrual)	3.11%	5.55%	(As a percentage of total accruals)
Jumlah liabilitas (utang usaha (i) dan akrual (ii)) yang terkait dengan pihak-pihak berelasi	2,105	3,041	Total liabilities (trade payables (i) and accruals (ii)) associated with related parties
(Sebagai persentase terhadap jumlah liabilitas)	0.84%	0.95%	(As a percentage of total liabilities)

g. Pihak-pihak berelasi

g. Related parties

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi/ Nature of relationship with the related parties	Transaksi/ Transactions
Vale S.A.	Entitas pengendali utama/ Ultimate parent entity	Penjamin dari pinjaman Perseroan dengan kompensasi biaya jaminan (lihat Catatan 33d)/ Guarantor of loans of the Company in return for guarantee fee (refer to Note 33d)
VCL	Perusahaan induk/Parent entity	Penjualan barang jadi; Jasa profesional; Jasa manajemen, lisensi dan royalti (lihat Catatan 33a, 33c, dan 33d)/ Sale of finished goods; Professional services; Management service, license and royalty fees (refer to Notes 33a, 33c, and 33d)
SMM	Pemegang saham/Shareholder	Penjualan barang jadi (lihat Catatan 33a)/ Sale of finished goods (refer to Note 33a)
Manajemen kunci/Key management	Personil manajemen kunci dari Perseroan (yaitu Dewan Komisaris dan Direksi)/ Key management personnel of the Company (i.e. Board of Commissioners and Board of Directors)	Kompensasi dan remunerasi; pinjaman rumah dan pinjaman pribadi (lihat Catatan 33b dan 33e)/ Compensation and remuneration; housing and personal loans (refer to Notes 33b and 33e)

34. Biaya keuangan

34. Finance costs

Rincian biaya keuangan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The components of finance costs for the periods ended June 30, 2019 and 2018 were as follows:

30 Juni	2019	2018 (tidak diaudit/ unaudited)	June 30
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Beban akresi (Catatan 28)	1,155	1,377	Accretion expense (Note 28)
Biaya agen dan amortisasi biaya pinjaman (Catatan 18)	981	490	Agency fee and amortisation of debt issuance costs (Note 18)
Biaya bunga (Catatan 18)	376	1,202	Interest expense (Note 18)
Biaya jaminan (Catatan 18, 33d)	153	587	Guarantee fee (Notes 18, 33d)
Jumlah	2,665	3,656	Total

35. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS

35. Monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollars

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Rupiah pada 30 Juni 2019 telah dikonversikan ke dalam mata uang Dolar AS dengan menggunakan kurs AS\$1 (nilai penuh) = IDR14.139 (31 Desember 2018: IDR14.402).

As at June 30, 2019 monetary assets and liabilities denominated in Rupiah have been translated into US Dollars using an exchange rate of US\$1 (full amount) = IDR14,139 (December 31, 2018: IDR14,402).

30 Juni	2019			June 30
	Mata Uang Asing (Jutaan)/ Foreign Currencies (Millions)	Setara AS\$ (Ribuan)/ US\$ Equivalent (Thousands)	Setara AS\$ (Ribuan)/ US\$ Equivalent (Thousands)	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	IDR	98,943	6,998	Cash and cash equivalents
Aset keuangan lancar lainnya	IDR	24,164	1,709	Other current financial assets
Pajak dibayar di muka	IDR	1,375,488	97,285	Prepaid taxes
Piutang pihak-pihak berelasi non-usaha	IDR	1,230	87	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	IDR	76,095	5,382	Other non-current financial assets
Jumlah aset moneter dalam mata uang asing			111,461	Total monetary assets in foreign currencies
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	IDR	(597,207)	(42,239)	Third parties
	Others	(6)	(2,435)	
Akrual	IDR	(126,528)	(8,949)	Accruals
Utang pajak	IDR	(17,207)	(1,217)	Taxes payable
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	IDR	(140,412)	(9,931)	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	IDR	(33,254)	(2,352)	Other current financial liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	IDR	(651,245)	(46,061)	Provision for asset retirement
Liabilitas imbalan pascakerja	IDR	(228,638)	(16,171)	Post-employment benefit liabilities
Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing			(129,355)	Total monetary liabilities in foreign currencies
Liabilitas moneter bersih dalam mata uang asing			(17,894)	Net monetary liabilities in foreign currencies
31 Desember	2018			December 31
	Mata Uang Asing (Jutaan)/ Foreign Currencies (Millions)	Setara AS\$ (Ribuan)/ US\$ Equivalent (Thousands)	Setara AS\$ (Ribuan)/ US\$ Equivalent (Thousands)	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	IDR	152,172	10,566	Cash and cash equivalents
Aset keuangan lancar lainnya	IDR	26,413	1,834	Other current financial assets
Pajak dibayar di muka	IDR	1,186,494	82,384	Prepaid taxes
Piutang pihak-pihak berelasi non-usaha	IDR	259	18	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	IDR	90,733	6,300	Other non-current financial assets
Jumlah aset moneter dalam mata uang asing			101,102	Total monetary assets in foreign currencies
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	IDR	(702,958)	(48,809)	Third parties
	EUR	(10)	(12,017)	
	Others	(4)	(2,300)	
Akrual	IDR	(240,283)	(16,684)	Accruals
Utang pajak	IDR	(25,650)	(1,781)	Taxes payable
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	IDR	(227,883)	(15,823)	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	IDR	(18,377)	(1,276)	Other current financial liabilities
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	IDR	(544,880)	(37,833)	Provision for asset retirement
Liabilitas imbalan pascakerja	IDR	(214,276)	(14,878)	Post-employment benefit liabilities
Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing			(151,401)	Total monetary liabilities in foreign currencies
Liabilitas moneter bersih dalam mata uang asing			(50,299)	Net monetary liabilities in foreign currencies

35. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS
(lanjutan)

Perseroan tidak melakukan lindung nilai atas risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah karena seluruh penjualan dan sebagian besar biaya Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami.

Pada tanggal 30 Juni 2019, jika Dolar AS melemah/menguat sebesar 3% terhadap Rupiah dengan variabel lain konstan, rugi sebelum pajak untuk periode berjalan akan lebih tinggi/rendah sebesar AS\$0,5 juta (nilai penuh).

36. Informasi segmen

Perseroan beroperasi hanya dalam satu segmen usaha dan geografis, yaitu penambangan dan pengolahan nikel di Indonesia. Seluruh produk Perseroan dijual berdasarkan kontrak penjualan jangka panjang (lihat Catatan 33a).

Seluruh penjualan Perseroan merupakan penjualan nikel kepada pihak-pihak berelasi yang berdomisili di Kanada (VCL) dan Jepang (SMM) (lihat Catatan 33a).

37. Aset dan liabilitas keuangan

Informasi di bawah ini berkaitan dengan aset dan liabilitas keuangan berdasarkan kategori akun:

30 Juni 2019	Aset keuangan diukur pada biaya perolehan/ <i>Financial assets measured at</i>	Nilai wajar diakui pada laba rugi <i>Fair value through</i>	Nilai wajar diakui pada pendapatan komprehensif lainnya/ <i>Fair value through other comprehensive</i>	June 30, 2019
	<i>Total amortised cost</i>	<i>profit or loss</i>	<i>income</i>	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)				
Aset keuangan:				Financial assets:
Kas dan setara kas	111,949	111,949	-	- Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	23,417	23,417	-	- Restricted cash
Piutang usaha	133,400	133,400	-	- Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	2,398	2,398	-	- Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	87	87	-	- Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	5,382	5,382	-	- Other non-current financial assets
Jumlah aset keuangan	276,633	276,633	-	Total financial assets

31 Desember 2018	Aset keuangan diukur pada biaya perolehan/ <i>Financial assets measured at</i>	Nilai wajar diakui pada laba rugi <i>Fair value through</i>	Nilai wajar diakui pada pendapatan komprehensif lainnya/ <i>Fair value through other comprehensive</i>	December 31, 2018
	<i>Total amortised cost</i>	<i>profit or loss</i>	<i>income</i>	
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)				
Aset keuangan:				Financial assets:
Kas dan setara kas	301,153	301,153	-	- Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	29,952	29,952	-	- Restricted cash
Piutang usaha	124,248	124,248	-	- Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	2,526	2,526	-	- Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	18	18	-	- Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	6,300	6,300	-	- Other non-current financial assets
Jumlah aset keuangan	464,197	464,197	-	Total financial assets

37. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

37. Financial assets and liabilities (continued)

30 Juni 2019	Jumlah/ Total	Nilai wajar diakui pada laba rugi/ Fair value through profit or loss	Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	June 30, 2019
Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Liabilitas keuangan:				Financial liabilities:
Utang usaha	72,685	-	72,685	Trade payables
Akrual	18,765	-	18,765	Accruals
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	2,352	-	2,352	Other current financial liabilities
Liabilitas sewa	611	-	611	Lease liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	94,413	-	94,413	Total financial liabilities
31 Desember 2018				December 31, 2018
Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Liabilitas keuangan:				Financial liabilities:
Utang usaha	91,181	-	91,181	Trade payables
Akrual	25,599	-	25,599	Accruals
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	1,276	-	1,276	Other current financial liabilities
Pinjaman bank	36,519	-	36,519	Bank borrowings
Jumlah liabilitas keuangan	154,575	-	154,575	Total financial liabilities

38. Pengelolaan risiko keuangan

Aktivitas Perseroan terpengaruh oleh berbagai jenis risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar, risiko harga dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara umum, program pengelolaan risiko keuangan Perseroan berfokus kepada ketidakpastian pasar keuangan dan berusaha meminimalkan efek tidak wajar terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Pengelolaan risiko dilakukan oleh Direksi Perseroan. Direksi mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatur risiko keuangan, sesuai keperluan. Direksi menyediakan prinsip-prinsip keseluruhan untuk pengelolaan risiko, termasuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Manajemen risiko permodalan

Tujuan Perseroan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal.

Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Perseroan juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Pada tanggal 30 Juni 2019, struktur modal Perseroan didanai oleh ekuitas pemegang saham.

38. Financial risk management

The Company's activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk, price risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company's overall financial risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Company.

Risk management is carried out by the Company's Board of Directors. The Board identifies, evaluates and manages financial risks, where considered appropriate. The Board of Directors provides principles for overall risk management, including market risk, credit risk and liquidity risk.

Capital risk management

The Company's objective when maintaining capital is to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure.

The Company actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows and capital expenditure and also consideration of future capital needs.

The Company also seeks to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position in order to ensure the optimal capital structure and return. As at June 30, 2019, the Company's capital structure is funded by shareholders' equity.

38. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar

Penjualan dan mayoritas pengeluaran operasional Perseroan dilakukan dalam mata uang Dolar AS, sehingga Perseroan tidak terekspos secara signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar.

Lihat Catatan 35 untuk rincian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS.

(ii) Risiko harga

Perseroan terpengaruh oleh fluktuasi harga nikel, batubara dan bahan bakar. Operasi dan kinerja keuangan dapat terpengaruh secara negatif oleh harga nikel, batu bara dan bahan bakar, yang bergantung dari tingkat permintaan dan penawaran dunia. Perseroan mengelola secara aktif risiko-risiko ini dengan melakukan penyesuaian seperlunya atas jadwal dan operasi pertambangan untuk mengurangi dampak fluktuasi harga.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, jika harga rata-rata nikel meningkat/menurun sebesar 15%, dengan semua variabel lain tetap, rugi sebelum pajak Perseroan meningkat/menurun sebesar AS\$20,01 juta (nilai penuh).

Pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, Perseroan tidak memiliki instrumen keuangan yang nilainya terkait langsung dengan pergerakan harga nikel dunia. Sehingga, fluktuasi harga nikel dunia tidak akan berdampak terhadap nilai buku dari instrumen keuangan Perseroan.

(iii) Risiko suku bunga

Perseroan menilai risiko suku bunga adalah minimal karena Perseroan tidak memiliki pembiayaan eksternal pada tanggal 30 Juni 2019. Eksposur tingkat bunga dipantau untuk menjaga risiko yang rendah dan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap Perseroan.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Perseroan yang terpengaruh oleh suku bunga.

38. Financial risk management (continued)

Market risk

(i) Foreign exchange risk

The Company's sales and the majority of its operating expenditures are denominated in US Dollars, and as such the Company does not have a significant exposure to the fluctuations in foreign exchange rates.

Refer to Note 35 for detail of monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollars.

(ii) Price risk

The Company is exposed to fluctuations in nickel, coal and fuel prices. The operations and financial performance may be adversely affected by the price of nickel, coal and fuel, which in turn will be determined by worldwide nickel supply and demand. The Company actively manages these risks by adjusting production schedules and mining operations as necessary to reduce the impact of price volatility.

For the period ended June 30, 2019, if the average price of nickel had increased/decreased by 15%, with all other variables held constant, the Company's pre-tax loss would have increased/decreased by US\$20.01 million (full amount).

At June 30, 2019 and December 31, 2018, the Company does not have any financial instruments whose value was directly linked to movements of the world nickel price. Therefore, fluctuation of the world nickel price will have no impact on the carrying amount of the Company's financial instruments.

(iii) Interest rate risk

The Company assesses the interest rate risk as minimal since the Company does not have any external financing as at June 30, 2019. Interest rate exposure is monitored to maintain a low risk and to minimise any negative impact to the Company.

The following table presents a breakdown of the Company's financial assets and liabilities which are impacted by interest rates.

	30 Juni/June 30, 2019					Jumlah/ Total	
	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate		Tidak terikat bunga/ Non interest bearing		
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year			
(Dalam ribuan Dolar AS)						(US Dollars, in thousands)	
Aset							Assets
Kas dan setara kas	84,949	-	27,000	-	-	111,949	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	23,417	-	23,417	Restricted cash
Piutang usaha	119,921	-	-	-	13,479	133,400	Trade receivables
Aset keuangan lancar lainnya	378	-	-	-	2,020	2,398	Other current financial assets
Piutang pihak berelasi non-usaha	-	-	-	-	87	87	Non-trade receivables from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	-	-	-	5,382	5,382	Other non-current financial assets
Jumlah aset keuangan	205,248	-	27,000	23,417	20,968	276,633	Total financial assets
Liabilitas							Liabilities
Utang usaha	-	-	-	-	(72,685)	(72,685)	Trade payables
Akrual	-	-	-	-	(18,765)	(18,765)	Accruals
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	-	-	-	(9,931)	(9,931)	Short-term employee benefit liabilities
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	-	-	-	-	(2,352)	(2,352)	Other current financial liabilities
Liabilitas leases	-	-	-	(611)	-	(611)	Lease liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	-	(611)	(103,733)	(104,344)	Total financial liabilities

38. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

38. Financial risk management (continued)

Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

(iii) Risiko suku bunga (lanjutan)

(iii) Interest rate risk (continued)

	31 Desember/December 31, 2018						Jumlah/ Total	
	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate		Tidak terikat bunga/ Non interest bearing			
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year				
(Dalam ribuan Dolar AS)							(US Dollars, in thousands)	
Aset								Assets
Kas dan setara kas	63,860	-	237,293	-	-	301,153	Cash and cash equivalents	
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	14,345	15,607	29,952	Restricted cash	
Piutang usaha	110,750	-	-	-	13,498	124,248	Trade receivables	
Aset keuangan lancar lainnya	639	-	-	-	1,887	2,526	Other current financial assets	
Piutang pihak berelasi non-usaha	-	-	-	-	18	18	Non-trade receivables from related parties	
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	-	-	-	6,300	6,300	Other non-current financial assets	
Jumlah aset keuangan	175,249	-	237,293	14,345	37,310	464,197	Total financial assets	
Liabilitas								Liabilities
Utang usaha	-	-	-	-	(91,181)	(91,181)	Trade payables	
Akrual	-	-	-	-	(25,599)	(25,599)	Accruals	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	-	-	-	(15,823)	(15,823)	Short-term employee benefit liabilities	
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	-	-	-	-	(1,276)	(1,276)	Other current financial liabilities	
Pinjaman bank	(36,519)	-	-	-	-	(36,519)	Bank borrowings	
Jumlah liabilitas keuangan	(36,519)	-	-	-	(133,879)	(170,398)	Total financial liabilities	

Pada tanggal 30 Juni 2019 perubahan suku bunga sebesar 0,5% dengan semua variabel lain tetap, tidak akan berdampak signifikan terhadap laba/(rugi) periode berjalan.

As at June 30, 2019, changes in interest rates by 0.5% with all other variables held constant would not have a significant impact to profit/(loss) of the period.

Risiko kredit

Risiko kredit cukup rendah karena produk nikel Perseroan dalam *matte*, dijual di pasar ekspor menggunakan kontrak "harus ambil" jangka panjang dalam mata uang Dolar AS dengan VCL (induk Perseroan) dan SMM yang merupakan salah satu pemegang saham mayoritas Perseroan. Risiko kredit juga muncul dari kas dan setara kas, terutama kas di bank dan deposito berjangka. Untuk bank, Perseroan hanya menyimpan dana di bank lokal maupun internasional yang bereputasi bagus untuk memperkecil risiko kredit (lihat Catatan 5).

Credit risk

Credit risk is minimal as the Company's nickel in *matte*, is sold in export markets pursuant to long-term, US Dollar denominated "must take" contracts with VCL (parent company) and SMM, one of the Company's majority shareholders. Credit risk also arises from cash and cash equivalents, specifically from cash in banks and time deposits. The Company has a policy to select reputable local and overseas banks to minimise credit risk (refer to Note 5).

38. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

38. Financial risk management (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur:

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about counterparty default rates:

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Piutang usaha:			Trade receivables:
Dengan pihak yang memiliki peringkat kredit eksternal:			Counterparties with external credit rating:
<i>Fitch</i>			<i>Fitch</i>
BBB- (2018: BBB+)	119,921	110,750	BBB- (2018: BBB+)
<i>Japan Credit Rating Agency</i>			<i>Japan Credit Rating Agency</i>
AA- (2018: AA-)	13,479	13,498	AA- (2018: AA-)
Berperingkat	133,400	124,248	Rated

30 Juni/June 30	2019	2018	31 Desember/December 31
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)			
Kas di bank, deposito berjangka dan kas yang di batasi penggunaannya (Moody's):			Cash in bank, time deposits and restricted cash (Moody's):
Aa3 (2018: Aa3)	6,943	173,233	Aa3 (2018: Aa3)
A2 (2018: A2)	77,032	58,404	A2 (2018: A2)
A1 (2018: A1)	17,000	84,129	A1 (2018: A1)
Baa2 (2018: Baa2)	24,391	15,339	Baa2 (2018: Baa2)
Ba3 (2018: Ba3)	10,000	-	Ba3 (2018: Ba3)
Berperingkat	135,366	331,105	Rated

Risiko likuiditas

Liquidity risk

Risiko likuiditas muncul dalam situasi dimana Perseroan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Pengelolaan risiko likuiditas dengan kehati-hatian mengimplikasikan pemeliharaan kecukupan kas dan setara kas. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan melakukan pengawasan berkala atas arus kas yang direncanakan dan arus kas aktual dan memasang profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Tabel di bawah ini mengklasifikasikan liabilitas keuangan yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang disajikan adalah arus kas kontraktual dan tidak didiskontokan.

The table below classifies the Company's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows.

30 Juni 2019	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	Antara 3 bulan dan 1 tahun/ Between 3 months and 1 year	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	June 30, 2019
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)						
Utang usaha	(72,685)	-	-	-	-	Trade payables
Akrual	(18,765)	-	-	-	-	Accruals
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(2,352)	-	-	-	-	Other current financial liabilities
Liabilitas sewa	(102)	(297)	(307)	-	-	Lease liabilities

31 Desember 2018						December 31, 2018
(Dalam ribuan Dolar AS) (US Dollars, in thousands)						
Utang usaha	(91,181)	-	-	-	-	Trade payables
Akrual	(25,599)	-	-	-	-	Accruals
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	(1,276)	-	-	-	-	Other current financial liabilities
Pinjaman bank	(19,792)	(19,300)	-	-	-	Bank borrowings

38. Pengelolaan risiko keuangan (lanjutan)

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajar pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.

39. Aset dan liabilitas kontinjensi

a. Perihal lingkungan hidup

Kehutanan

Berdasarkan KK Perseroan sebagaimana telah diubah dengan KK 2014, Perseroan diberikan semua lisensi dan izin yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan pengusahaannya serta semua kewenangan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pertambangan di dalam wilayah KK.

Pada tahun 1999, Undang-Undang Kehutanan 1999 diterbitkan. Undang-Undang Kehutanan 1999 secara tegas melarang penambangan terbuka di kawasan hutan lindung.

Pada bulan Mei 2004, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden yang mengakui KK Perseroan sebagai salah satu dari 13 perusahaan tambang yang diizinkan untuk melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung (sampai dengan berakhirnya izin/kontrak). Selanjutnya pada tahun 2008, Perseroan mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk seluruh kawasan hutan yang berada di dalam wilayah KK, dengan tetap mencadangkan dan tidak mengurangi hak-hak Perseroan berdasarkan KK.

Peraturan kehutanan menetapkan kewajiban tertentu bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, antara lain untuk melakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan ("PSDH") dan Dana Reboisasi, melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai, melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan izin pinjam pakai kawasan hutan dan untuk melakukan perlindungan hutan.

Untuk periode bulan Juni 2019 – Juni 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak untuk kawasan hutan yang terganggu di wilayah proyek Karebbe sebesar IDR450 juta atau setara dengan AS\$0,03 juta (nilai penuh).

Pada 14 Mei 2012, Kementerian Kehutanan menerbitkan Keputusan No. 2626/Menhut-V/PHL/2012 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai atas nama Perseroan, sebagaimana diubah dengan SK No. 5714/Menlhk-PDASHL/KTA/2015. Surat Keputusan ini diterbitkan untuk menetapkan area rehabilitasi daerah aliran sungai atas izin pinjam pakai Karebbe. Perseroan telah menunjuk kontraktor dan akan mengeluarkan IDR42 juta/ha (nilai penuh) untuk memenuhi kewajiban rehabilitasi ini (setara dengan perkiraan AS\$3,086/ha). Sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, jumlah yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk memenuhi kewajiban rehabilitasi ini adalah sebesar IDR0,4 miliar atau setara dengan AS\$28 ribu (nilai penuh).

Pada 31 Desember 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi wilayah Sorowako melalui Keputusan No. SK.645/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2018. Dengan diterbitkannya izin ini, maka Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33/2014. Perseroan juga memiliki kewajiban lainnya yang wajib dipenuhi setelah mendapatkan penetapan batas areal kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain kewajiban pembayaran PSDH, Dana Reboisasi dan nilai tegakan, serta kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai.

38. Financial risk management (continued)

Fair value estimation

Fair value is the price that would be received to sell an asset or the price that would be paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and liabilities approximates the fair value of the financial assets and liabilities as at June 30, 2019 and December 31, 2018.

39. Contingent assets and liabilities

a. Environmental matters

Forestry

Based on the Company's CoW as amended by the 2014 CoW, the Company is granted all licenses and permits to construct and operate the enterprise as well as all authorisations needed to conduct mining activities in the areas covered by the CoW.

In 1999, the 1999 Forestry Law was proclaimed. The 1999 Forestry Law expressly prohibits open pit mining in protected forests.

In May 2004, the President issued a Presidential Decree which recognises the Company's CoW as one of the 13 mining companies permitted to conduct mining activities in protected forest areas (until the end of the permit/contract). Therefore, in 2008, the Company applied for a lend-use permit for forest areas within its CoW area, but with strong reservation that its rights as provided in the CoW are not abrogated.

Forestry laws and regulations stipulate certain obligations for lend-use permit holders, among others, to pay Forest Resource Charges ("FRC") and Reforestation Funds, to pay Non-Tax State Revenue, to carry out rehabilitation of watershed area, to carry out empowerment of the community surrounding the lend-use permit area and to conduct forest protection.

For the period from June 2019 to June 2020, the Company has made the payment of non-tax state revenue for the affected area in the Karebbe Project in the amount of IDR450 million or equivalent to US\$0.03 million (full amount).

On May 14, 2012, the Ministry of Forestry issued Decree No. 2626/Menhut-V/PHL/2012 regarding stipulation on Forestation Location in the Framework of Watershed Rehabilitation under the name of the Company, as amended by SK No. 5714/Menlhk-PDASHL/KTA/2015. This Decree is issued to determine the watershed forestation area with respect to the Karebbe lend-use permit. The Company has appointed a contractor and shall incur IDR42 million/ha (full amount) to fulfil this forestation obligation (equivalent to approximately US\$3,086/ha). As of June 30, 2018, the amount incurred by the Company to fulfil the rehabilitation obligation is IDR0.4 billion or equivalent to US\$28 thousand (full amount).

On December 31, 2018 the Minister of Environment and Forestry issued forest area lend-use permit for production operation activities in Sorowako area by virtue of Decree No. 645/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2018. By the issuance of this permit, the Company is subject to the obligation to pay forestry non-tax state revenue as regulated under Government Regulation No. 33/2014. The Company is also subject to other obligations that need to be fulfilled after obtaining the determination on working area boundary from the Ministry of Environment and Forestry, among others, obligation to pay FRC, Reforestation Funds and timber fee, as well as to carry out rehabilitation of watershed area.

39. Aset dan liabilitas kontinjensi

a. Perihal lingkungan hidup (lanjutan)

Kehutanan (lanjutan)

Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk membayar pendapatan negara bukan pajak di bidang kehutanan secara retroaktif terhitung mulai tahun 2008 (yaitu tahun diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 2/2008 yang memperkenalkan pengenaan pendapatan negara bukan pajak terkait izin pinjam pakai kawasan hutan). Kewajiban pembayaran secara retroaktif ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Perseroan memiliki jangka waktu satu tahun untuk memenuhi kewajiban pembayaran ini. Nilai pembayaran akan didasarkan pada perhitungan Perseroan (*self-assessment*). Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan, Perseroan telah mengakui IDR169 milyar atau setara dengan AS\$11,2 juta (nilai penuh) beban di laporan keuangan tahun 2018 dan telah melakukan pembayaran IDR141 milyar atau setara dengan AS\$9,9 juta (nilai penuh) di tahun 2019 pendapatan negara bukan pajak retroaktif untuk tahun 2008 - 2018.

Pada bulan Mei 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi wilayah Bahodopi melalui Keputusan No. SK.341/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019. Dengan diterbitkannya izin ini, maka Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33/2014. Perseroan juga memiliki kewajiban lainnya yang wajib dipenuhi setelah mendapatkan penetapan batas areal kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain kewajiban pembayaran PSDH, Dana Reboisasi dan nilai tegakan, serta kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai.

Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi

Perseroan menerima izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi untuk kawasan KK Perseroan di (i) blok Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, (ii) blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dan (iii) blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Karena izin pinjam pakai tersebut hanya untuk kegiatan eksplorasi, maka Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pendapatan negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33/2014.

Lingkungan hidup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan, seluruh perusahaan diwajibkan untuk memperoleh Izin Lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha.

Perseroan telah memperoleh persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL") dari Pemerintah pada tahun 2008 yang mencakup seluruh area yang saat ini diusahakan di wilayah KK Sulawesi Selatan. Persetujuan AMDAL tersebut secara otomatis dianggap sebagai Izin Lingkungan bagi Perseroan. Untuk Blok Bahodopi, Perseroan mendapatkan Izin Lingkungan pada September 2013. Untuk Blok Pomalaa, Perseroan mendapatkan persetujuan dokumen AMDAL pada tahun 2005 dengan lingkup penambangan terbatas.

Pada bulan Desember 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Izin Lingkungan dan persetujuan atas addendum AMDAL untuk kegiatan operasional Perseroan di Blok Sorowako.

39. Contingent assets and liabilities

a. Environmental matters (continued)

Forestry (continued)

In addition, the Company is also required to pay the forestry non-tax state revenue retroactively starting from 2008 (i.e. since the issuance date of Government Regulation No. 2/2008 introducing non-tax state revenue related to lend-use permits). This retroactive payment obligation is in accordance with Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 regarding Guidance for Lend Use of Forest Area. The Company has a one-year period to fulfil this payment obligation. The payment amount will be based on a self-assessment basis. Based on the Company's self-assessment, the Company has recognised IDR169 billion or equivalent to US\$11.2 million (full amount) in the 2018 financial statements and has made payments of IDR141 billion or equivalent to US\$9.9 million (full amount) in 2019 for the retroactive forestry non-tax state revenue for the years 2008 - 2018.

In May 2019, the Minister of Environment and Forestry issued forest area lend-use permit for production operation activities in Bahodopi area by virtue of Decree No. 341/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2018. By the issuance of this permit, the Company is subject to the obligation to pay forestry non-tax state revenue as regulated under Government Regulation No. 33/2014. The Company is also subject to other obligations that need to be fulfilled after obtaining the determination on working area boundary from the Ministry of Environment and Forestry, among others, obligation to pay FRC, Reforestation Funds and timber fee, as well as to carry out rehabilitation of watershed area.

Lend-use permit for exploration activities

The Company received lend-use permits for exploration activities within the Company's CoW area in (i) the Bahodopi block, Morowali Regency, Central Sulawesi Province, (ii) the Pomalaa block, Kolaka and East Kolaka Regencies, South East Sulawesi Province and (iii) the Sorowako block, East Luwu Regency, South Sulawesi Province. Since the above mentioned lend-use permits only cover exploration activities, the Company does not have the obligation to pay the non-tax state revenue as stipulated in Government Regulation No. 33/2014.

Environment

Based on Government Regulation No. 27/2012 on Environmental Licenses, all companies are required to obtain an Environmental License as a pre-requisite for their business license.

The Company has already obtained an approved Environmental Impact Assessment ("AMDAL") from the Government in 2008 covering all areas that are currently being operated in the CoW area in South Sulawesi. The AMDAL approval is automatically deemed as the Company's Environmental License. For the Bahodopi Block, the Company obtained its Environmental License in September 2013. For the Pomalaa Block, the Company obtained AMDAL approval in 2005 with a limited mine scope.

In December 2017, the Ministry of Environment and Forestry issued an Environmental License and approval for AMDAL addendum for the Company's operational activities in the Sorowako Block.

39. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

b. Reklamasi tambang dan penutupan tambang

Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 ("PP 78/2010") mengharuskan Perseroan menyediakan jaminan keuangan atau jaminan reklamasi. Jaminan tersebut dapat berupa rekening bersama, deposito berjangka, bank garansi atau, pada kondisi tertentu yang menyangkut perusahaan-perusahaan publik, dapat berupa cadangan akuntansi yang dicatat dalam buku Perseroan.

Pada tanggal 28 Februari 2014, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM") menerbitkan Peraturan No. 07/2014 ("Peraturan Menteri No. 07/2014"). Berdasarkan Peraturan Menteri No. 07/2014, salah satu persyaratan untuk dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk cadangan akuntansi adalah terdaftar pada bursa efek di Indonesia dan telah menempatkan sahamnya setidaknya 40% dari total saham yang dimiliki. Guna memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Menteri No. 07/2014, Perseroan telah melakukan penyesuaian bentuk jaminan reklamasi dari cadangan akuntansi menjadi bank garansi mulai tahun 2015.

Perseroan juga telah menempatkan jaminan reklamasi pada bulan Desember 2017 untuk Blok Sorowako dengan jumlah sebesar AS\$2,8 juta (nilai penuh) untuk 2017 dan AS\$3,4 juta (nilai penuh) untuk 2018.

Pada bulan Januari 2019, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara memberikan persetujuan pelepasan sisa jaminan reklamasi tahun 2011-2016 untuk wilayah tambang Sorowako. Selanjutnya, Perseroan menempatkan kembali jaminan reklamasi untuk 2013-2017 dengan jumlah keseluruhan sebesar AS\$4,3 juta (nilai penuh). Perseroan juga menempatkan jaminan reklamasi untuk 2019 dengan jumlah sebesar AS\$3,5 juta (nilai penuh).

Pada bulan Januari 2019, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara juga memberikan persetujuan atas revisi rencana reklamasi untuk tahun 2019-2022 tambang Sorowako. Berdasarkan persetujuan ini, jumlah jaminan reklamasi untuk tahun 2019-2022 adalah sebesar AS\$42,2 juta (nilai penuh).

Pada bulan September 2017, Perseroan menempatkan kembali jaminan reklamasi untuk 2011 - 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar AS\$2,6 juta (nilai penuh) untuk Blok Sorowako. Untuk Blok Pomalaa, Perseroan menempatkan kembali jaminan reklamasi untuk 2015 - 2016 dengan jumlah keseluruhan sebesar AS\$7,443 (nilai penuh) pada bulan Oktober 2017.

Untuk Blok Pomalaa, Perseroan menempatkan jaminan reklamasi untuk 2017 dengan jumlah sebesar AS\$0,1 juta (nilai penuh) pada bulan November 2017 dan pada bulan Desember 2017, Perseroan telah menempatkan jaminan reklamasi untuk 2018 dengan jumlah sebesar AS\$0,2 juta (nilai penuh).

Pada bulan November 2018, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara memberikan persetujuan pelepasan jaminan reklamasi 2016-2017 dan sisa jaminan reklamasi 2015 untuk wilayah tambang Pomalaa. Pada bulan Desember 2018, Perseroan menempatkan jaminan reklamasi untuk 2019 dan menempatkan kembali jaminan reklamasi untuk 2016-2017 dengan jumlah keseluruhan sebesar AS\$0,1 juta (nilai penuh).

Pada tanggal 6 Januari 2015, KESDM menerbitkan persetujuan atas rencana penutupan tambang Perseroan. Jumlah estimasi biaya penutupan tambang disetujui sebesar AS\$69,9 juta (nilai penuh), yang akan ditempatkan secara bertahap sebagai deposito berjangka mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Dengan pelaksanaan komitmen investasi berdasarkan KK 2014, rencana penutupan tambang Perseroan akan berubah secara signifikan dibanding dengan rencana penutupan tambang yang telah diajukan dan disetujui oleh KESDM, baik dari aspek jumlah jaminan yang dibutuhkan maupun waktu penempatan.

Perseroan telah menempatkan jaminan penutupan tambang untuk 2017 sampai dengan 2019 dalam bentuk deposito berjangka masing-masing sebesar AS\$1,4 juta (nilai penuh), AS\$3,8 juta (nilai penuh) dan AS\$6,6 juta (nilai penuh).

Dengan diperolehnya Izin Lingkungan dan persetujuan atas perubahan AMDAL untuk kegiatan operasional Perseroan di Blok Sorowako, pada bulan Desember 2018, Perseroan mengajukan perubahan atas rencana penutupan tambang yang telah disetujui oleh KESDM pada tahun 2015. Rencana penutupan tambang ini dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 26/2018 (yang mencabut Peraturan Menteri No. 07/2014) dan Keputusan Menteri ESDM No.1827/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Praktik Penambangan yang Baik. Dalam hal perubahan ini disetujui oleh KESDM, maka jaminan penutupan tambang yang telah ditempatkan oleh Perseroan akan disesuaikan kembali.

39. Contingent assets and liabilities (continued)

b. Mine reclamation and mine closure

A financial surety, or reclamation guarantee, is required under Government Regulation No. 78 of 2010 ("GR 78/2010"). The surety can be in the form of a joint account, time deposit, bank guarantee or, in certain circumstances involving public companies, an accounting reserve recorded in the accounts of the Company.

On February 28, 2014, the Ministry of Energy and Mineral Resources ("MEMR") issued Regulation No. 07/2014 ("Ministerial Regulation No. 07/2014"). Based on Ministerial Regulation No. 07/2014, one of the requirements for placing a reclamation guarantee in the form of accounting reserve is to be registered on the Indonesia Stock Exchange with a free float of at least 40% of its shares. In order to fulfil the obligations under Ministerial Regulation No. 07/2014, the Company adjusted the form of its reclamation guarantee from an accounting reserve to a bank guarantee in 2015.

The Company has also placed reclamation guarantees in December 2017 for the Sorowako Block in the amount of US\$2.8 million (full amount) for 2017 and US\$3.4 million (full amount) for 2018.

In January 2019, the Directorate of Mineral and Coal issued its approval for the release of the remaining reclamation guarantees for 2011-2016 for Sorowako mining area. Subsequently, the Company replaced the reclamation guarantee for 2013-2017 in the total amount of US\$4.3 million (full amount). The Company also placed a reclamation guarantee for 2019 in the amount of US\$3.5 million (full amount).

In January 2019, the Directorate of Mineral and Coal also issued its approval for the revised reclamation plan for 2019-2022. Based on this approval, the total amount of reclamation guarantee for 2019-2022 is US\$42.2 million (full amount).

In September 2017, the Company replaced the reclamation guarantees for 2011 - 2016 in the total amount of US\$2.6 million (full amount) for the Sorowako Block. For the Pomalaa Block, the Company replaced the reclamation guarantee for 2015 - 2016 in the total amount of US\$7,443 (full amount) in October 2017.

For the Pomalaa Block, the Company placed the reclamation guarantees for 2017 in the amount of US\$0.1 million (full amount) in November 2017 and in December 2017, the Company has placed the reclamation guarantees for 2018 in the amount of US\$0.2 million (full amount).

In November 2018, the Directorate of Mineral and Coal issued its approval for the release of reclamation guarantees for 2016-2017 and the remaining reclamation guarantee for 2015 for Pomalaa mining area. In December 2018, the Company placed reclamation guarantee for 2019 and replaced the reclamation guarantee for 2016-2017 in the total amount of US\$0.1 million (full amount).

On January 6, 2015, the MEMR issued its approval of the Company's mine closure plan. The total estimated cost for the mine closure is in the amount of US\$69.9 million (full amount), which will be placed gradually in time deposits starting from 2017 up to 2023. By the implementation of investment commitments under the 2014 CoW, the Company's mine closure plan will change significantly compared to the mine closure plan that has been submitted to and approved by the MEMR, both in the amount and the period for the guarantee placement.

The Company has placed mine closure guarantees for 2017 up to 2019 in the form of time deposits in the amount of US\$1.4 million (full amount), US\$3.8 million (full amount) and US\$6.6 million (full amount), respectively.

With the issuance of the Environmental License and approval for AMDAL addendum for the Company's operational activity in the Sorowako Block, in December 2018, the Company submitted a revision to the mine closure plan that was approved by the MEMR in 2015. This mine closure plan was prepared in accordance with MEMR Regulation No. 26/2018 (which revoked Ministerial Regulation No. 07/2014) and MEMR Decree No.1827/K/30/MEM/2018 on Guidance for the Implementation of Good Mining Practices. If the revision is approved, the mine closure guarantee that has been placed by the Company will be adjusted.

39. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

c. Tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan dan perambahan

Berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Perseroan, Perseroan menetapkan bahwa terdapat Izin Usaha Pertambangan ("IUP") pihak ketiga yang tumpang tindih di dalam wilayah KK Perseroan di Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat terkini dari KESDM, KESDM mengkonfirmasi bahwa tiga dari empat IUP yang tumpang tindih dengan wilayah KK Perseroan telah dinyatakan *non-clean and clear* berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM dan Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 15 November 2018 dan telah dinyatakan dicabut/berakhir. Sedangkan satu IUP telah dinyatakan *non-clean and clear*, namun masih menunggu proses pencabutan IUP.

Sementara tidak terdapat tumpang tindih pertambangan di dalam Wilayah KK Perseroan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, terdapat beberapa perambahan yang dilakukan oleh masyarakat atau individu dalam bentuk perkebunan dan bangunan konstruksi temporer. Pada saat ini, perambahan tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kemampuan Perseroan untuk melaksanakan strategi pertumbuhannya.

Untuk mengatasi masalah perambahan di dalam wilayah KK Perseroan, Perseroan terus bekerja dengan instansi pemerintah terkait, termasuk dengan KESDM, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintah daerah.

d. Amandemen KK

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemerintah dan Perseroan menandatangani amandemen KK sebagai hasil kesepakatan renegotiasi sebagaimana diamanatkan oleh UU Pertambangan 2009. KK 2014 meliputi perubahan-perubahan prinsip sebagai berikut:

- Perseroan tetap dapat mempertahankan lahan yang diperlukan untuk kegiatan operasional dan keperluan lainnya. Renegosiasi ini mencerminkan luasan lahan yang memadai untuk keperluan investasi dan rencana pertumbuhan jangka panjang Perseroan.
- Royalti yang disepakati sebesar 2% dari penjualan dan naik menjadi 3% dari penjualan jika harga rata-rata nikel LME bulan sebelumnya sama atau lebih besar dari AS\$21.000/ton.
- Kewajiban bagi Perseroan untuk mendivestasikan tambahan 20% saham kepada peserta Indonesia. Proses divestasi ini akan dilakukan bulan Oktober 2019.
- Perseroan dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasinya sebanyak dua kali sepuluh tahun dalam bentuk izin operasi, dan tunduk pada persetujuan Pemerintah.

Selain perubahan-perubahan utama di atas, KK 2014 juga mengatur komitmen investasi yang sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan. Di bawah ini adalah ringkasan dari komitmen investasi Perseroan berdasarkan KK 2014.

Di Sulawesi Selatan, Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan suatu program investasi untuk memperluas kapasitas pengolahan dan pemurnian bijih di fasilitas Perseroan di Sorowako.

Di Sulawesi Tenggara, Perseroan berkomitmen terhadap pengembangan dan pembangunan suatu fasilitas pengolahan dan pemurnian sebagai bagian dari suatu joint venture, bersama dengan infrastruktur pendukungnya.

Jangka waktu Perseroan untuk memulai kegiatan konstruksi untuk setiap komitmen investasi bergantung pada diterimanya semua perizinan/persetujuan dan dengan mempertimbangkan studi kelayakan dan studi lingkungan. Selain itu, komitmen investasi Sulawesi Tengah dan Tenggara dapat dilakukan secara independen atau sebagai bagian dari suatu *joint venture* (usaha patungan).

Dalam hal Perseroan tidak memenuhi komitmen investasi sebagaimana diuraikan di atas, upaya satu-satunya Pemerintah (*sole remedy*) atas hal tersebut adalah pelepasan atas wilayah KK tertentu yang berdampak sebagaimana ditetapkan dalam KK 2014.

39. Contingent assets and liabilities (continued)

c. Overlapping "Izin Usaha Pertambangan" and encroachment

Based on the Company's field verifications, the Company determined that there are third party Mining Business Licences (*Izin Usaha Pertambangan* - "IUP") that overlap the Company's CoW area in Central Sulawesi. Based on a recent letter from the MEMR, the MEMR confirmed that three out of four IUPs that overlapped the Company's CoW area have been declared non-clean and clear based on the Minutes of Reconciliation between the Directorate General of Mineral and Coal of the MEMR and the Central Sulawesi Province dated 15 November 2018 and have been declared revoked or expired. The other IUP has been declared non-clean and clear, however is still awaiting IUP revocation process.

While there is no third party mining overlapping in the Company's CoW area in South Sulawesi and Southeast Sulawesi, there have been some community or individual encroachment in the form of plantations and temporary constructions. At this time, the encroachment does not pose any material risk to the Company's ability to proceed with its growth strategy.

To address the issue of encroachment on the Company's CoW area, the Company continues to work with the relevant government institutions, including the MEMR, the State Ministry of Environment and Forestry and local governments.

d. CoW amendment

On October 17, 2014, the Government and the Company signed an amendment to the CoW marking the conclusion of the renegotiation process, as required by the 2009 Mining Law. The 2014 CoW includes the following principal changes:

- The Company can retain areas required to support its operations. This represents a renegotiated land package that is sufficient to support the Company's investments and long-term growth plans.
- An agreed royalty rate of 2% of sales escalating to 3% if the average LME price for nickel is greater than or equal to US\$21,000/ton in the prior month.
- A requirement for the Company to divest a further 20% of the Company's shares to Indonesian participants. The process of divestment will be conducted by October 2019.
- The Company can apply to continue its operations for two additional periods of ten years, in the form of an operating license, subject to the Government's approval.

In addition to the above mentioned major changes, the 2014 CoW also outlines investment commitments consistent with the Company's growth strategy. Below is a summary of the Company's investment commitments under the 2014 CoW.

In South Sulawesi, the Company commits to implementing an investment program to expand the ore processing and refining capacity at the Company's facility in Sorowako.

In Southeast Sulawesi, the Company is committed to the development and construction of a processing and refining facility as part of a joint venture, together with supporting infrastructure.

The timeline for the Company to commence construction in respect of each investment undertaking is subject to the Company's receipt of all requisite licenses/approvals and consideration of feasibility and environmental studies. Further, the Central and Southeast Sulawesi undertakings may be undertaken independently or as part of a joint venture.

In the event that the Company does not fulfil the investment commitments as set out above, the remedy of the Government in this respect is the relinquishment of the affected area as defined by the 2014 CoW mining areas.

39. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

e. Paket peraturan pertambangan

Pada tahun 2017, Pemerintah menerbitkan paket peraturan pertambangan baru.

Ketentuan utama dari peraturan-peraturan baru yang berpotensi memiliki dampak terhadap Perseroan di masa depan diuraikan sebagai berikut:

- Divestasi: IUP/Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") dalam rangka penanaman modal asing tunduk pada kewajiban divestasi sebesar 51%.
- Harga patokan mineral: Pemegang IUP/IUPK wajib berpedoman pada harga patokan mineral dalam menjual logam.

Mengingat bahwa divestasi merupakan salah satu butir dalam amendemen KK (lihat Catatan 39d), Perseroan merujuk kepada peraturan tersebut di atas hanya jika KK 2014 tidak mengatur hal dimaksud.

f. Tuntutan hukum

Pada pertengahan bulan Desember 2015, Perseroan memperoleh kutipan putusan Mahkamah Agung RI mengenai Perkara No. 1279 K/Pid.Sus/2012 sehubungan dengan dugaan pelanggaran UU Kehutanan 1999 dan UU Lingkungan Hidup 1997. Salinan resmi putusan MA No. 1279 K/Pid.Sus/2012 tersebut baru diterima oleh Perseroan pada bulan Oktober 2016. Putusan tersebut menyatakan bahwa keempat mantan karyawan Perseroan bersalah dihukum dengan pidana penjara selama dua tahun dan bahwa Perseroan dijatuhi hukuman denda sebesar IDR5,0 miliar (nilai penuh). Putusan juga menghukum agar beberapa kendaraan Perseroan disita oleh Negara.

Perseroan telah menyerahkan seluruh kendaraan (empat unit), sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung, kepada Kantor Kejaksaan Malili. Pada bulan Maret 2017, Perseroan juga telah melakukan pembayaran denda sebesar IDR5,0 miliar (nilai penuh) kepada Jaksa. Pemenuhan permintaan tersebut bukan merupakan pengakuan terhadap tanggung jawab.

Faktanya, Perseroan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka atau dijadikan terdakwa dalam perkara, akan tetapi Mahkamah Agung justru menghukum Perseroan untuk membayar denda dan menyerahkan kendaraan-kendaraan sebagaimana tersebut di atas. Pada bulan Maret 2016 Perseroan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ("PK") atas putusan Mahkamah Agung tersebut dan mengajukan revisi permohonan PK pada bulan Februari 2017.

Sebagaimana diinformasikan di dalam situs Mahkamah Agung, permohonan PK ditolak. Manajemen masih menunggu konfirmasi mengenai putusan resmi Mahkamah Agung sebelum mengambil langkah berikutnya.

g. Peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban penggunaan Rupiah

Bank Indonesia ("BI") telah mengeluarkan surat No. 17/2430/DKSP tanggal 30 Oktober 2015 yang pada intinya menyetujui usulan Perseroan untuk tetap menggunakan mata uang selain Rupiah dalam transaksi-transaksinya sampai dengan berakhirnya KK. BI meminta Perseroan untuk melakukan penyesuaian kontrak-kontrak yang transaksinya dapat menggunakan Rupiah dan melaporkan hasil penyesuaian yang telah dilakukan Perseroan kepada BI setiap enam bulan.

h. Peraturan ESDM tentang kewajiban tata batas

Pada bulan Oktober 2015, Menteri ESDM menerbitkan Peraturan No. 33 Tahun 2015 yang mewajibkan pemegang IUP dan KK untuk melakukan tata batas wilayah. Perseroan, sebagai pemegang KK, memiliki jangka waktu enam bulan untuk melakukan kewajiban tersebut, terhitung sejak tanggal diterbitkannya peraturan. Pada bulan April 2018, kewajiban ini diubah melalui peraturan ESDM No. 25/2018. Berdasarkan peraturan yang baru ini, kewajiban untuk melakukan tata batas tidak berlaku bagi seluruh wilayah KK, namun hanya wilayah yang memenuhi kriteria yang ditentukan.

Saat ini, Perseroan belum dapat memenuhi Peraturan ini, mengingat sebagian besar wilayah KK Perseroan berada di dalam kawasan hutan dan Perseroan masih menunggu penetapan areal kerja untuk atas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun demikian, Perseroan telah melakukan pemasangan tanda batas pada wilayah non-kawasan hutan secara bertahap dan Perseroan senantiasa menyampaikan laporan kemajuan kepada KESDM.

39. Contingent assets and liabilities (continued)

e. Mining regulation package

In 2017, the Government issued a package of new mining regulations.

The highlights of the new regulations that may have impacts on the Company in the future are outlined below:

- Divestment: Foreign direct investment IUP/Special Mining Business Licence (*Izin Usaha Pertambangan Khusus* – "IUPK") holders are subject to 51% divestment requirement.
- Benchmark Price: IUP/IUPK holders must use a defined benchmark price as the guidance in selling minerals.

As divestment is one of the CoW amendment items (refer to Note 39d), the Company will refer to the above regulations only if the 2014 CoW is silent on the matter.

f. Litigation

In mid December 2015, the Company obtained an excerpt of the Supreme Court decision regarding Case No. 1279 K/Pid.Sus/2012 with respect to the alleged violations of the 1999 Forestry Law and the 1997 Environmental Law. The official copy of Decision No. 1279 K/Pid.Sus/2012 was only received by the Company in October 2016. The decision stated that four former employees of the Company are guilty as charged and, therefore, sentenced to imprisonment of two years; and that the Company is ordered to pay a fine of IDR5.0 billion (full amount). The decision also ordered that some vehicles of the Company are to be seized by the State.

The Company has delivered all vehicles (four units), as stated in the Supreme Court Decision, to the Malili Prosecutor Offices. In March 2017, the Company also paid the IDR5.0 billion (full amount) fine to the Prosecutor. The Company's fulfillment of the request is not an admission of liability.

In fact, the Company has neither been named as a suspect nor determined as a defendant in the case, yet the Supreme Court punished the Company to pay a fine and surrender the above mentioned vehicles. In March 2016 the Company submitted a Reconsideration (*Peninjauan Kembali* - "PK") against the Supreme Court decision and submitted a revised application for Reconsideration in February 2017.

As informed through the Supreme Court website, the PK application has been rejected. Management is still waiting for the Supreme Court's written decision prior to taking next steps.

g. Bank Indonesia regulation on obligation to use Rupiah

The Bank Indonesia ("BI") has issued letter No. 17/2430/DKSP dated October 30, 2015 which essentially approved the Company's proposal to continue using currency other than Rupiah in its transactions until the expiry of the CoW. BI asked the Company to adjust its contracts that can use Rupiah and to provide BI with a report on the adjustments the Company has made every six months.

h. MEMR regulation on boundary markings

In October 2015, the MEMR issued Regulation No. 33/2015 which imposes the obligation for IUP and CoW holders to establish geographic boundary markings. The Company, as a CoW holder, has six months to comply with the Regulation from the date of promulgation. In April 2018, this obligation was revised by MEMR regulation No. 25/2018. Based on this new regulation, obligation to establish geographic boundary markings does not apply to all CoW area, but only to areas which fulfil the stipulated criteria.

At present, the Company is not able to fully comply with the Regulation, considering the majority of the Company's CoW area is located inside forest areas and the Company is still awaiting the issuance of the working area determination for the forestry land-use permits for production operation activities from the Ministry of Environment and Forestry. However, the Company has started to gradually establish the boundary marking in the non-forestry area and the Company reports the progress to the MEMR.

39. Aset dan liabilitas kontinjensi (lanjutan)

i. Peraturan Pemerintah No. 1/2019

Sebagai implementasi dari Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah ke-XVI, pada 10 Januari 2019, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia No. 21/3/PBI/2019 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1523/2019. Peraturan ini menetapkan pengaturan mengenai penempatan dan penggunaan devisa hasil ekspor sumber daya alam dari Indonesia (termasuk nikel matte). Berdasarkan peraturan di atas, Perseroan wajib untuk menempatkan devisa hasil ekspor melalui rekening khusus pada bank devisa di Indonesia dan hanya dapat dikirim ke luar negeri untuk tujuan tertentu. Mempertimbangkan bahwa peraturan baru ini memiliki dampak terhadap SEFA antara Perseroan dengan Mizuho Bank, Ltd dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd untuk Proyek Karebbe, yang akan berakhir pada bulan Agustus 2019, Perseroan telah melakukan pelunasan awal atas fasilitas tersebut.

j. Pembentukan anak perusahaan

Pada tanggal 25 Juni 2019, Perseroan telah membentuk dua anak perusahaan, yaitu PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan PT Kolaka Nickel Indonesia ("anak perusahaan"), yang masing-masing 99,9% sahamnya dimiliki Perseroan dan 0.1% saham dimiliki oleh VCL. Total modal yang akan ditempatkan dan disetor pada masing-masing anak perusahaan adalah sebesar IDR10 miliar (nilai penuh). Modal ini belum dibayarkan atau didaftarkan.

Pembentukan anak perusahaan tersebut bertujuan sebagai suatu tahapan dalam pelaksanaan komitmen investasi Perseroan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara berdasarkan Amandemen KK, dimana Perseroan berkomitmen atas pembangunan fasilitas pengolahan bijih nikel.

Manajemen berpendapat bahwa dampak dari pembentukan anak perusahaan ini tidak material sehingga laporan keuangan konsolidasian tidak disajikan pada tanggal 30 Juni 2019.

40. Informasi tambahan untuk laporan arus kas

Kegiatan signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas:

30 Juni	2019	2018 (tidak diaudit/ unaudited)	June 30
(Dalam ribuan Dolar AS)			(US Dollars, in thousands)
Pembelian aset tetap yang dibiayai melalui utang dan akrual	14,405	10,525	Acquisition of fixed assets through incurrence of payables and accruals
Penambahan/(pembalikan) aset tetap dari provisi penghentian pengoperasian aset	6,334	(20,278)	Addition/(reversal) of fixed assets from provision for asset retirement

41. Informasi komparatif

Beberapa akun di dalam informasi komparatif telah disajikan kembali untuk menyesuaikan dengan presentasi laporan keuangan periode berjalan.

39. Contingent assets and liabilities (continued)

i. Government Regulation No. 1/2019

As an implementation of the Government's 16th Economic Policy Package, on January 10, 2019, the Government issued Government Regulation No. 1 of 2019 on Export Proceeds from Natural Resources Development, Management and/or Processing Activities, as further implemented under Bank of Indonesia Regulation No. 21/3/PBI/2019 and Minister of Finance Decree No. 1523/2019. This regulation sets out the arrangements for the deposit and use of proceeds from the export of natural resources from Indonesia. Based on the above regulations, the Company's export proceeds must now be parked onshore within a specific account maintained with a foreign exchange bank in Indonesia and can only be sent offshore for specific purposes. Considering that this new regulation will impact the SEFA between the Company and Mizuho Bank, Ltd and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd for the Karebbe Project, which will expire in August 2019, the Company has made early repayment of the facility.

j. Establishment of subsidiary companies

On June 25, 2019, the Company has established two subsidiary companies, namely PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan PT Kolaka Nickel Indonesia ("subsidiary companies"), each of which has 99.9% of its shares owned by the Company and 0.1% by VCL. The total capital to be issued and paid for in each of the subsidiary companies is IDR10 billion (full amount). The capital has not yet been paid or subscribed for.

The establishment of the subsidiary companies is intended as a milestone in the implementation of the Company's investment commitments in Central Sulawesi and Southeast Sulawesi provinces based on the CoW Amendment, in which the Company is committed to the construction of nickel ore processing facilities.

Management is of the opinion that the impact of the establishment of subsidiary companies is immaterial, therefore consolidated financial statements have not been prepared as at June 30, 2019.

40. Supplementary information for statements of cash flows

Significant activities not affecting cash flows:

30 Juni/June 30, 2018 (Tidak diaudit)/Unaudited	2018 (tidak diaudit/ unaudited)	June 30
(Dalam ribuan Dolar AS)		(US Dollars, in thousands)
Pembelian aset tetap yang dibiayai melalui utang dan akrual	14,405	10,525
Penambahan/(pembalikan) aset tetap dari provisi penghentian pengoperasian aset	6,334	(20,278)

41. Comparative information

Certain accounts in the comparative information have been reclassified to conform with the current period presentation of financial statements.

	30 Juni/June 30, 2018 (Tidak diaudit)/Unaudited			
	Disajikan sebelumnya/ Previously reported	Reklasifikasi/ Reclassifications	Setelah reklasifikasi/ After reclassifications	
(Dalam ribuan Dolar AS)				(US Dollars, in thousands)
Pendapatan lainnya	1,841	481	2,322	Other income
Beban lainnya	(5,631)	(2,322)	(7,953)	Other expenses
Pendapatan keuangan	-	1,841	1,841	Finance income

42. Peristiwa setelah tanggal neraca

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Menteri") No. 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham pada RUPST 2019 dan RUPSLB 2018 sebagaimana dibuktikan Surat Menteri No. 272/30/MEM.B/2019 tertanggal 11 Juli 2019 tentang Persetujuan Perubahan Direksi dan/atau Komisaris PT Vale Indonesia Tbk.

42. Subsequent event

The Company has complied with the Minister of Energy and Mineral Resources (the "Minister") Regulation No. 48 Year 2017 on the Supervision of the Implementation of Business Activities in the Field of Energy and Mineral Resources with respect to the changes in the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners' approved by the shareholders at the 2019 AGMS and 2018 EGMS, as evidenced by the Minister's Letter No. 272/30/MEM.B/2019 dated 11 July 2019 on the Approval to the Change of the Directors and/or Commissioners of PT Vale Indonesia Tbk.